



SALINAN

**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 22 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
TAHUN 2023-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Tahun 2023-2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 Nomor 174);
8. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 Nomor 632);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH TAHUN 2023-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pringsewu yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Pringsewu adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pringsewu serta memperhatikan RPJMD Provinsi Lampung dan RPJM Nasional.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
7. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penetapan, pengkajian, perekayasaan dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
8. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat di daerah.
9. *Roadmap* Penguatan SIDA Kabupaten Pringsewu adalah dokumen yang berisi kebijakan umum dan program prioritas pembangunan dalam rangka penguatan sistem inovasi Kabupaten Pringsewu untuk periode Tahun 2023-2026.

BAB II

ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

Pasal 2

- (1) Bupati menugaskan tim koordinasi melakukan penyusunan *Roadmap* Penguatan SIDA.
- (2) *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah merupakan dokumen yang berisi kebijakan penguatan sistem inovasi di Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2026, yang memuat:
 - a. kondisi SIDA saat ini;
 - b. tantangan dan peluang SIDA;
 - c. kondisi SIDA yang akan dicapai;
 - d. arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA;
 - e. fokus dan program prioritas SIDA; dan
 - f. rencana aksi penguatan SIDA.
- (3) *Roadmap* penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakomodasi seluruh program dan kegiatan yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 3

- (1) *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan:
 - a. salah satu landasan dan Pedoman Operasional bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2023-2026.
 - b. salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pringsewu 2023-2026.
- (2) Tim koordinasi Kabupaten mengintegrasikan *Roadmap* penguatan SIDA ke dalam dokumen RPJMD.
- (3) Dalam hal Peraturan Daerah tentang RPJMD sudah ditetapkan, Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan perubahan Peraturan Daerah yang mengatur RPJMD.
- (4) Perubahan Peraturan Daerah harus mengintegrasikan *Roadmap* penguatan SIDA.

BAB III PENYUSUNAN

Pasal 4

Sistematika penyusunan *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- | | |
|----------|---|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| BAB II | TINJAUAN KEBIJAKAN |
| BAB III | GAMBARAN UMUM WILAYAH |
| BAB IV | METODE PENYUSUNAN INOVASI DAERAH |
| BAB V | POTENSI DAN MASALAH SERTA ISU STRATEGIS |
| BAB VI | ANALISIS DAN PEMBAHASAN KONDISI SIDA |
| BAB VII | PERUMUSAN KONSEP KONDISI SIDA KABUPATEN PRINGSEWU |
| BAB VIII | FOKUS PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS SIDA |
| BAB IX | INDIKATOR KETERCAPAIAN KINERJA SIDA |
| BAB X | RENCANA AKSI SIDA KABUPATEN PRINGSEWU |

Pasal 5

Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 29 Desember 2023
PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal

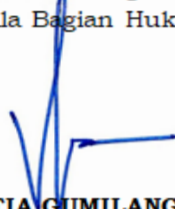
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023 NOMOR 605

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



PUTRA ADITIA GUMILANG, S.H., M.H

Pembina / IV.a

NIP. 19870212 201001 1 005

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GAMBAR.....	9
BAB I PENDAHULUAN	12
1.1 Latar Belakang.....	12
1.2 Permasalahan	14
1.3 Tujuan dan Sasaran.....	15
1.4 Ruang Lingkup	16
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah	16
1.4.2 Ruang Lingkup Kegiatan	16
1.5 Dasar Hukum	16
1.6 Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN	19
2.1 Kebijakan Sisten Inovasi Daerah	19
2.1.1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.....	19
2.1.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.....	19
2.1.3 Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 03 Tahun 2012 dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.....	22
2.2 Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pringsewu.....	24
2.2.1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.....	24
2.2.2 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No. 02 Tahun 2012 Tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2031.....	25

2.2.3 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No. 03 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pringsewu 2005-2025	27
2.2.4 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No. 11 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022	34
2.2.5 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020/37	
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH	40
3.1 Karakteristik Wilayah Kabupaten Pringsewu	40
3.2 Kondisi Sosial dan Kependudukan.....	42
3.3 Kondisi Perekonomian	45
3.4 Kondisi Infrastruktur	47
3.5 Kondisi Kelembagaan	51
BAB IV METODE PENYUSUNAN	55
4.1 Metode Identifikasi Sektor Unggulan	56
4.2 Metode Identifikasi Kelembagaan Sistem Inovasi Daerah.....	57
4.3 Metode Identifikasi Jaringan Sistem Inovasi Daerah	58
4.4 Metode Identifikasi Sumber daya Sistem Inovasi Daerah.....	58
BAB V POTENSI, MASALAH SERTA ISU STRATEGIS.....	60
5.1 Potensi Pembangunan Kabupaten Pringsewu	60
5.1.1 Pengembangan Kawasan Pertanian	60
5.1.2 Pengembangan Kawasan Perikanan.....	61
5.1.3 Pengembangan Kawasan Pertambangan.....	61
5.1.4 Pengembangan Kawasan Industri	62
5.1.5 Pengembangan Kawasan Pariwisata.....	62
5.1.6 Pengembangan Kawasan Permukiman	63
5.1.7 Pengembangan Kawasan Peruntukan Lainnya	63
5.2 Masalah Pembangunan Kabupaten Pringsewu.....	64
5.3 ISU STRATEGIS.....	66

5.3.1	Revolusi Industri 4.0	66
5.3.2	Sustainable Development Goals (SDGs).....	71
5.3.3	Isu Strategis Provinsi Lampung dan Kabupaten Pringsewu	77

BAB VI KONDISI PENGUATAN SIDA SAAT INI

6.1	Potensi Ekonomi dan Sektor Unggulan	81
6.1.1	Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.....	82
6.1.2	Sektor Industri Pengolahan.....	84
6.1.3	Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	84
6.1.4	Dukungan OPD Terhadap Potensi Ekonomi dan Sektor Unggulan	85
6.2	Kelembagaan SIDA	91
6.2.1	Peraturan Kabupaten Pringsewu yang Mendukung Inovasi.....	91
6.2.2	Kelembagaan Inovasi Daerah Kabupaten Pringsewu.....	93
6.2.3	Budaya Inovasi di Kabupaten Pringsewu	95
6.2.4	Pelayanan Berbasis Teknologi di Kabupaten Pringsewu.....	96
6.3	Jaringan SIDA.....	98
6.3.1	Realisasi Capaian Indikator Inovasi Menurut Rencana Pengembangan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pringsewu.....	98
6.3.2	Jaringan Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Pringsewu	99
6.3.3	Prioritas Program Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu 2020	100
6.3.4	Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pringsewu	106
6.3.5	Program Inovasi OPD di Kabupaten Pringsewu	110
6.4	Sumber Daya SIDA	110
6.4.1	Sumber Daya Kependudukan	112
6.4.2	Sumber Daya Aparatur Sipil Negara Kabupaten Pringsewu.....	130
6.5	Arah Pembangunan Kabupaten Pringsewu.....	137

BAB VII PERUMUSAN KONSEP KONDISI SIDA KABUPATEN PRINGSEWU ...	140
7.1 Analisis SWOT SIDA.....	140
7.1.1 SWOT Potensi Ekonomi dan Sektor Unggulan Kabupaten Pringsewu.....	140
7.1.2 SWOT Kelembagaan SIDA Kabupaten Pringsewu.....	141
7.1.3 SWOT Jaringan SIDA Kabupaten Pringsewu	141
7.1.4 SWOT Sumber Daya SIDA Kabupaten Pringsewu.....	142
7.2 Permasalahan dalam Pelaksanaan SIDA	143
BAB VIII FOKUS PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS SIDA.....	145
8.1 Visi Misi SIDA di Kabupaten Pringsewu.....	150
8.2 Tujuan dan Sasaran.....	154
8.3 Arahan Kebijakan dan Strategi	155
BAB IX INDIKATOR KETERCAPAIAN KINERJA SIDA	157
BAB X RENCANA AKSI SIDA KABUPATEN PRINGSEWU	159

DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GAMBAR	9
DAFTAR GAMBAR	11
BAB I PENDAHULUAN	12
1.1 Latar Belakang	12
1.2 Permasalahan	14
1.3 Tujuan dan Sasaran	15
1.4 Ruang Lingkup	16
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah	16
1.4.2 Ruang Lingkup Kegiatan	16
1.5 Dasar Hukum	16
1.6 Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN	19
2.1 Kebijakan Sisten Inovasi Daerah	19
2.1.1 Undang-undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	19
2.1.2 Peraturan Pmerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah	19
2.1.3 Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 03 Tahun 2012 dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah	22
2.2 Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pringsewu	24
2.2.1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	24
2.2.2 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No. 02 Tahun 2012 Tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2031	25
2.2.3 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No. 03 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pringsewu 2005-2025	27
2.2.4 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No. 11 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022	34
2.2.5 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020	37
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH	40
3.1 Karakteristik Wilayah Kabupaten Pringsewu	39
3.2 Kondisi Sosial dan Kependudukan	41
3.3 Kondisi Perekonomian	44
3.4 Kondisi Infrastruktur	46
3.5 Kondisi Kelembagaan	50
BAB IV METODE PENYUSUNAN	54
	5

4.1	Metode Identifikasi Sektor Unggulan	55
4.2	Metode Identifikasi Kelembagaan Sistem Inovasi Daerah	56
4.3	Metode Identifikasi Jaringan Sistem Inovasi Daerah	57
4.4	Metode Identifikasi Sumber daya Sistem Inovasi Daerah	57
BAB V POTENSI, MASALAH, SERTA ISU STRATEGIS		59
5.1	Potensi Pembangunan Kabupaten Pringsewu	59
5.1.1	Pengembangan Kawasan Pertanian	59
5.1.2	Pengembangan Kawasan Perikanan	60
5.1.3	Pengembangan Kawasan Pertambangan	60
5.1.4	Pengembangan Kawasan Industri	61
5.1.5	Pengembangan Kawasan Pariwisata	61
5.1.6	Pengembangan Kawasan Permukiman	62
5.1.7	Pengembangan Kawasan Peruntukan Lainnya	62
5.2	Masalah Pembangunan Kabupaten Pringsewu	63
5.3	ISU STRATEGIS	65
5.3.1	Revolusi Industri 4.0	65
5.3.2	Sustainable Development Goals (SDGs)	70
5.3.3	Isu Strategis Provinsi Lampung dan Kabupaten Pringsewu	76

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Luas Lahan Kecamatan di Kabupaten Pringsewu.....	42
Tabel 3. 2 Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Pringsewu.....	44
Tabel 3. 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pringsewu	45
Tabel 3. 4 Jumlah Sarana Pendidikan Kabupaten Pringsewu	47
Tabel 3. 5 Jumlah BTS Kabupaten Pringsewu.....	50
Tabel 5. 1 Permasalahan Strategis Kabupaten Tanggamus.....	64
Tabel 6. 1 Produksi Panen Tanaman Pangan Kabupaten Pringsewu	83
Tabel 6. 2 Produksi Panen Sayur-Sayuran Kabupaten Pringsewu	84
Tabel 6. 3 Produksi Panen Buah-Buahan Kabupaten Pringsewu	84
Tabel 6. 4 Jumlah Industri Kecil dan Industri Rumahan Kabupaten Pringsewu	85
Tabel 6. 5 Jumlah Perdagangan Kabupaten Pringsewu	86
Tabel 6. 6 Cakupan Bina Kelompok Tani	87
Tabel 6. 7 Kegiatan Inovasi Daerah Kabupaten Pringsewu	88
Tabel 6. 8 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu	94
Tabel 6. 9 Kegiatan Inovasi Daerah Kabupaten Pringsewu	98
Tabel 6. 10 Kegiatan Inovasi Daerah Kabupaten Pringsewu	110
Tabel 6. 11 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2016–2020	112
Tabel 6. 12 Jumlah Fasilitas Pendidikan Kanak-Kanak (TK) Menurut kecamatan di kabupaten Pringsewu, 2017–2020	114
Tabel 6. 13 Jumlah Fasilitas Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Menurut kecamatan di kabupaten Pringsewu, 2016–2020	115
Tabel 6 14 Jumlah Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Kecamatan di Kabupaten Pringsewu, 2016–2021	116
Tabel 6. 15 Jumlah Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Akhir (SMA) Menurut Kecamatan di Kabupaten Pringsewu, 2016–2021	117
Tabel 6 16 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pringsewu Dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2011–2016	119
Tabel 6 17 Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pringsewu Dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2011-2016	120
Tabel 6. 18 Profil Pejabat Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu	131

Tabel 6. 19 Kegiatan Inovasi Daerah Kabupaten Pringsewu	136
Tabel 8. 1 Indikator Ketercapaian Kinerja SIDA Kabupaten Pringsewu	145
Tabel 7. 2 Pilar Penguatan SIDA Kabupaten Pringsewu	147
Tabel 8. 1 Keterkaitan Strategi Terhadap Pemaknaan Visi RPJMD Kabupaten Pringsewu	150
Tabel 9. 1 Indikator Ketercapaian Kinerja SIDA Kabupaten Pringsewu	157
Tabel 10. 1 Rencana Aksi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pringsewu	159

DAFTAR GAMBAR

Gambar 6. 1 Grafik Jumlah Kelompok Masyarakat Sektor Pertanian di Kabupaten Pringsewu	94
Gambar 6. 2 Grafik Indikator SDM Kabupaten Pringsewu	98
Gambar 6. 3 Grafik Indikator Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	99
Gambar 6. 4 Grafik Indikator Informasi terkait Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Pringsewu 2020 (%)	103
Gambar 6. 5 Grafik Indikator Sarana Prasarana terkait Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Pringsewu 2020 (%)	103
Gambar 6. 6 Jumlah Penelitian di Kabupaten Pringsewu 2016 - 2021	104
Gambar 6. 7 Jumlah Penelitian berdasarkan Topik Umum Penelitian di Kabupaten Pringsewu 2016 - 2021	105
Gambar 6. 8 Jumlah Penelitian berdasarkan Topik Umum Penelitian di Kabupaten Pringsewu 2016 - 2021	105
Gambar 6. 9 Grafik Jumlah Penelitian Berdasarkan Institusi yang Melakukan Publikasi Penelitian Di Kabupaten Pringsewu 2016 - 2021	107
Gambar 6. 10 Jumlah Penduduk di Kabupaten Pringsewu Tahun 2016-2020	110
Gambar 6. 11 Piramida Penduduk di Kabupaten Pringsewu Tahun 2020	111
Gambar 6. 12 Grafik Angka Melek Huruf Kabupaten Pringsewu Tahun 2015–2019	118
Gambar 6. 13 Grafik Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pringsewu dengan Provinsi Tahun 2010–2016	119
Gambar 6. 14 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Pringsewu Tahun 2014–2020	121
Gambar 6. 15 Angka Partisipasi Sekolah Kab. Pringsewu Tahun 2014–2020	122
Gambar 6. 16 Angka Partisipasi Sekolah Kab. Pringsewu Tahun 2014–2020	123
Gambar 6. 17 Rasio Ketersediaan Sekolah di Kabupaten Pringsewu Tahun 2010–2016	124
Gambar 6. 18 Angka Putus Sekolah di Kabupaten Pringsewu Tahun 2010–2016	125
Gambar 6. 19 Grafik Angka Kelulusan Sekolah di Kabupaten Pringsewu Tahun	126
Gambar 6. 20 Grafik Angka Melanjutkan Sekolah di Kabupaten Pringsewu Tahun	127
Gambar 6. 21 Grafik Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Pringsewu Tahun 2010–2016	128
Gambar 6. 22 Guru Bersertifikat Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2010–2016	129

Gambar 7. 1 Permasalahan dalam Pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	144
Gambar 9. 1 Kerangka Keterkaitan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pringsewu yang Akan Dicapai	153

DAFTAR GAMBAR

Gambar 7. 1 Peta Administrasi Kabupaten Pringsewu	41
Gambar 7. 2 Grafik Jumlah Penduduk di Kabupaten Pringsewu	43
Gambar 7. 3 Grafik Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pringsewu	44
Gambar 7. 4 Penyumbang PDRB Kabupaten Pringsewu berdasarkan Lapangan Usaha	46
Gambar 7. 5 Perpustakaan Pringsewu	48
Gambar 7. 6 Bendungan Way Sekampung	49
Gambar 7. 7 Sebaran BTS Kabupaten Pringsewu	51
Gambar 7. 8 Grafik Jumlah Kelompok Masyarakat Sektor Pertanian di Kabupaten Pringsewu	53
Gambar 8. 1 Metode Penyusunan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pringsewu	56
Gambar 8. 2 Metode Identifikasi Sektor Unggulan	57
Gambar 8. 3 Metode Identifikasi Kelembagaan Sisten Inovasi Daerah	57
Gambar 8. 4 Metode Identifikasi Jaringan Sistem Inovasi Daerah	58
Gambar 8. 5 Metode Identifikasi Sumber Daya Sistem Inovasi Daerah	59
Gambar 8. 6 Tahapan Kegiatan Penyusunan Penguatan Sistem Inovasi Daerah	60
Gambar 9. 1 Industri 4.0 dan Sektor Prioritasnya	67
Gambar 9. 2 Sustainable Development Goals (SDGs) 2030	71
Gambar 9. 3 Rumah Tangga Miskin Kabupaten Pringsewu Dalam Konstelasi Provinsi	75
Gambar 9. 4 Pencapaian Pendidikan SMA Sederajat Kabupaten Pringsewu dalam Konstelasi Provinsi	76
Gambar 9. 5 Akses Air Bersih Rumah Tangga Kabupaten Pringsewu	77
Gambar 10. 1 Tahapan Kegiatan Penyusunan Penguatan SIDA	78
Gambar 10. 2 Rencana Kegiatan Penguatan SIDA	79

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU

NOMOR : TAHUN 2023

TENTANG

PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH TAHUN
2023-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inovasi merupakan faktor penting dalam menunjang pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan kinerja dan kapasitas sumberdaya dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi dan daya saing. Inovasi meliputi berbagai upaya dalam rangka menemukan strategi, program, dan kegiatan yang mendorong penambahan nilai tambah (*value added*) dan fungsi dari suatu komoditas, hal, praktek, dan sistem kerja (Holden, 2008). Di dalam konteks nilai tambah komoditas misalnya, inovasi diupayakan terhadap penciptaan mekanisme produksi yang mempertahankan efisiensi penggunaan barang input untuk menghasilkan produk dengan nilai tambah yang lebih baik. Hal ini juga berarti peningkatan dari sisi kapasitas produksi dan efisiensi tenaga kerja, biaya, dan waktu di dalam proses produksi. Selanjutnya, di dalam konteks nilai tambah hal dan praktek pembangunan, inovasi merupakan suatu upaya memperkuat kerangka rencana kerja, aksi, *role sharing*, pembiayaan sampai dengan pemantauan dan evaluasi, atau keseluruhannya disebut sebagai tata kelola (Healey, 2004). Terakhir, di dalam konteks nilai tambah terhadap sistem kerja, inovasi berarti penguatan kapasitas sumber daya manusia, regulasi, peralatan (baik software maupun hardware), fasilitas pendukung, dalam membantu pelaksanaan produksi atau tata kelola (Hoegl and Gemuenden, 2001).

Untuk dapat semakin besar dan maju, daerah harus meningkatkan daya saing dengan berinovasi secara terus menerus. Salah satu instrument pendukung utama dari upaya mewujudkan inovasi adalah riset, kajian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya ini tentu saja meliputi berbagai aktivitas seperti penelitian, publikasi, knowledge management dan sharing, training, peningkatan akses terhadap data dan informasi, serta integrasi output dari berbagai kegiatan tersebut yang mengawal dari hulu sampai dengan berakhir di hilir aktivitas pembangunan, atau yang sekarang lazim disebut sebagai “hilirisasi riset”. Seringkali, di banyak negara berkembang, termasuk di Indonesia, persoalan mismatch (ketidakcocokan) antara penelitian, pengkajian, dan pengajaran terhadap apa yang dibutuhkan

di lapangan atau di praktek pembangunan kerap kali terjadi, di mana penelitian dan pengembangan keilmuan banyak diarahkan pada hal-hal yang menjadi tren global, namun pada dasarnya suatu daerah belum memerlukannya. Di sisi lain, beberapa produk, tindakan pengelolaan, dan mekanisme kerja yang dilakukan secara *business as usual* di suatu daerah justru luput dari perhatian penelitian.

Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), merupakan agenda nasional sesuai dalam UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025 dan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yang menjadi salah satu strategi pengembangan inovasi yang diharapkan dapat mempercepat kemajuan suatu daerah. Keberadaan SIDa diharapkan dapat meningkatkan kualitas hilirisasi riset sehingga kemudian penelitian dan pengembangan keilmuan yang dilakukan oleh suatu daerah melalui stakeholdernya dapat tepat sasaran dan tepat guna dengan kebutuhan di daerah tersebut, konteks dan karakteristik masyarakat serta para pelaku usahanya. Sistem Inovasi Daerah (SIDa) pada level Kabupaten dan Kota sendiri diatur dalam Peraturan Bersama kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 3 tahun 2012 dan Kementerian Riset dan Teknologi No. 36 Tahun 2012 tentang penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Dijabarkan bahwa SIDa terkait dengan seluruh proses pengembangan inovasi antar pemangku kepentingan yang mengedepankan ilmu pengetahuan, teknologi serta pengembangan metode baru untuk meningkatkan kualitas, kapasitas, dan efektivitas serta efisiensi kinerja pembangunan daerah, termasuk peningkatan komoditas unggulan, tata kelola, daya saing manusia, serta sistem kerjanya.

Mengacu pada dokumen SIDa yang telah tersusun pada tahun 2021, prioritas program unggulan penguatan SIDa di Kabupaten Pringsewu terbagi menjadi lima bagian, yakni: inovasi pengembangan infrastruktur, inovasi pengembangan SDM, inovasi pengembangan sektor unggulan, inovasi iklim usaha kondusif, dan inovasi peningkatan tata kelola pemerintahan, yang keseluruhannya merupakan suatu kesatuan penting dalam mendukung upaya mendorong Pringsewu yang semakin berkembang dan berdaya saing di wilayah Provinsi Lampung bahkan nasional. Selain itu, prioritas unggulan dalam penguatan SIDa mengacu pada enam pilar strategis, yaitu: 1. Strategi Peningkatan Pengelolaan dan Produksi Sektor Unggulan khususnya Pertanian dan Perdagangan; 2. Strategi Pengembangan Kawasan Wisata berbasis Alam, Sektor Unggulan dan Kearifan Lokal seperti Agrowisata dan Minapolitan; 3. Strategi Pengembangan Sentra Ekonomi Kreatif di Daerah dengan Potensi Usaha Kecil Menengah; 4. Strategi Pengembangan dan Peningkatan Forum Kerjasama Ilmiah dan Jejaring Peneliti, Akademisi,

dan Pelaku Usaha; 5. Strategi Pengembangan Platform Inovasi Sosial (*Social Innovation Platform*) untuk mengedukasi masyarakat; dan 6. Strategi Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang Cerdas dan Kolaboratif. Dalam memperkuat rencana penerapan SIDA di Kabupaten Pringsewu maka dibutuhkan sebuah peraturan atau kebijakan penguatan SIDA yang merefleksikan pendekatan terintegrasi dan kesinambungan antar *stakeholder*, baik antara OPD, pemerintah dengan swasta, serta pemerintah, swasta dan masyarakat.

1.2 Permasalahan

Pada dasarnya permasalahan utama yang terjadi yang menjadi hambatan utama dalam upaya peningkatan inovasi pembangunan di Kabupaten Pringsewu adalah belum kuatnya orientasi, fokus, dan sistematika alur pengembangan inovasi. Pada aspek ekonomi, misalnya, berbagai permasalahan masih belum dapat diatasi secara menyeluruh, di sisi lain pemerintah daerah cenderung mengembangkan berbagai sektor dengan harapan meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, cenderung spontan dan tidak terfokus dengan baik. Pada sektor utama mereka, pertanian misalnya, beberapa masalah antara lain masih belum optimalnya produksi dan pengelolaan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, masih tingginya alih fungsi lahan. Sedangkan sektor perikanan air tawar yang sedang mulai dikembangkan masih terkendala oleh sarana prasarana, pengelolaan pemasaran, dan keterkaitan rantai usaha yang belum optimal, yang menyebabkan kecenderungan lambatnya penambahan jumlah investor setiap tahun. Akan tetapi, kegiatan pembangunan dilaksanakan setiap tahun secara rutin dengan belum mengeksplorasi berbagai peluang untuk dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi dan distribusinya dengan pendekatan yang mainstream seperti pengadaan alat pertanian, penyuluhan, dan dukungan pemasaran. Padahal, persoalannya terjadi pada banyak hal lain termasuk kualitas, daya saing, dan strategi pemasaran. Hal ini menyebabkan, produktivitas sektoral cenderung berkembang namun tidak pesat dan belum memiliki karakter atau branding image yang kuat.

Kemudian, terkait dengan sektor unggulan kedua mereka, pariwisata misalnya, persoalan belum optimalnya pencapaian tingkat kunjungan wisatawan dari target pengembangan pariwisata kabupaten, serta belum optimalnya pengelolaan sarana prasarana pendukung pariwisata menyebabkan banyak obyek wisata belum mendatangkan keuntungan yang signifikan bagi daerah. Di sisi lain, program-program pemerintah yang dirancang setiap tahunnya hanya terfokus pada upaya pembangunan infrastruktur, peningkatan promosi wisata,

dan pembinaan pelaku usaha pariwisata, yang hampir sebagian besar programnya adalah *business as usual*, hampir identik setiap tahun. Padahal, yang diperlukan adalah pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata, peningkatan tata kelola kawasan, serta strategi merangkul investor. Selanjutnya pada sektor perikanan, terkait belum mencukupinya kapasitas pengelolaan perikanan air tawar pada saat potensinya berkembang cukup baik, sampai dengan masih terbatasnya jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Pringsewu yang mengindikasikan belum menariknya daerah ini untuk investasi usaha serta masih rendahnya kontribusi koperasi dalam memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat khususnya usaha kecil dan menengah.

1.3 Tujuan dan Sasaran

Maksud dilaksanakannya pekerjaan ini adalah tersusunnya Dokumen Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pringsewu. Road Map ini diharapkan menjadi instrument yang menata, mengarahkan, mengintegrasikan, dan memfokuskan berbagai upaya terkait riset, penelitian, kajian, pembelajaran, knowledge management, penerapan teknologi dan lain-lain untuk dapat menciptakan skenario, strategi, program, dan aksi yang menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kapasitas dari pemerintah daerah dan unsur-unsur di bawahnya dalam mengakselerasi pembangunan di Kabupaten Pringsewu. Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a. Mengkaji gambaran umum daerah dan kondisi inovasi di Kabupaten Pringsewu saat ini
- b. Melaksanakan analisis permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang dari penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
- c. Merumuskan kondisi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang akan dicapai (benchmarking) berdasarkan potensi dan produk unggulan daerah Kabupaten Pringsewu
- d. Merumuskan arah kebijakan strategi penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) termasuk tujuan dan sasaran penguatannya
- e. Merumuskan indikator kinerja Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
- f. Merumuskan fokus program dan kegiatan prioritas Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
- g. Merumuskan rencana aksi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pringsewu

Adapun tujuan di atas dapat dicapai melalui pemenuhan sasaran-sasaran sebagai berikut:

- a. Teridentifikasinya kondisi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pringsewu saat ini.
- b. Teridentifikasinya tantangan dan peluang SIDA

-
- c. Terumusnya Kondisi SIDA yang akan dicapai
 - d. Terumusnya arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA
 - e. Terumusnya indikator kinerja, fokus program dan kegiatan prioritas dalam pengembangan SIDA di Kabupaten Pringsewu
 - f. Tersusunnya Rencana Aksi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pringsewu

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dalam kegiatan Penyusunan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) adalah Kabupaten Pringsewu yang terdiri dari 9 (Sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Padasuka, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pagelaran Utara, Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Banyumas dan Kecamatan Adiluwih.

1.4.2 Ruang Lingkup Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan konsultasi Penyusunan Dokumen Road Map Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dilaksanakan dengan tatacara utama sebagai berikut:

1. Pembaharuan data dan informasi, dan identifikasi permasalahan dan isu strategis pembangunan di Kabupaten Pringsewu yang relevan dengan pengembangan inovasi
2. Identifikasi kesesuaian dukungan kelembagaan dan regulasi terkait pengembangan inovasi
3. Analisis potensi ekonomi unggulan sebagai bahan utama untuk tema inovasi daerah
4. Analisis potensi dan hambatan dukungan dari aspek sosial, lingkungan dan tata kelola terhadap inovasi daerah
5. Penjabaran kondisi dan target pencapaian masing-masing sektor
6. Visi dan misi serta strategi inovasi dan penyiapan draft rencana aksi inovasi daerah

1.5 Dasar Hukum

Pelaksanaan kegiatan konsultasi Penyusunan Dokumen Road Map Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dilaksanakan dengan berlandaskan pada ketentuan hukum dan prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. **Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002** tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004** tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. **Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011** tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- e. **Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017** tentang Inovasi Daerah;
- f. **Keputusan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012** Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA);
- g. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016** tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- h. **Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 29 Tahun 2014** tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan di dalam Dokumen Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut.

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, permasalahan, tujuan dan sasaran, ruang lingkup wilayah, ruang lingkup kegiatan, dasar hukum, pendekatan pelaksanaan kegiatan ini, serta sistematika pembahasan.

BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN

Bab ini berisikan berbagai review terhadap peraturan dan kebijakan serta dokumen perencanaan yang memberikan panduan, batasan, dan penjelasan terhadap Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

BAB 3 GAMBARAN UMUM WILAYAH

Bab ini berisikan gambaran umum daerah, isu-isu strategis yang dipertimbangkan dalam perumusan inovasi, pencapaian inovasi pada saat ini, serta pemetaan kapasitas daerah;

BAB 4 METODE PENYUSUNAN

Bab ini berisikan penjelasan terkait dengan metode yang digunakan dalam proses penyusunan laporan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pringsewu.

BAB 5 POTENSI MASALAH DAN ISU STRATEGIS

Bab ini berisikan review terhadap berbagai permasalahan dan kaitannya dengan tantangan penyelenggaraan inovasi di daerah Kabupaten Pringsewu. Selain itu, bab ini juga menjabarkan beberapa isu strategis dari berbagai masalah yang sudah dijabarkan.

BAB 6 RENCANA KERJA

Bab ini berisikan struktur organisasi pelaksana, alur kerja dan kerangka berpikir substansi pelaksanaan pekerjaan, jadwal dan mekanisme interaksi kerja antara tim penyusun dengan tim supervisi.

BAB II

TINJAUAN KEBIJAKAN

2.1 Kebijakan Sisten Inovasi Daerah

2.1.1 Undang-undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip: a. peningkatan efisiensi; b. perbaikan efektivitas; c. perbaikan kualitas pelayanan; d. tidak ada konflik kepentingan; e. berorientasi kepada kepentingan umum; f. dilakukan secara terbuka; g. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Pemerintah Pusat akan memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan inovasi dan Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang melakukan inovasi.

2.1.2 Peraturan Pmerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah

PP No. 38/2017 menyebutkan bahwa inovasi sebagai kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan peneraoan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Adapun sistem inovasi daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antarinstitusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah. Ruang lingkuppenguatan SIDA meliputi

- a. Kebijakan penguatan SIDA;
- b. Penataan unsur SIDA; dan
- c. Pengembangan SIDA.

Kebijakan penguatan SIDA tercantum dalam

- a. Roadmap penguatan SIDA;
- b. RPJMD; dan
- c. RKPD.

Roadmap penguatan SIDA memuat

- a. kondisi SIDA saat ini;
- b. tantangan dan peluang SIDA;
- c. kondisi SIDA yang akan dicapai;
- d. arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA;
- e. fokus dan program prioritas SIDA; dan
- f. rencana aksi penguatan SIDA.

Unsur SIDA meliputi

- a. Kelembagaan SIDA;
- b. Jaringan SIDA; dan
- c. Sumber daya SIDA.

Pengembangan SIDA meliputi kegiatan

- a. Pembangunan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah;
- b. Pemetaan potensi dan analisis SIDA; dan
- c. Pemberlanjutan penguatan SIDA. Pembangunan komitmen dan konsensus

unsur-unsur SIDA di daerah dilakukan melalui sosialisasi, fasilitasi, dan alokasi sumber daya.

Pemetaan potensi dan analisis SIDA dilakukan melalui

- a. identifikasi dan pengumpulan data;
- b. pemetaan; dan
- c. analisis faktor kebijakan, unsur SIDA, program dan kegiatan. Pemberlanjutan penguatan SIDA dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.

A. Kelembagaan SIDA

Kelembagaan SIDA terdiri atas

- a. lembaga/organisasi;
- b. peraturan; dan
- c. norma/etika/budaya.

Penataan terhadap peraturan dilakukan dengan cara membuat peraturan baru, merubah peraturan, dan mencabut peraturan terkait SIDA. Penataan terhadap norma/etika/budaya dilakukan dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasikan nilai-nilai sosial bagi penguatan SIDA. Sedangkan, penataan terhadap lembaga/organisasi meliputi:

1. Penataan institusi pemerintah dilakukan dengan cara mensinergikan program dan kegiatan kementerian dan lembaga dalam penguatan SIDA dengan membentuk BPPD; dan meningkatkan kapasitas dan peran BPPD sebagai koordinator dalam penguatan SIDA;
2. Penataan lembaga kelitbangan dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas dan peran ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Penataan lembaga pendidikan dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan kelitbangan di lingkungan lembaga pendidikan sesuai kebutuhan daerah.
4. Penataan lembaga penunjang inovasi dilakukan dengan cara mensinergikan program dan kegiatan semua lembaga yang dapat menunjang penguatan SIDA.
5. Penataan dunia usaha dilakukan dengan memanfaatkan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis; dan meningkatkan kemitraan dengan lembaga/organisasi SIDA.
6. Penataan organisasi kemasyarakatan di daerah dilakukan dengan cara memberdayakan organisasi kemasyarakatan dan mensinergikan dengan penguatan SIDA.

B. Jaringan SIDA

Jaringan SIDA merupakan interaksi antar lembaga/organisasi dalam SIDA. Penataan jaringan SIDA dilakukan melalui

- a. komunikasi intensif antara lembaga SIDA;
- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
- c. optimalisasi pendayagunaan HKI, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Komunikasi intensif dilakukan melalui:

- a. penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenisnya;
- b. menjalin kerjasama kelitbangan antar lembaga/organisasi SIDA; dan

-
- c. forum komunikasi penelitian dan pengembangan daerah.

Mobilisasi sumber daya manusia dilakukan melalui:

- a. kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- b. kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA antardaerah; dan
- c. kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
- d. kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA antara lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintah

Optimalisasi pendayagunaan HKI, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan HKI;
- b. pemanfaatan informasi SIDA; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana SIDA.

C. Sumber Daya SIDA

Sumber daya SIDA terdiri dari (a.) kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan manusia dan pengorganisasiannya; (b.) kekayaan intelektual dan informasi; dan (c.) sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi. Penataan sumber daya SIDA meliputi:

- a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifik sumber daya SIDA;
- b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
- c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karir;
- d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
- e. pemanfaatan data dan informasi; dan
- f. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.1.3 Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 03 Tahun 2012 dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No. 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Permen No. 03/2012 dan No 36/2012 menyebutkan bahwa Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui (a.) peningkatan Pelayanan Publik; (b.) pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan (c.) peningkatan daya saing Daerah. Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Inovasi Daerah berbentuk (a.) inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; (b.) inovasi Pelayanan Publik; dan/atau (c.) Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen. Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik. Inovasi Daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

Keputusan kepala Daerah mengenai Inovasi Daerah memuat:

- a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
- b. bentuk Inovasi Daerah;
- c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
- d. tujuan Inovasi Daerah;
- e. manfaat yang diperoleh;
- f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
- g. anggaran, jika diperlukan.

2.2 Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pringsewu

2.2.1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

Pembangunan wilayah Sumatera tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, dan sekaligus memantapkan hilirisasi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. Prioritas pembangunan Wilayah Sumatera tahun 2020-2024 akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

Kabupaten Pringsewu termasuk dalam wilayah pengembangan desa terpadu dengan program-program:

1. Desa Digital P3PD (Program Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Professional)
2. Penetapan batas desa
3. Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat
4. BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa

-
5. Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional
 6. Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD)

2.2.2 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No. 02 Tahun 2012 Tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2031

Tujuan penataan ruang di wilayah Kabupaten Pringsewu adalah untuk mewujudkan Kabupaten Pringsewu sebagai pusat pendidikan, pusat perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan dengan di dukung oleh sumber daya manusia yang cerdas dan kompetitif, dalam rangka menciptakan masyarakat yang sejahtera. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditetapkan kebijakan pengembangan struktur ruang dan pengembangan pola ruang.

1. Kebijakan pengembangan struktur ruang.
 - a. Pengembangan pusat kegiatan wilayah promosi (PKWp) di Pringsewu, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan regional, pelayanan kesehatan, pusat pelayanan pendidikan, pusat pengembangan pariwisata dan budaya, pusat perdagangan dan jasa, pusat koleksi dan distribusi, dan simpul transportasi.
 - b. Pengembangan pusat kegiatan lokal promosi (PKLp) di kawasan gadingrejo yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, agropolitan, peternakan, perikanan, dan pengembangan pendidikan skala regional; di kawasan Sukoharjo yang berfungsi sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa, pusat pengembangan pemukiman, pusat pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, pengembangan peternakan dan industri kecil; dan kawasan perkotaan Pagelaran yang berfungsi sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa, pusat pengembangan hasil pertanian, perkebunan, minapolitan, dan pengembangan kegiatan pertambangan.
 - c. Pengembangan pusat pelayanan kawasan (PPK) di kawasan perkotaan Ambarawa yang berfungsi sebagai pusat pengembangan pertanian tanaman pangan, pengembangan perikanan air tawar, pengembangan permukiman, dan pusat pemasaran produk unggulan; di kawasan perkotaan Banyumas yang berfungsi sebagai pengembangan pertanian hortikultura, pengembangan industri rumah tangga, dan pengembangan kegiatan pertambangan.

-
- d. Pengembangan pelayanan lingkungan (PPL) di kawasan Adiluwih yang berfungsi sebagai pengembangan tanaman pangan dan hortikultura, pengembangan tanaman perkebunan, dan industri kecil; di kawasan Pardasuka yang berfungsi sebagai pengembangan tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan, pengembangan kawasan pariwisata dan budaya serta kawasan hutan lindung.

2. Kebijakan pengembangan pola ruang.

Kebijakan pengembangan pola ruang di Kabupaten Pringsewu, mencakup pola ruang kawasan lindung dan pola kawasan budidaya. Pola ruang kawasan lindung mencakup kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, dan kawasan rawan bencana. Sedangkan pola kawasan budidaya mencakup kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya. Adapun kebijakan pengembangan pola ruang tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan melestarikan hutan lindung register 21 dan register 22 melalui reboisasi lahan kritis, rehabilitasi kawasan hutan lindung, pengawasan dan pengamanan hutan lindung, serta penegakan hukum terhadap pembalakan liar serta penanganan preventif.
- b. Kebijakan pengembangan kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai, sempadan mata air, sempadan irigasi) melalui penertiban bangunan pemukiman, normalisasi dan rehabilitasi, mengembangkan prasarana pendukung, kelestarian fungsi lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.
- c. Kebijakan penanganan kawasan rawan bencana melalui pemetaan daerah rawan bencana, rehabilitasi, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, dan pengendalian lingkungan hidup.
- d. Strategi pengembangan kawasan lindung adalah (1) menjaga dan mengembalikan fungsi kawasan lindung dari dampak kerusakan lingkungan; (2) menyediakan RTH kota minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota; (3) membatasi perkembangan dan memulihkan secara bertahap kawasan lindung yang telah berubah fungsi dan/atau menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya; (4) membatasi pemanfaatan dan

mencegah pencemaran air tanah bagi kegiatan industri kreatif, perdagangan dan kegiatan budidaya lainnya; (5) merevitalisasi kawasan cagar budaya sebagai pusat kegiatan pariwisata, sejarah, budaya, dan ilmu pengetahuan; dan (6) mencegah pengembangan prasarana di sekitar kawasan lindung dalam rangka menghindari tumbuhnya kegiatan budidaya yang dapat mendorong alih fungsi lindung menjadi budidaya.

- e. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya yang meliputi; (1) mengembangkan kegiatan budidaya yang tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sesuai potensi dan karakteristik kawasan sehingga mempunyai daya saing kompetitif dan komparatif berskala regional, nasional, dan internasional; (2) mengembangkan kegiatan industri kreatif di dalam kawasan beserta infrastruktur secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah; dan (3) mengembangkan sarana kegiatan budidaya untuk menunjang sosial budaya, pariwisata, ekonomi, olah raga dan ilmu pengetahuan serta teknologi.

2.2.3 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No. 03 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pringsewu 2005-2025

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2005-2025, telah ditetapkan Visi Pringsewu Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan, yang akan dijadikan rujukan utama dalam penyusunan RPJMD. Tahapan dan prioritas pembangunan, dirumuskan dengan mengkaitkan antara misi pembangunan jangka panjang daerah dengan arah pembangunan daerah sehingga menjadi skala prioritas pembangunan daerah berdimensi lima tahunan. Kabupaten Pringsewu sebagai daerah otonomi baru yang dibentuk pada tahun 2008, maka pentahapan RPJMD hanya sebanyak tiga tahap, yaitu RPJMD tahap pertama (2011-2016), RPJMD tahap kedua (2017-2022) dan RPJMD tahap ketiga (2022-2027). Dengan demikian maka RPJMD Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022 merupakan pelaksanaan dokumen RPJPD tahap kedua.

Adapun prioritas pembangunan RPJPD tahap kedua pada setiap misi adalah :

- A. Membangun sarana dan prasarana wilayah serta utilitas dasar untuk mendukung

pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengembangan Rencana Tata Ruang dan penguatan penerapan Rencana Tata Ruang.
2. Penguatan manajemen perkotaan yang meliputi optimalisasi dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengamanan kawasan konservasi dengan penerapan dan penegakan hukum secara tegas dan adil.
3. Penguatan revitalisasi kawasan kota berupa penataan, peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial dan budaya dan penataan pelayanan fasilitas publik;
4. Penguatan penerapan pedoman tataran transportasi wilayah yang integral dan andal;
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan yang efektif, nyaman dan aman dan selamat sebagai sumber pergerakan orang, barang dan jasa serta untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif dan penghubung antar pusat-pusat permukiman dan pusat kegiatan;
6. Peningkatan kualitas simpul jaringan transportasi inter dan atau antar moda (terminal dan stasiun) yang terintegrasi dengan baik;
7. Penguatan pembangunan jalandan jembatan dengan efektif dan efisien sesuai dengan hierarki dan fungsinya;
8. Peningkatan jaringan jalan lingkar sebagai jalur alternatif jalur lintas untuk mengantisipasi kemacetan dalam kota.
9. Peningkatan luas layanan dan penguatan pengelolaan jaringan irigasi.
10. Peningkatan kualitas permukiman dan perumahan;
11. Peningkatan sistem pengelolaan sampah dan limbah yang terintegrasi dalam sistem pengelolaan yang terpadu dan ramah lingkungan;
12. Peningkatan kualitas layanan jaringan listrik;
13. Penguatan upaya pengelolaan sumber-sumber air yang lestari dan berkelanjutan dan pengembangan jangkauan penyaluran dan pelayanan air bersih kepada masyarakat;
14. Peningkatan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau dan ruang publik;
15. Penguatan pembangunan mitigasi bencana;
16. Peningkatan pemenuhan kebutuhan penerangan jalan umum secara merata;
17. Peningkatan jaringan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu;

-
18. Penguatan sarana dan prasarana niaga secara proporsional untuk membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan;
 19. Peningkatan pembangunan kantor pemerintah daerah.

B. Mengembangkan perekonomian daerah berbasis keunggulan sumber daya melalui tata kelola yang modern dan berwawasan lingkungan, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Penguatan peran Pringsewu sebagai daerah muka bagi kabupaten lain di sekitarnya yang di dukung dengan penguatan sektor perdagangan, jasa dan industri yang terintegrasi dengan sektor primer;
2. Penguatan daya saing sektor pertanian dan penguatan keterkaitan antar sektor;
3. Penguatan sumber daya, kerjasama, sarana dan prasarana perdagangan dan jasa yang di dukung oleh teknologi informasi dan komunikasi;
4. Pengembangan industri jasa ditekankan untuk mendukung pembangunan sektor primer, perdagangan dan pariwisata;
5. Penguatan pembangunan industri pengolahan sebagai pengolah hasil sektor primer yang buan hanya dari dalam Pringsewu, akan tetapi dari luar Pringsewu, sesuai dengan peran Pringsewu sebagai daerah muka bagi Kabupaten lain yang berdekatan;
6. Peningkatan jumlah penyedia jasa keuangan dan penguatan fungsi intermediasi lembaga keuangan;
7. Penguatan secara proporsional kebijakan anggaran terhadap sektor-sektor unggulan;
8. Penguatan kelembagaan perekonomian;
9. Penguatan akses masyarakat miskin terhadap kesempatan kerja dan pengembangan usaha;
10. Penguatan keberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sebagai lembaga ekonomi kerakyatan yang menerapkan sistem pengelolaan usaha secara efisien, produktif, dan berdaya saing, mandiri dan mampu sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya melalui iklim usaha yang kondusif dan keunggulan kompetitif;
11. Peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat;

-
12. Peningkatan kapasitas pasar di tiap-tiap kecamatan menjadi pusat perdagangan dan jasa (business district) dalam suatu sistem wilayah perencanaan yang strategis;
 13. Penguatan perluasan kesempatan kerja, kualitas, produktivitas tenaga kerja, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja;
 14. Peningkatan semangat kewirausahaan masyarakat dan kapasitas usaha masyarakat yang sudah ada;
 15. Peningkatan daya serap investasi melalui peningkatan iklim untuk investasi dan promosi investasi;
 16. Peningkatan peran serta organisasi dan lembaga masyarakat adat/lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup dan SDA;
 17. Penguatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 18. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 19. Pengembangan pengelolaan sumberdaya hutan secara optimal yang berwawasan lingkungan;
 20. Pengembangan pengelolaan pertambangan dengan optimalisasi nilai tambah dan berwawasan lingkungan;
 21. Penguatan pemanfaatan dan pengelolaan energi yang ramah lingkungan.

C. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas, bermoral tinggi dan berkompetensi, dengan prioritas pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Penguatan pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang di dukung dengan pengembangan dan penataan sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil secara terpadu;
2. Penguatan pembangunan keluarga berencana penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi, kesehatan reproduksi remaja, penanggulangan narkoba, Pra Men Struasi serta pengembangan peran serta masyarakat guna mewujudkan KB mandiri;

-
3. Meningkatkan kesejahteraan dan Kemampuan guru; meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan kuantitas dan pemerataan sekolah, jaminan pendidikan bagi masyarakat miskin, dan penguatan kesadaran terhadap pentingnya pendidikan untuk meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas manusia, sehingga mampu bersaing dalam era global;
 4. Peningkatan keunggulan kompetitif dalam rangka penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu dan teknologi yang berdaya saing, diselenggarakan secara berkelanjutan di dukung oleh penyediaan informasi pendidikan yang akurat dan tepat waktu;
 5. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan;
 6. Pembangunan kualitas, kapasitas dan kapabilitas lembaga pendidikan kearah skala nasional;
 7. Penguatan difusi Iptek dalam keseluruhan aktivitas bisnis dan non bisnis untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah melalui penguatan penguasaan dan penerapan teknologi secara luas dalam sistem produksi, pengembangan lembaga penelitian, peningkatan penerapan standard mutu serta peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana teknologi;
 8. Penguatan budaya baca dan berinovasi di kalangan masyarakat;
 9. Penguatan sistem informasi manajemen daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
 10. Penguatan daya dukung teknologi informasi komunikasi, sebagai pendorong perekonomian masyarakat;
 11. Peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan dan penguatan akses masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 12. Penguatan peran serta swasta dan masyarakat dalam rangka pembangunan kesehatan, khususnya dalam pengembangan pelayanan medis dan meningkatkan distribusi dan pemanfaatan obat yang bermutu, efektif dan aman bagi penduduk dengan harga yang terjangkau;
 13. Penguatan kecukupan pangan dan status gizi masyarakat miskin terutama ibu, bayi dan anak balita;
 14. Peningkatan sistem jaminan kesehatan masyarakat;
 15. Peningkatan penerapan dan pengendalian Standard Pelayanan Minimal(SPM) bidang kesehatan;

-
16. Penguatan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan penyakit menular, lingkungan sehat, kelangsungan dan perkembangan anak, KB, gizi dan kesehatan reproduksi;
 17. Penguatan peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan terutama pemberdayaan perempuan dan keluarga, revitalisasi Posyandi dan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) lainnya;
 18. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender;
 19. Peningkatan kapasitas perangkat hukum untuk melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi;
 20. Penguatan kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi kebijakan pemerintah;
 21. Penguatan kualitas pemuda dan partisipasi pemuda dalam pembangunan;
 22. Penguatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat.

D. Membangun kehidupan masyarakat yang tenteram, harmonis, beragama dan berbudaya, dengan prioritas pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Penguatan penegakan supremasi hukum dan profesionalisme aparat penegak hukum;
2. Penguatan daya cipta lingkungan yang aman dan tertib serta antisipatif untuk mencegah munculnya gangguan yang menyebabkan terjadinya kerawanan sosial maupun bencana yang melibatkan partisipasi aktif segenap komponen masyarakat;
3. Peningkatan pemahaman dan persamaan persepsi serta kesadaran hukum dalam rangka membentuk budaya hukum dan penghargaan terhadap hak asasi manusia serta mendorong penegakan dan ketaatan terhadap hukum;
4. Peningkatan kondisi masyarakat yang bermoral dan beretika sehingga akan mendorong terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis;
5. Penguatan kesadaran akan budaya luhur yang dimiliki akan memberikan arah bagi perwujudan identitas yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya dan menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kehidupan;

-
6. Penguatan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan;
 7. Penguatan kerukunan hidup umat beragama dengan cara meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat;
 8. Penguatan daya dukung sarana peribadatan secara proporsional;
 9. Penguatan kebudayaan sehingga mampu menjadi filter bago pengaruh negatif budaya global, dan mengadopsi budaya positif produktif;
 10. Penguatan pengelolaan aset budaya agar dapat berfungsi sebagai sarana edukasi, rekreasi dan pengembangan kebudayaan secara optimal dan berkelanjutan;
 11. Penguatan pengelolaan keragaman budaya yang komprehensif sistimatis dan berkelanjutan diarahkan untuk memperkokoh integrasi bangsa dan toleransi antar etni di Kabupaten Pringsewu.

E. Mewujudkan tatakelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan (good governance, clean governance and sustainable), dengan prioritas pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Penguatan kapasitas sistem pemerintah daerah;
2. Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah;
3. Penguatan kapasitas individu aparatur pemerintah daerah;
4. Peningkatan penerapan kinerja pelayanan publik yang berorientasi kepuasan masyarakat dan semakin mendekatkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
5. Peningkatan kualitas penerapan Standard Pelayanan Minimal;
6. Penguatan sistem informasi manajemen daerah untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan;
7. Peningkatan intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi pelayanan terhadap masyarakat;
8. Penguatan kapasitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
9. Pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, ekonomis, efisien dan efektif;

-
10. Penguatan kualitas pengelolaan keuangan pekon;
 11. Penguatan partisipasi aktif masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan maupun dalam menjaga keamanan pembangunan, dan mengurangi gangguan keamanan dan ketertiban serta menghapuskan potensi konflik sosial;
 12. Penguatan fungsi ruang partisipasi publik bagi masyarakat dalam keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pelayanan publik;
 13. Penguatan keterbukaan komunikasi dan informasi;
 14. Penguatan budaya politik santun, penguatan wawasan kebangsaan, penguatan peran dan fungsi infrastruktur maupun suprastruktur politik, penguatan pola seleksi dan pergantian kepemimpinan politik lokal secara regulatif, serta penguatan keserasian hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat;
 15. Penguatan kapasitas kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, melaksanakan reformasi struktur politik dan nilai-nilai persamaan, anti kekerasan dan nilai-nilai toleransi;
 16. Penguatan kapasitas kelembagaan penegakan hukum dan tata peraturan daerah sebagai instrumen penguatan hukum di daerah yang di dukung dengan partisipasi masyarakat;
 17. Peningkatan kualitas program legislasi daerah yang berkeadilan dan berprespektif gender dan penerapannya;
 18. Penguatan fungsi kelembagaan lokal dan keswadayaan masyarakat dalam bidang perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana.

2.2.4 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No. 11 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022

Visi RPJMD Kabupaten Pringsewu tahun 2017-2022 merupakan penjabaran tahun kedua pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pringsewu tahun 2005-2025. Berdasarkan arahan RPJPD Kabupaten Pringsewu, capaian RPJMD Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2016, dan mengacu pada RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019 serta RPJMN Tahun 2015-2019 dan memperhatikan isu-isu strategis, maka visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2017-2022 adalah PRINGSEWU BERDAYA SAING, HARMONIS DAN SEJAHTERA (BERSAHAJA).

Dalam rangka upaya untuk mewujudkan Visi Pringsewu Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera (BERSAHAJA) maka misi Pembangunan Kabupaten Pringsewu lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Publik dan Permukiman Secara Merata.
Pembangunan infrastruktur perannya sangat sentral dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Terutama infrastruktur yang memiliki kualitas tinggi, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkarakter.
Salah satu variabel yang sangat menentukan tercapainya upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah luasnya jangkauan akses pelayanan dasar yang didukung infrastruktur yang memadai. Ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi prasyarat terwujudnya proses pembangunan SDM yang unggul dan berkarakter.
3. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Masyarakat.
Kabupaten Pringsewu ditahbiskan sebagai lumbung pangan Provinsi Lampung, Namun perkembangan daerah yang pesat menjadikan Kabupaten Pringsewu sebagai daerah transit dan sekaligus penyangga. Karena itu sektor perdagangan, jasa dan industri kecil dan menengah perlu dikelola secara baik sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
4. Memperkuat Kualitas Ketahanan Pangan dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
Sebagai daerah yang berbasis tanaman pangan dengan pembangunan yang cepat, memerlukan tindakan yang bijaksana untuk tetap mempertahankan lahan-lahan produktif, mengoptimalkan produksi dan produktivitas sektor pertanian, serta memberdayakan masyarakat yang bersinergi dengan pemerintah.
5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Ketenteraman Masyarakat.
Pelayanan publik menjadi fokus dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga Indeks Kepuasan Masyarakat akan meningkat. Dibutuhkan kinerja aparatur yang profesional dengan penataan kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien. Prinsip good and clean governance harus menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan, yang di dukung dengan kehidupan masyarakat yang harmonis.

Tujuan atau kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dari Pembangunan Kabupaten Pringsewu selama 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur publik dan permukiman.
- b. Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat, religius, dan berbudaya.
- c. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian masyarakat.
- d. Terwujudnya kualitas ketahanan pangan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- e. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan ketenteraman masyarakat.

Dalam rangka untuk mewujudkan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan Pembangunan Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022, maka ditetapkan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten.
- 2) Tersedianya jaringan jalan, jembatan, sarana pemerintahan dan infrastruktur publik yang merata dan berkualitas.
- 3) Terciptanya penataan infrastruktur kawasan pemukiman dan perumahan yang berkualitas.
- 4) Terciptanya sistem transportasi yang terintegrasi dan nyaman.
- 5) Meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas dan berkarakter bagi semua lapisan masyarakat secara merata.
- 6) Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.
- 7) Meningkatnya pelayanan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial.
- 8) Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan anak dan pengendalian penduduk.
- 9) Meningkatnya kapasitas pemuda, prestasi olahraga dan pelestarian seni serta budaya.
- 10) Berkembangnya sarana dan prasarana perekonomian masyarakat pada pusat pertumbuhan primer, skunder dan tersier.
- 11) Meningkatnya investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
- 12) Meningkatnya daya saing pariwisata.
- 13) Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat.
- 14) Meningkatnya produksi dan produktifitas hasil pertanian dan peternakan
- 15) Terwujudnya ketahanan pangan yang berkualitas.
- 16) Meningkatnya produksi perikanan secara berkualitas.

-
- 17) Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
 - 18) Meningkatnya kualitas pelayanan publik secara prima.
 - 19) Terwujudnya sistem informasi dan komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
 - 20) Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - 21) Terintegrasinya sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan secara berkualitas.
 - 22) Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis, tertib dan aman.

2.2.5 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020

Prioritas dan Sasaran Daerah Serta Arah Kebijakan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2020:

1. Peningkatan Infrastruktur Publik dan Permukiman
 - a. Meningkatnya jaringan jalan, jembatan, sarana pemerintahan dan infrastruktur publik yang merata dan berkualitas oleh Dinas PUPR
 - b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten oleh Dinas PUPR, Bappeda, Dinas PMPTS
 - c. Sistem Transportasi yang terintegrasi dan nyaman oleh Dinas Perhubungan
 - d. Penataan infrastruktur kawasan pemukiman dan perumahan yang berkualitas oleh Dinas PUPR
2. Pembangunan SDM yang Cerdas, Sehat, Religius dan Berbudaya
 - a. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan Dasar oleh Dinas pendidikan, Dinas Perpustakaan
 - b. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat serta pencegahan dan penanganan covid19 oleh Dinas Kesehatan
 - c. Kesetaraan gender, perlindungan anak dan pengendalian penduduk oleh Dinas PP, PA, PP &KB
 - d. Meningkatnya Kapasitas pemuda, prestasi olahraga dan pelestarian seni serta budaya oleh Dinas PP, PA, PP & KB, Disporapar, Dinas Pendidikan
3. Peningkatan dan Pemerataan Perekonomian Guna Mendorong Daya Saing Daerah dan Pengentasan Kemiskinan
 - a. Meningkatnya Investasi daerah dan perindustrian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah oleh Dinas PMPTSP, Diskoperindag

-
- b. Daya saing pariwisata oleh Dinas Diporapar
 - c. Berkembangnya Sarana dan prasarana perekonomian masyarakat oleh Dinas PMP, Diskoperindag
 - d. Meningkatnya Pelayanan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial oleh Dinas Sosial
 - e. Meningkatnya Kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat oleh Disnakertrans, Dinas PMP
 - f. Meningkatnya daya saing produksi pertanian dan peternakan untuk memperkuat swasembada pangan oleh Dinas Pertanian
 - g. Ketahanan pangan yang berkualitas oleh Dinas Ketahanan Pangan
 - h. Meningkatnya produksi perikanan secara berkualitas oleh Dinas Perikanan
4. Lingkungan Hidup yang berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
 - a. Kualitas pengelolaan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup
 - b. Mitigas bencana oleh BPBD
 5. Tata Kelola Pemerintahan dan Ketentraman
 - a. Sistem informasi dan komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat oleh Diskominfo
 - b. Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh dinas PMP, BPKAD, Bappeda, Sekretariat Daerah, Inspektorat
 - c. Terintegrasinya sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan secara berkualitas oleh Bappeda, Sekretariat Daerah, BPKAD
 - d. Masyarakat yang harmonis, tertib dan aman oleh Sekretariat Daerah, Kesbangpol, Sat. pol. PP

Fokus rencana kebijakan perekonomian yang akan dituangkan dalam perubahan RKPD adalah:

1. Pemulihan dampak ekonomi pasca covid19 dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya pertanian, perdagangan dan jasa, industri pengolahan, dengan berbasis pada pelaku usaha kecil, menengah dan koperasi, yang pada pelaku usaha kecil, yang bergerak pada sektor potensial antara lain meningkatkan dan memperkuat UMKM dan koperasi yang menyangkut aspek permodalan, keterampilan, diversifikasi aktivitas ekonomi

untuk pemulihan terdampak covid19, dan akses terhadap pasar, mengembangkan usaha berbasis sumberdaya lokal, mengembangkan objek wisata dan usaha jasa kepariwisataan, mengembangkan sector jasa, industry dan perdagangan dengan mengutamakan pelaku usaha yang melibatkan masyarakat, mengembangkan dan meningkatkan produksi pertanian.

2. Meningkatkan sumberdaya manusia yang mampu bersaing, mandiri, menguasai perkembangan IPTEK dan memegang teguh IMTAQ.
3. Peningkatan dan pengembangan produk dan produktivitas pertanian dan perikanan yang berorientasi pada sistem agrobisnis guna mempertahankan swasembada dan ketahanan dan menjadi bagian dari strategi pengembangan ekonomi masyarakat dalam pemulihan ekonomi pasca covid19.
4. Peningkatan kualitas dan diversifikasi produk, pemanfaatan teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung pengolahan hasil pertanian, perindustrian, perdagangan dan pariwisata.
5. Tersusunnya peraturan/regulasi yang dapat mendukung pemberdayaan masyarakat.

BAB III

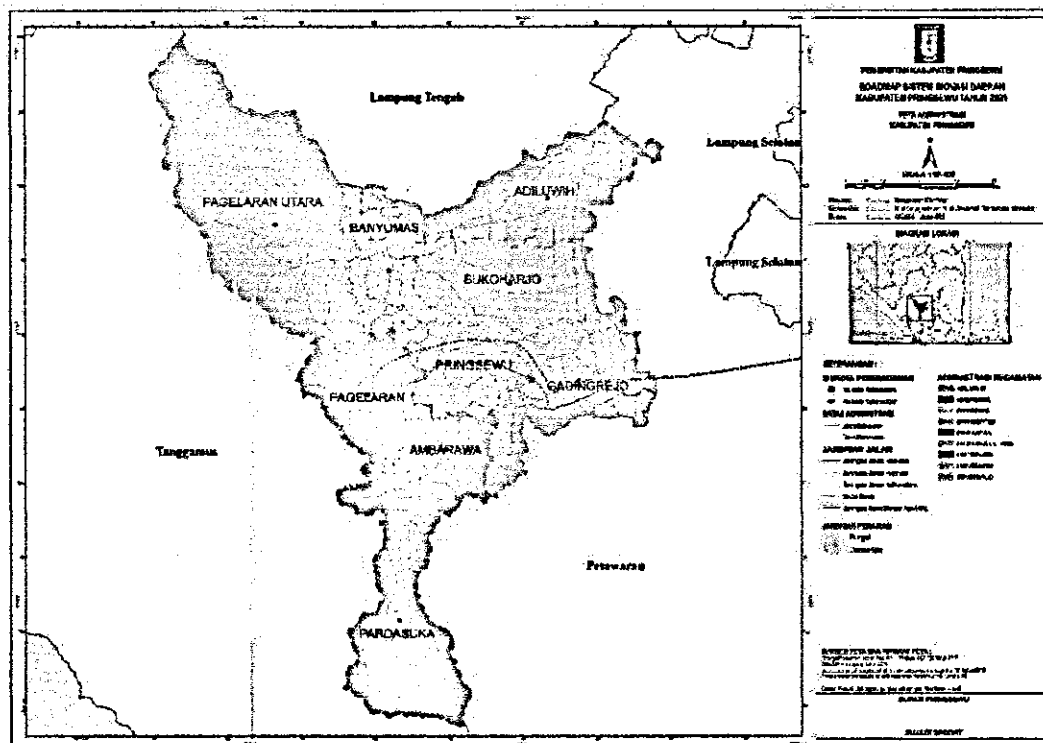
GAMBARAN UMUM WILAYAH

3.1 Karakteristik Wilayah Kabupaten Pringsewu

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang beribukota di Pringsewu. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 625 km² yang secara geografis terletak diantara 04^o45'25"-105^o8'42" Bujur Timur (BT) dan 5^o8'10"-5^o34'27" Lintang Selatan (LS). Mengingat letak yang demikian ini, daerah Kabupaten Lampung Selatan seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia merupakan daerah tropis. Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tanggamus, dan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 48 tahun 2008 tanggal 26 November 2008 dan diresmikan pada tanggal 3 April 2009 oleh Menteri Dalam Negeri.

Secara administratif Kabupaten Pringsewu berbatasan dengan 3 (tiga) wilayah kabupaten sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sendang Agung dan Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Sebelah Timur berbatasan Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Gedongtataan, Kecamatan Waylima dan Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bulok dan Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pugung dan Kecamatan Air Nanningan, Kabupaten Tanggamus.



Sumber : Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2021

Gambar 3. 1 Peta Administrasi Kabupaten Pringsewu

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu dari daerah Tingkat II yang ada di Provinsi Lampung. Secara administratif Kabupaten Pringsewu terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan dan selanjutnya terdiri dari desa-desa dan kelurahan sebanyak 131 desa/kelurahan (126 desa dan 5 kelurahan). Kecamatan-kecamatan tersebut antara lain, yaitu:

Kabupaten Pringsewu terdiri dari 9 (sembilan) wilayah kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Pardasuka
2. Kecamatan Ambarawa
3. Kecamatan Pagelaran
4. Kecamatan Pagelaran Utara
5. Kecamatan Pringsewu
6. Kecamatan Gading Rejo
7. Kecamatan Sukoharjo
8. Kecamatan Banyumas
9. Kecamatan Adiluwih

Berikut merupakan rincian luasan dari tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Pringsewu dan persentasenya terhadap luas kabupaten.

Tabel 3. 1 Luas Lahan Kecamatan di Kabupaten Pringsewu

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase
1	Pagelaran Utara	100,28	16,04%
2	Pardasuka	94,64	15,14%
3	Gadingrejo	85,71	13,71%
4	Adiluwih	74,82	11,97%
5	Sukoharjo	72,95	11,67%
6	Pagelaran	72,47	11,60%
7	Pringsewu	53,29	8,53%
8	Banyumas	39,85	6,38%
9	Ambarawa	30,99	4,96%
Total		625	100,00%

Sumber : BPS Pringsewu, 2021

Sebagian besar wilayah di Kabupaten Pringsewu memiliki ketinggian daratan 0-400 m di atas permukaan laut yang didominasi dengan ketinggian 100-200m di atas permukaan laut. Bentuk dan ketinggian permukaan akan menentukan banyak aspek pendukung dari suatu lahan seperti pasokan air dan juga keterjangkauan. Sebuah lahan memerlukan pasokan air yang cukup baik dari sungai maupun tanah.

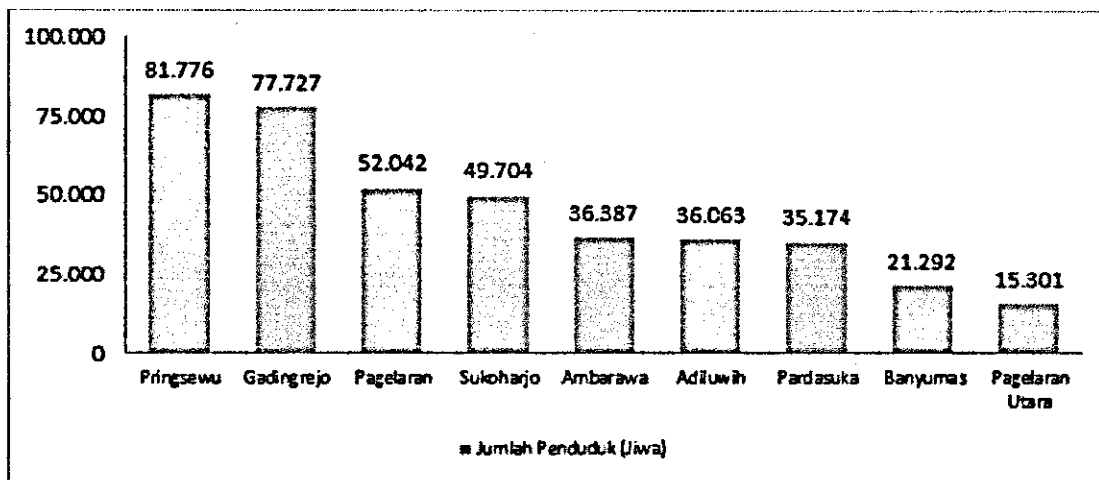
Kemiringan lereng, panjang lereng dan bentuk lereng akan mempengaruhi besarnya erosi dan aliran permukaan. Kemiringan lereng merupakan variable yang sangat berpengaruh pada produktivitas di suatu wilayah. Sebagian besar kemiringan lereng di Kabupaten Pringsewu didominasi oleh kemiringan lereng 0-8% hingga 40%, sehingga pembangunan kawasan cenderung mengikuti relief tanah yang datar dengan tingkat kemiringan yang datar dan tidak curam. Kabupaten Pringsewu berada di 0 meter di atas permukaan laut dan terdapat 8 sungai besar yang mengalir didalamnya dengan iklim tropis. Kondisi iklim tersebut dapat dilihat dari tingkat curah hujan. Diketahui curah hujan pada Kabupaten Pringsewu cukup tinggi yakni sekitar 1942 mm/per tahun dan jumlah hari hujan sebanyak 13 hari/bulan.

3.2 Kondisi Sosial dan Kependudukan

Dalam pengembangan kawasan berinovasi tidak lepas dari keterkaitan dengan masalah sosial kependudukan. Salah satu tujuan adanya kawasan inovasi adalah untuk meningkatkan peluang usaha, penyerapan tenaga kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah. Dengan adanya

kawasan inovasi pada Kabupaten Pringsewu, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.

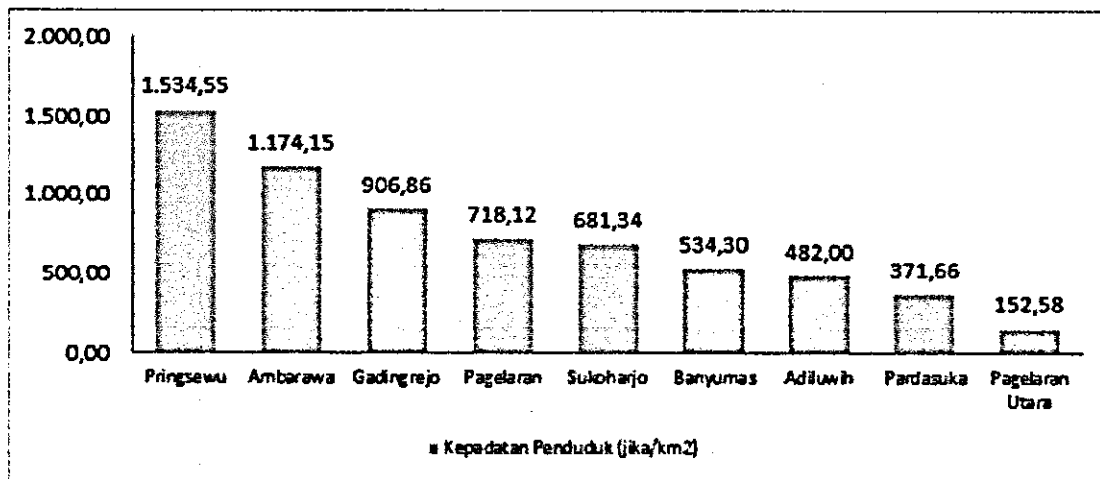
Kabupaten Pringsewu memiliki jumlah penduduk sebesar 405.466 jiwa pada tahun 2020. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Pringsewu dengan jumlah 81.745 jiwa atau 20,21% dari total jumlah penduduknya, sementara kecamatan yang memiliki populasi terendah ialah Kecamatan Pagelaran Utara yang berjumlah 15.446 jiwa atau 3,82% dari total jumlah penduduknya. Berikut merupakan grafik rincian jumlah populasi dari tiap kecamatan di Kabupaten Pringsewu.



Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu, 2021

Gambar 3. 2 Grafik Jumlah Penduduk di Kabupaten Pringsewu

Selain jumlah penduduk, kami juga menganalisa terkait kepadatan penduduknya dari tiap kecamatan, didapatkan bahwa Kecamatan Pringsewu selain memiliki jumlah penduduk yang tertinggi juga memiliki kepadatan penduduk tertinggi dengan angka 1535 jiwa/km², sementara kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah ialah Kecamatan Pagelaran Utara dengan angka 153 jiwa/km². Berikut merupakan grafik rincian kepadatan penduduk dari tiap kecamatan di Kabupaten Pringsewu.



Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu, 2021

Gambar 3. 3 Grafik Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pringsewu

Lalu kami juga menganalisa laju pertumbuhan penduduk dari beberapa tahun terakhir di tiap kecamatan. Didapatkan bahwa Kecamatan Pagelaran memiliki angka pertumbuhan penduduk tertinggi dengan angka 14,15%, angka ini bahkan melampaui angka pertumbuhan di Kabupaten Pringsewu yang sebesar 9,58%. Kemudian kecamatan yang memiliki pertumbuhan penduduk terendah ialah Kecamatan Pagelaran Utara dengan angka 5,52%

Tabel 3. 2 Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Pringsewu

No	Kecamatan	Laju Pertumbuhan (%)
1	Pagelaran	14,15
2	Ambarawa	10,98
3	Gadingrejo	10,54
4	Banyumas	10,46
5	Sukoharjo	9,75
6	Adiluwih	8,39
7	Pardasuka	8,34
8	Pringsewu	6,63
9	Pagelaran Utara	5,52
Kabupaten Pringsewu		9,58

Sumber : BPS Kabupaten Pringsewu, 2021

3.3 Kondisi Perekonomian

Salah satu kacamata yang penting dalam perencanaan pembangunan ialah ekonomi regional. Upaya pembangunan suatu wilayah tidak pernah terlepas dari tujuan untuk meningkatkan ekonomi pertumbuhan wilayahnya. Maka dari itu, dalam penyusunan SIDA penting dilakukan peninjauan terhadap kondisi perekonomian wilayah Pringsewu. Kondisi perekonomian Kabupaten Pringsewu, dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Pringsewu dari tahun 2016 hingga 2019 selalu mengalami peningkatan hingga Rp. 7.742.153,33 juta Rupiah. Namun pada tahun 2020, terjadi penurunan besaran PDRB menjadi Rp. 7.648.788,68 juta Rupiah. Hal yang menjadi penyebab menurunnya besaran PDRB ini adalah fenomena covid-19. Pandemi ini telah membuat beberapa aktivitas ekonomi wilayah terhambat, tidak hanya pada Kabupaten Pringsewu, namun seluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia.

Adapun laju pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pringsewu

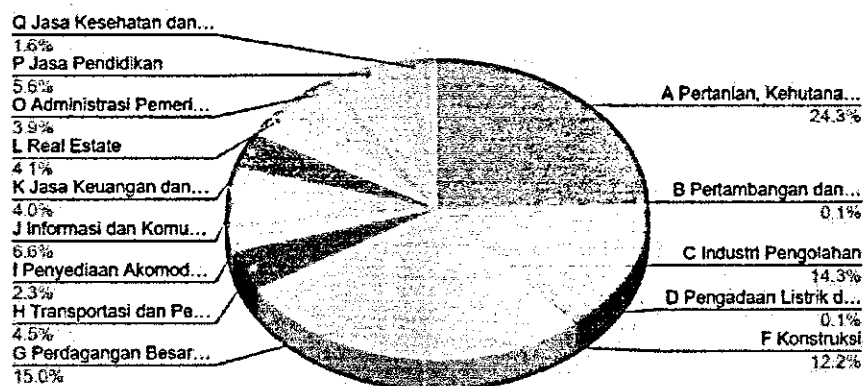
Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB (Persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.76	2.92	1.85	2.17	0.60
B Pertambangan dan Penggalian	15.44	9.07	6.71	4.31	2.03
C Industri Pengolahan	3.95	5.70	6.13	4.66	-5.87
D Pengadaan Listrik dan Gas	8.11	8.03	6.52	7.14	8.76
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.42	4.30	3.09	4.26	4.32
F Konstruksi	7.48	5.16	6.41	5.02	-2.22
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.77	5.93	6.18	6.85	-6.01
H Transportasi dan Pergudangan	6.51	6.91	6.85	8.24	-3.72
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.97	6.49	9.55	9.27	-2.89
J Informasi dan Komunikasi	6.74	9.78	8.21	7.89	9.37
K Jasa Keuangan dan Asuransi	5.89	2.90	1.46	1.95	3.22
L Real Estate	5.10	6.73	3.70	5.71	-2.72

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB (Persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
M, N Jasa Perusahaan	3.93	5.71	1.54	3.52	-2.46
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.52	3.73	4.21	4.13	4.41
P Jasa Pendidikan	5.50	5.73	7.12	8.05	3.42
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.06	4.40	5.31	6.45	9.11
R,S,T,U Jasa Lainnya	4.80	8.84	9.20	7.97	-4.93
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.04	5.11	5.01	5.04	-1.21

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2021

Kontribusi sektor terbesar pada perekonomian Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada gambar berikut.

PDRB ADHK berdasarkan Lapangan Usaha Kabupaten Pringsewu tahun 2020



Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2021

Gambar 3. 4 Penyumbang PDRB Kabupaten Pringsewu berdasarkan Lapangan Usaha

Dari gambar, dapat dilihat sektor yang memiliki kontribusi terbesar untuk menyumbang nilai PDRB Kabupaten Pringsewu adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan sumbangsi sebesar 24,3%; Perdagangan Besar dan Eceran dengan sumbangsi sebesar 15,0%; serta Industri Pengolahan dengan sumbangsi sebesar 14,3%.

3.4 Kondisi Infrastruktur

Infrastruktur merupakan modal fisik yang mampu mendukung inovasi suatu wilayah. Infrastruktur di Kabupaten Tanggamus yang dapat mendukung pengembangan inovasi adalah sarana Pendidikan dan beberapa sarana penunjang kegiatan basis Kabupaten Pringsewu. Pringsewu memiliki 34 SMK dan 7 Perguruan Tinggi yang tersebar di beberapa kecamatan yaitu sebagai berikut.

Tabel 3. 4 Jumlah Sarana Pendidikan Kabupaten Pringsewu

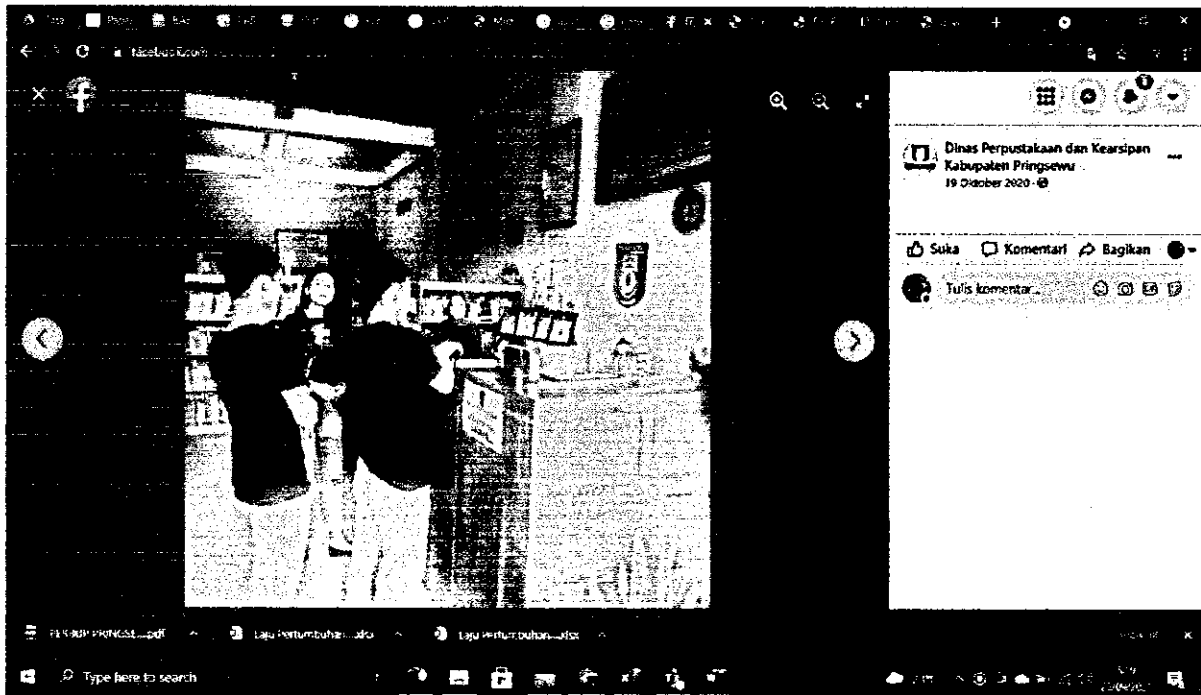
Kecamatan	SMK Swasta	SMK Negeri	Perguruan Tinggi
Pardasuka	0	0	0
Ambarawa	3	0	0
Pagelaran	4	0	0
Pagelaran Utara	0	1	0
Pringsewu	11	0	5
Gadingrejo	5	1	2
Sukoharjo	4	1	0
Banyumas	1	0	0
Adiluwih	3	0	0
Jumlah	31	3	7

Sumber: BPS Kabupaten Pringsewu, 2021

Nama Perguruan Tinggi di Kabupaten Pringsewu:

- STIMIK Pringsewu
- STIT Pringsewu
- UAP (Universitas Aisyah Pringsewu)
- AMIK DCC (Dian Cipta Cendikia) Pringsewu
- UMPRI (Universitas Muhammadiyah Pringsewu)
- STIKES Muhammadiyah Pringsewu

Kegiatan pendidikan di Kabupaten Pringsewu, didukung oleh keberadaan Ruang Baca oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Pringsewu.



Sumber: Perpustakaan Pringsewu, 2020

Gambar 3. 5 Perpustakaan Pringsewu

Selama pandemic covid-19, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Pringsewu telah memiliki aplikasi perpustakaan digital dengan nama PERPUSTAKAAN KABUPATEN PRINGSEWU yang dapat di download pada situs <https://kubuku.id/download/perpustakaan-kabupaten-pringsewu/privasi.html>. dalam upaya mempertahankan minat baca masyarakat Kabupaten Pringsewu.

Selain dibidang pendidikan, Kabupaten Pringsewu juga memiliki beberapa infrastruktur yang mendukung kegiatan basis di Kabupaten Pringsewu yaitu Bendungan dan Irigasi yang mendukung kegiatan sektor unggul yaitu pertanian dan perkebunan. Pringsewu memiliki Bendungan Way sekampung yang merupakan proyek strategis nasional, diresmikan oleh Presiden Jokowi 2 September 2021 dan berlokasi di Banyumas, Pringsewu. Bendungan difungsikan sebagai irigasi, kemudian untuk air baku, juga untuk pembangkit listrik, serta pengendalian banjir. Bendungan Way Sekampung memiliki kemampuan mengairi 55 ribu ha daerah irigasi existing dan 17.500 ha daerah irigasi baru, menyediakan air baku hingga 2,737 liter per detik untuk empat daerah, yakni Kota Bandar Lampung, Branti, Kota Metro, dan Kabupaten Pringsewu serta berpotensi sebagai sumber Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebesar 5,4 MW.



Sumber: Sekretaris Daerah Pringsewu, 2021

Gambar 3. 6 Bendungan Way Sekampung

Kabupaten Pringsewu memiliki beberapa daerah irigasi antara lain daerah irigasi Way Tebu III dan Way Tebu IV. D.I Way Tebu III Terletak di Pekon Bumiratu, Kecamatan Pagelaran, Kab. Pringsewu. Dibangun tahun 1927 memiliki luas potensi 2150 Ha, luas fungsi 1514 Ha, dan panjang saluran induk 4552 m. Luas area bendung Way Tebu III sekitar 5 Ha. D.I Way Tebu IV terletak di Pekon Sukawangi, Kecamatan Pagelaran, Kab. Pringsewu. Dibangun tahun 1938 dengan luas potensi 2660 Ha, luas fungsi 2186 Ha, dan panjang saluran induk 6052 m. Bendung Way Tebu IV memiliki luas area sekitar 2 Ha. Daerah irigasi lainnya yang menjadi kewenangan Provinsi Lampung antara lain D.I. Way Ngison, D.I. Way Napal, D.I. Way Padang Ratu I, D.I. Way Guring, D.I. Way Pujo Rahayu, D.I. Way Manak I, D.I. Way Bulok Sukamara III, dan D.I. Way Mincang IV.

Pada tahun 2018, Kabupaten Pringsewu mengadakan ekspose laporan pengerjaan Masterplan Science Techno Park (STP). Pembangunan STP dilakukan untuk penyediaan tempat menampilkan pengembangan riset, teknologi, kreativitas, inovasi, pendidikan, inkubasi bisnis, promosi, serta kerjasama antar berbagai pemangku kepentingan mulai dari swasta, masyarakat, akademisi, dan pemerintah yang bertujuan untuk pengembangan produk unggulan pertanian Kabupaten Pringsewu dan peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

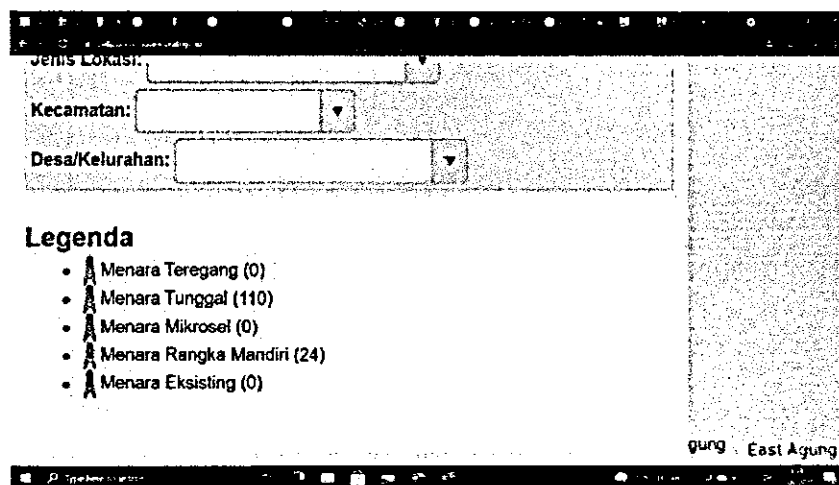
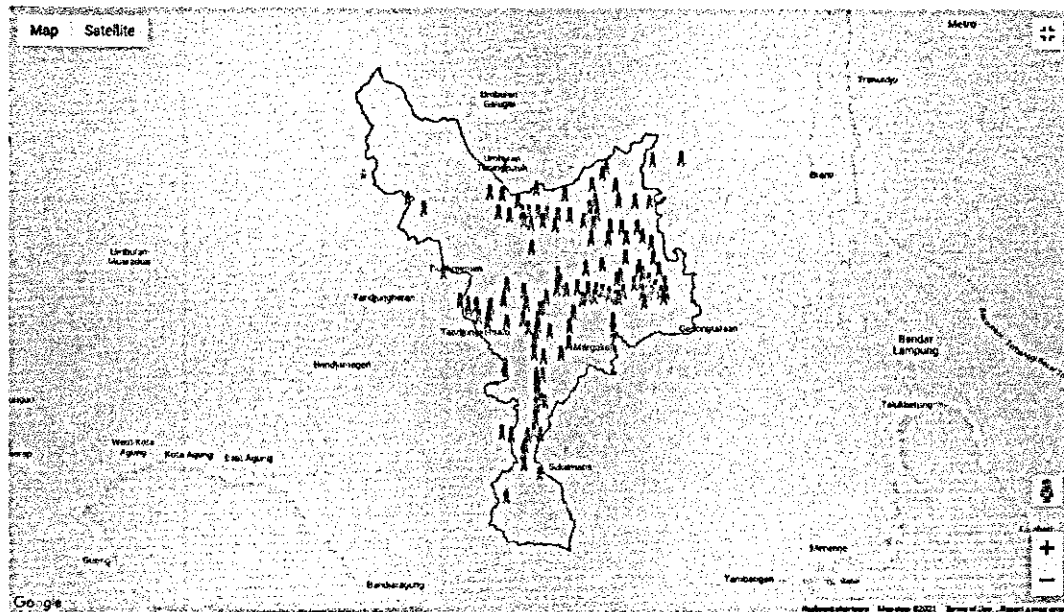
Dalam mendukung sistem inovasi daerah, infrastruktur telekomunikasi menjadi elemen penting untuk mendukung komunikasi jarak jauh dan memanfaatkan teknologi. Salah satu infrastruktur telekomunikasi yang sering digunakan adalah *Base Transceiver Station* (BTS). Dalam penggunaannya telepon seluler sebagai alat komunikasi, BTS merupakan jantung dari sebuah cell site layanan telekomunikasi. BTS adalah perangkat pemancar dan penerima yang menangani akses radio dan berinteraksi langsung dengan Mobile Station (MS) 2 melalui air interface. Jumlah BTS pada Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 5 Jumlah BTS Kabupaten Pringsewu

Perusahaan Pemilik	Jumlah BTS
PT. SOLUSINDO TUNAS PRATAMA	4
PT. XL AXIATA, TBK	5
PT. HUTCHISON 3 INDONESIA	2
PT. Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk	1
PT. Gihon Telekomunikasi Indonesia	1
PT. Era Bangun Towerindo	3
PT. TOWER BERSAMA INFRASTRUKTUR GROUP	19
PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA	20
PT. TELEKOMUNIKASI SELULLAR	14
PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI	14
PT. INDOSAT, TBK	11
Total	94

Sumber: *cellplan.pringsewukab.go.id*, 2021

Adapun persebaran BTS Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut.



Gambar 3. 7 Sebaran BTS Kabupaten Pringsewu

3.5 Kondisi Kelembagaan

Sistem Inovasi Daerah merupakan salah satu bentuk gambaran arahan pengembangan dari suatu wilayah yang sedang digalakkan oleh pemerintah di Kabupaten Pringsewu. Untuk menunjang pertumbuhan kawasan inovasi, di Kabupaten Pringsewu telah menerapkan sistem informasi digital tingkat desa yang memberikan informasi internal di desa tersebut yang meliputi :

- Profil desa
- Pemerintahan desa
- Kelembagaan berupa kelompok masyarakat
- Data Statistik

-
- Dana Desa dan APBDes
 - Produk Hukum berupa SK
 - Layanan Pengaduan

Inovasi daerah tentunya tidak lepas dari adanya penelitian, dalam beberapa tahun terakhir Bappeda kerap mengadakan penelitian yang berbasis inovasi dan teknologi untuk memberikan stimulus bagi daerah untuk bisa mengembangkan inovasi yang dapat bermanfaat bagi daerah tersebut. Kegiatan penelitian yang dilakukan antara lain :

- Karya Inovasi dan IPTEK Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 dengan Tema: “Inovasi Berbasis Potensi Unggulan Daerah Untuk Pringsewu Yang Berdaya Saing”
- Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Kabupaten Pringsewu Tahun 2020

Penelitian ini tentunya juga dilakukan dengan kerjasama dengan para akademisi di daerah terdekat seperti kampus ITERA dan kampus UIN Raden Intan untuk menambah potensi keberhasilan dalam mewujudkan inovasi daerah. Lalu dalam bidang sistem data dan informasi, tentunya untuk mencapai keberhasilan inovasi dibutuhkan sebuah sistem yang menyeluruh untuk kebutuhan data yang akan digunakan untuk pengembangan daerah. Pemerintah daerah telah menginisiasikan hal tersebut kepada seluruh aparat pemerintahan kabupaten serta warga yang ada di kabupaten tersebut, berikut merupakan program sistem data dan informasi yang telah dilaksanakan dan masih dikembangkan pemerintah :

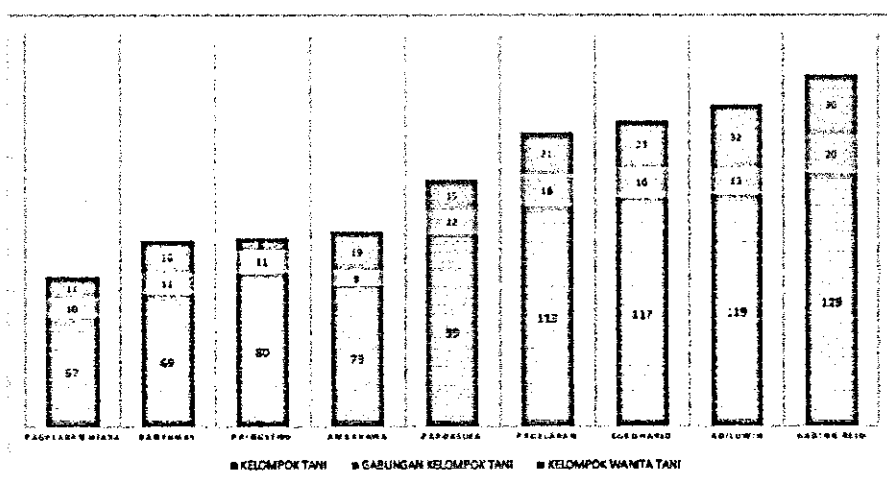
- Persentase pekon telah mampu mengoperasikan *e-government* yaitu 41,98 persen dan ditargetkan mencapai 95,42 persen pada tahun akhir RPJMD
- Persentase pekon yang telah tertib pengelolaan keuangan melalui IT yaitu 80.25 persen dan ditargetkan mencapai 95 persen pada tahun akhir RPJMD
- Persentase SKPD yang aktif updating terhadap websitenya sebesar 50 persen
- Persentase rutinitas Rapemda dalam menyiarkan programnya yaitu 65 persen dan ditargetkan mencapai 85 persen pada tahun akhir RPJMD
- Persentase ketersediaan peta digital dan analog tata ruang yaitu 30,50 persen dan ditargetkan mencapai 60 persen pada tahun akhir RPJMD
- Prosentase aparatur pengelola website SKPD yang mendapat pelatihan yaitu 45,50 persen dan ditargetkan mencapai 80,50 persen pada tahun akhir RPJMD

Tidak hanya sistem data dan informasi yang merupakan faktor penting dari pengembangan kawasan inovasi, pengembangan sumber daya manusia di lingkungan

pemerintah daerah juga perlu dilakukan untuk mendukung pengadaan program SIDA. Berikut merupakan rincian program dan pencapaian yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai kriteria sumber daya manusia yang kompeten untuk pengadaan SIDA di Kabupaten Pringsewu :

- Persentase ASN yang telah mengikuti diklat fungsional pada tahun awal RPJMD yaitu 5,5 persen dan ditargetkan mencapai 8.75 persen pada tahun akhir RPJMD
- Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis pada tahun awal RPJMD yaitu 35,25 persen dan ditargetkan mencapai 50 persen pada tahun akhir RPJMD
- Persentase pejabat pengawas yang telah mengikuti Diklat PIM IV sebesar 47.62 persen
- Persentase pejabat administrator yang telah mengikuti Diklat PIM III sebesar 60 persen
- Persentase pejabat pimpinan tinggi pratama yang telah mengikuti Diklat PIM II 32,26
- Persentase pejabat pengawas yang telah mengikuti Diklat PIM IV ditargetkan mencapai 85,71 pada tahun akhir RPJMD
- Persentase pejabat administrator yang telah mengikuti Diklat PIM III ditargetkan mencapai 85,60 pada tahun akhir RPJMD
- Persentase pejabat pimpinan tinggi pratama yang telah mengikuti Diklat PIM II ditargetkan mencapai 85,60 pada tahun akhir RPJMD

Pada kelembagaan di salah satu sektor unggulan yaitu sektor pertanian terdapat beberapa kelompok kemasyarakatan yang tersebar di seluruh kecamatan pada Kabupaten Pringsewu pada tahun 2020 yang merupakan salah satu instrumen dasar akan terlaksananya inovasi sumber daya manusia.



Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu, 2020

Gambar 3. 8 Grafik Jumlah Kelompok Masyarakat Sektor Pertanian di Kabupaten Pringsewu

Dari grafik diatas menjelaskan bahwa terdapat lembaga kemasyarakatan berupa Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani dengan sumber daya manusia yang terbanyak berada di Kecamatan Gading Rejo. Keberadaan sumber daya manusia pada Lembaga Kemasyarakatan ini dapat mendukung keberlangsungan sektor unggulan pada sektor pertanian.

BAB IV METODE PENYUSUNAN

Sebelum mengetahui metode yang akan digunakan, perlu memahami bahwa Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antarinstansi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah. Dalam penyusunan Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Pringsewu akan menggunakan dalam metode kajian aksi yang juga melibatkan perencanaan kolaborasi. Dimana pendekatan yang digunakan akan menggunakan pendekatan partisipatif, sehingga akan melibatkan aktor lokal/pelaku usaha secara aktif. Selain itu juga akan mengelaborasi antara kajian akademis ilmiah dengan kebutuhan pembangunan, kesiapan stakeholder, dan kapasitas sumber daya eksisting. Keseluruhan dari metode itu akan secara dominan menampilkan data secara deskriptif. Secara umum akan terdapat beberapa Teknik yang menjadi komponen pelengkap metode penyusunan SIDA:

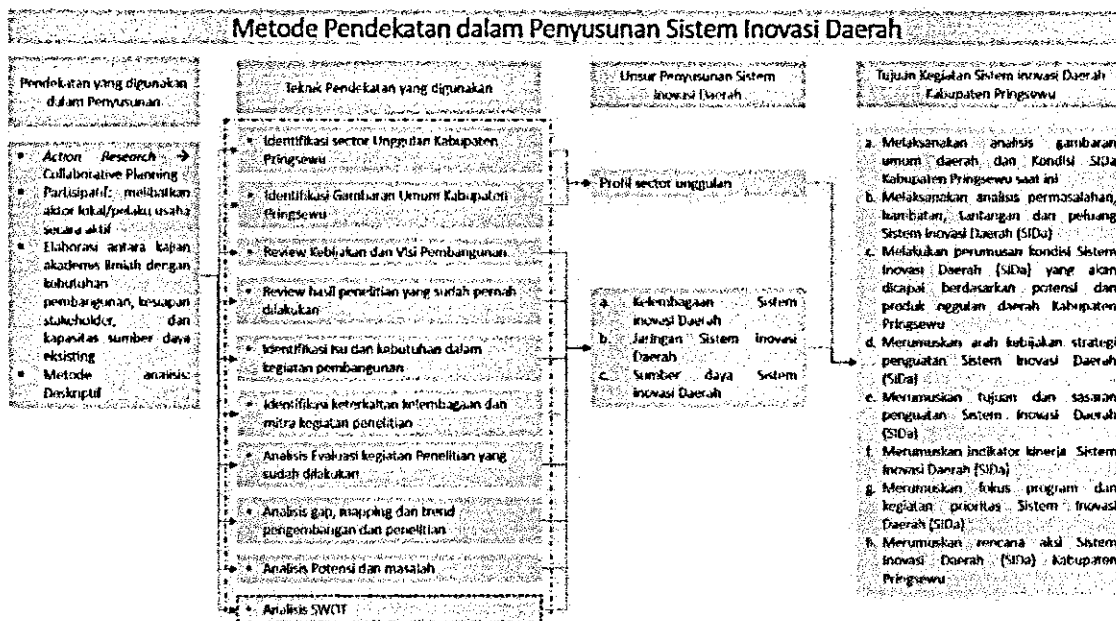
- Identifikasi Sektor Unggulan
- Identifikasi Gambaran Umum
- Review Kebijakan dan Visi Pembangunan
- Review hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan
- Identifikasi isu dan kebutuhan dalam kegiatan pembangunan
- Identifikasi keterkaitan kelembagaan dan mitra kegiatan penelitian
- Analisis Evaluasi kegiatan Penelitian yang sudah dilakukan
- Analisis Evaluasi kegiatan Penelitian yang sudah dilakukan
- Analisis gap, mapping dan trend pengembangan dan penelitian
- Analisis Potensi dan masalah
- Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threat*)

Dimana dari berbagai Teknik tersebut akan menyesuaikan dengan komponen utama dari SIDA yang terdiri dari (a). Kelembagaan Sistem Inovasi Daerah (b). Jaringan Sistem Inovasi Daerah (c). Sumber daya sistem inovasi daerah. Dari ketiga komponen tersebut nantinya akan didukung dengan data profil sektor unggulan di Kabupaten Pringsewu, sehingga SIDA nantinya dapat berimplikasi besar pada perkembangan sektor unggulan daerah. Berikut beberapa tujuan dan capaian yang akan dicapai dari metode dalam penyusunan SIDA:

- a. Melaksanakan analisis gambaran umum daerah dan Kondisi SIDA Kabupaten Pringsewu saat ini

- b. Melaksanakan analisis permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
- c. Melakukan perumusan kondisi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang akan dicapai berdasarkan potensi dan produk unggulan daerah Kabupaten Pringsewu
- d. Merumuskan arah kebijakan strategi penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
- e. Merumuskan tujuan dan sasaran penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
- f. Merumuskan indikator kinerja Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
- g. Merumuskan fokus program dan kegiatan prioritas Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
- h. Merumuskan rencana aksi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pringsewu

Dari keseluruhan komponen metode yang akan dilakukan, berikut kerangka metode penyusunan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pringsewu:



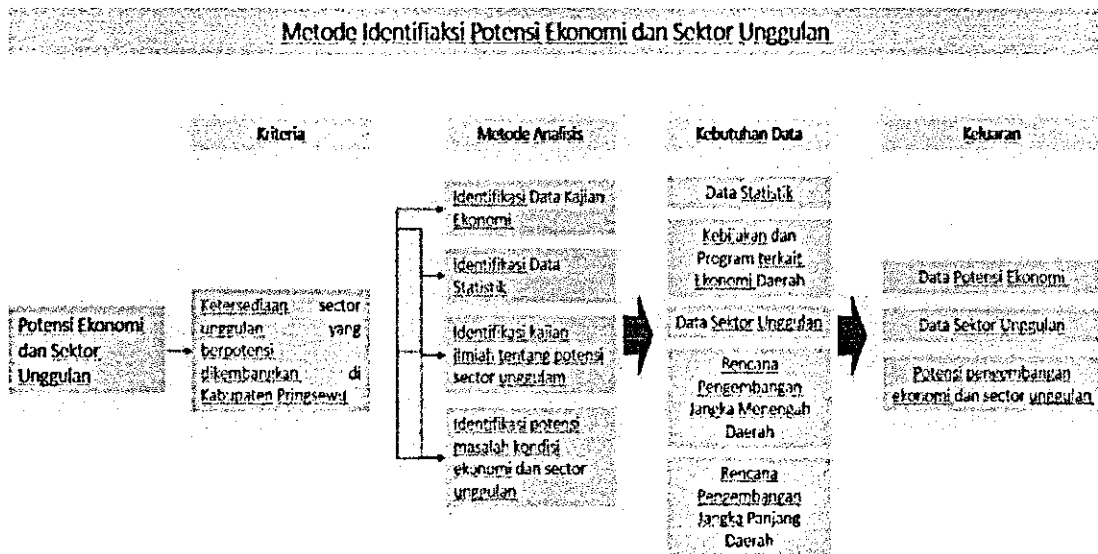
Gambar 4. 1 Metode Penyusunan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pringsewu

Dalam penjelasannya, menunjukkan bahwa dalam mewujudkan metode yang lebih teknis dan detail menjelaskan permasalahan, maka metode yang akan digunakan akan diturunkan dan disesuaikan dengan ketiga kriteria tersebut. Berikut beberapa metode teknis yang telah disesuaikan dengan kriteria Sistem Inovasi Daerah:

4.1 Metode Identifikasi Sektor Unggulan

Pada metode identifikasi potensi ekonomi dan sector unggulan ini berperan untuk mengidentifikasi potensi ekonomi dan sector unggulan. Metode ini akan berfokus dalam

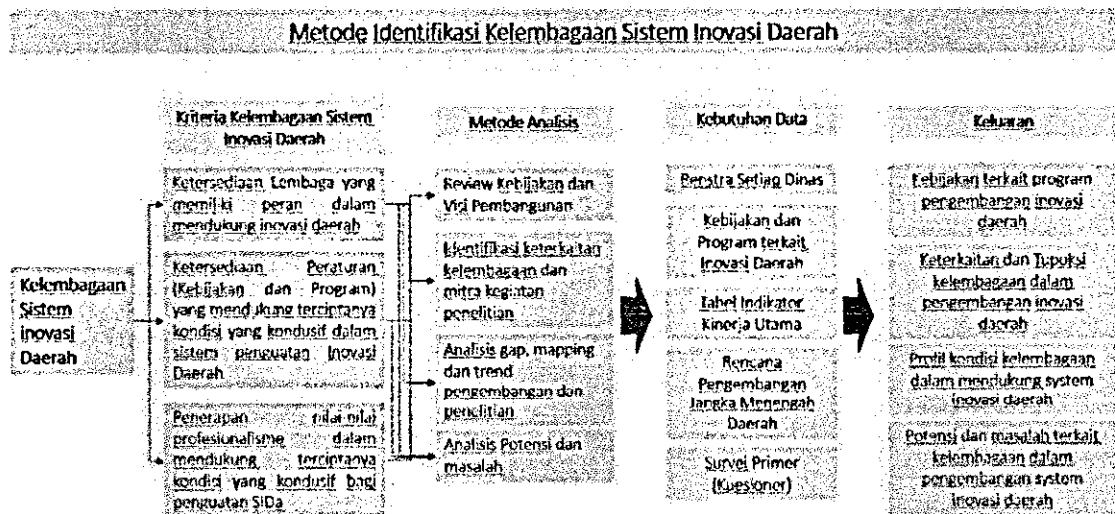
mengidentifikasi sector unggulan, sehingga dapat diketahui bagaimana kondisi dari persebaran sector unggulan di Kabupaten Pringsewu. Berikut kerangka identifikasi potensi sector unggulan di Kabupaten Pringsewu:



Gambar 4. 2 Metode Identifikasi Sektor Unggulan

4.2 Metode Identifikasi Kelembagaan Sistem Inovasi Daerah

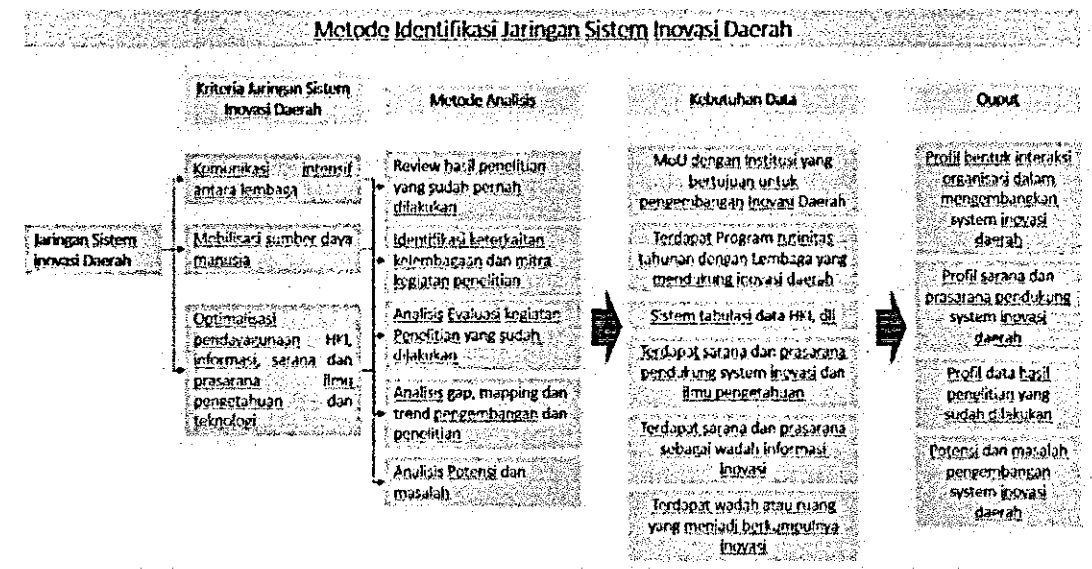
Dalam menyusun Sistem Inovasi Daerah juga tidak lepas dari peran kelembagaan. Dalam konteks ini adalah stakeholder siapapun yang ikut berperan dan berfungsi dalam mewujudkan Sistem Inovasi Daerah. Berikut kerangka metode identifikasi kelembagaan Sistem Inovasi Daerah:



Gambar 4. 3 Metode Identifikasi Kelembagaan Sisten Inovasi Daerah

4.3 Metode Identifikasi Jaringan Sistem Inovasi Daerah

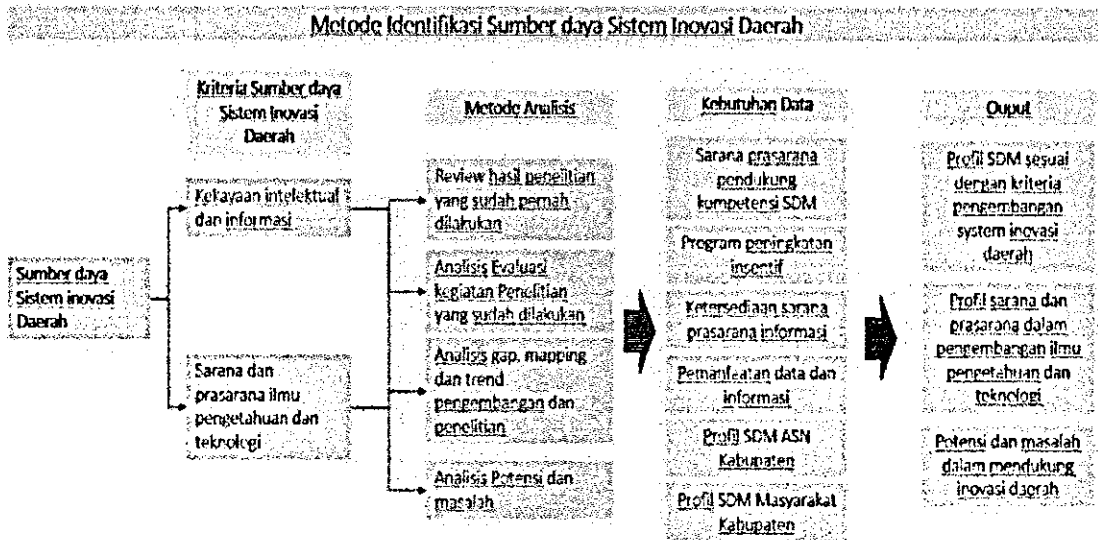
Salah satu hal lain yang perlu diperhatikan secara detail adalah bagaimana jaringan yang terbentuk dari system inovasi daerah. Secara umum dalam jaringan system inovasi daerah akan terfokus pada komunikasi intensif antara Lembaga, mobilisasi sumber daya manusia dan optimalisasi pendayagunaan HKI, informasi, sarana serta prasarana pendukung. Berikut kerangka metode dalam melakukan identifikasi jaringan system inovasi daerah:



Gambar 4. 4 Metode Identifikasi Jaringan Sistem Inovasi Daerah

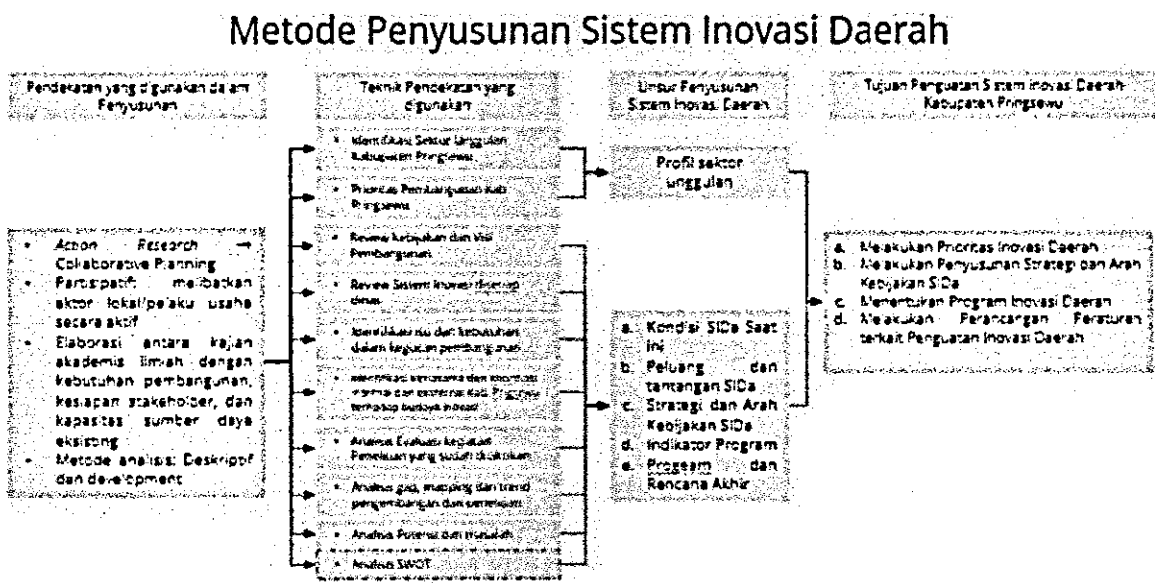
4.4 Metode Identifikasi Sumber daya Sistem Inovasi Daerah

Salah satu faktor yang paling penting dalam menjalankan system adalah sumber daya. Hal ini menjadi penting untuk memperhatikan bagaimana pengelolaan kekayaan intelektual, informasi hingga sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten Pringsewu. Berikut kerangka identifikasi sumber daya system inovasi daerah di Kabupaten Pringsewu:



Gambar 4. 5 Metode Identifikasi Sumber Daya Sistem Inovasi Daerah

Keseluruhan metode nantinya akan dikemas dalam rencana kerja yang dapat dilakukan secara teknis dan terukur. Berikut penjelasan secara teknis dari rencana dan tahapan kerja penyusunan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pringsewu.



Gambar 4. 6 Tahapan Kegiatan Penyusunan Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Berdasarkan diatas nantinya akan kurang lebih membutuhkan sepuluh kegiatan untuk mewujudkan penguatan sistem inovasi daerah di Kabupaten Pringsewu. Nantinya tahapan kegiatan ini akan menjadi acuan bagi tim dalam Menyusun Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Pringsewu.

BAB V

POTENSI, MASALAH, SERTA ISU STRATEGIS

5.1 Potensi Pembangunan Kabupaten Pringsewu

Letak Kabupaten Pringsewu yang strategis di Jalur Lintas Barat yang merupakan salah satu jalur tersibuk di Provinsi Lampung menuju sejumlah provinsi di pantai barat Sumatera, membuat posisi Kabupaten Pringsewu sangat potensial untuk pengembangan sektor perdagangan dan jasa, baik usaha perdagangan kecil, menengah maupun usaha perdagangan besar. Berdasarkan potensi pengembangan yang terdapat di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pringsewu 2017-2022, pengembangan wilayah atau kawasan budidaya mencakup bidang budidaya pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, pemukiman dan peruntukan lainnya. Adapun potensi pengembangan yang terdapat di dalam RPJMD Kabupaten Pringsewu 2017-2022, yaitu antara lain:

5.1.1 Pengembangan Kawasan Pertanian

Potensi pengembangan kawasan pertanian diarahkan pada lahan seluas kurang lebih 44.984 ha, yang meliputi sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Untuk pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan (lahan sawah) seluas kurang lebih 13.528 ha yang meliputi lahan sawah irigasi seluas 9.036 ha dan lahan sawah tadah hujan seluas 4.492 ha yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pringsewu. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yaitu seluas 8.145 ha di Kabupaten Pringsewu.

Adapun pengembangan tanaman pangan lainnya seperti jagung berada di Kecamatan Adiluwih dan Sukoharjo, sedangkan pengembangan kedelai berada di Kecamatan Ambarawa dan Pardasuka. Untuk pengembangan tanaman hortikultura (sayursayuran dan buah-buahan) tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pringsewu. Pemanfaatan Bendungan Way Sekampung di Kecamatan Pagelaran diharapkan mampu berkontribusi kepada petani di Kabupaten Pringsewu. Diharapkan kedepannya Pemerintah dapat mengakomodir untuk pemanfaatannya yang lebih luas dari target Pemerintah Pusat yang saat ini hanya seluas 500 Hektar. Potensi tanaman perkebunan seluas sekitar 9.157 ha meliputi tanaman kakao dan

tanaman karet yang tersebar di Kecamatan Adiluwih, Sukoharjo, Banyumas, Pagelaran, Pagelaran Utara dan Pardasuka. Sedangkan pengembangan tanaman tembakau tersebar di Kecamatan Pagelaran, Pagelaran Utara dan Banyumas.

Wilayah pengembangan peternakan dilakukan di seluruh kecamatan di Kabupaten Pringsewu, yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan peternakan, antara lain wilayah pengembangan sapi bali di Kecamatan Sukoharjo dan Adiluwih; wilayah pengembangan sapi PO di Kecamatan Gadingrejo, Pagelaran dan Adiluwih; wilayah pengembangan kambing / domba di Kecamatan Pagelaran, Pagelaran Utara, Banyumas, Adiluwih dan Sukoharjo; wilayah pengembangan unggas di Kecamatan Gadingrejo, Sukoharjo, Adiluwih, Ambarawa dan Pringsewu; dan wilayah pengembangan kerbau di Kecamatan Pardasuka dan Gadingrejo.

5.1.2 Pengembangan Kawasan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan dengan luas kurang lebih 5.553 ha yaitu Kawasan budidaya perikanan, kawasan pengolahan perikanan dan kawasan minapolitan. Kawasan peruntukan budidaya perikanan meliputi perikanan kolam dengan luas kurang lebih 1.023 (seribu dua puluh tiga) hektar berupa pengembangan perikanan kolam air tawar dengan komoditas Ikan Nila, Ikan Gurami, Ikan Lele, ikan mas dan ikan patin di Kecamatan Pagelaran, dan sebagian di Kecamatan Pringsewu, Ambarawa dan Gadingrejo dan perikanan tangkap perairan umum dengan luas kurang lebih 3.830 hektar berupa perikanan sungai dengan komoditas ikan gabus, wader, lele, sepat, gurame, mujair, betutu, nilam, nila dan betik dikembangkan di Kecamatan Pardasuka, Sukoharjo, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pringsewu, dan Kecamatan Pagelaran.

Kawasan pengolahan perikanan meliputi pengembangan teknologi pengolahan hasil perikanan yang akan dikembangkan di Kecamatan Pagelaran. Kemudian pengembangan kawasan minapolitan seluas kurang lebih 700 (tujuh ratus) hektar di Pagelaran dengan komoditas Ikan Lele, Ikan Mas, Ikan Gurame, Ikan Nila, Ikan Patin, Ikan Baung, dan Ikan Hias.

5.1.3 Pengembangan Kawasan Pertambangan

Pengembangan kawasan pertambangan terdiri dari wilayah usaha pertambangan dan wilayah pertambangan rakyat dilakukan di wilayah yang menyebar di di Kabupaten Pringsewu yang memiliki potensi bahan tambang, yaitu mineral dan batubara. Pengembangan potensi pertambangan dilakukan secara selektif sesuai daya dukungnya.

Kawasan peruntukan pertambangan meliputi mineral logam berupa bijih besi, emas dan logam ikutan lainnya yang berada di Kecamatan Pagelaran, Sukoharjo dan Kecamatan Adiluwih, mineral nonlogam berupa pasir kuarsa berada di Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Adiluwih; batuan berupa marmer, andesit, batu gamping, granodiorit, dan tanah liat berada di Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Adiluwih, Banyumas, Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Gadingrejo; dan batubara di Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pardasuka.

5.1.4 Pengembangan Kawasan Industri

Pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek geologi meliputi kawasan peruntukan industri besar, kawasan peruntukan industri menengah dan kawasan peruntukan industri kecil dan mikro. Kawasan peruntukan industri besar akan dialokasikan pada wilayah kecamatan meliputi: pengembangan kegiatan industri pengolahan hasil perikanan di Kecamatan Pagelaran; pengembangan industri pengolahan hasil peternakan di Gadingrejo; dan pengembangan kegiatan industri berbasis agribisnis yang mengolah hasil pertanian dan perkebunan dikembangkan pada wilayah Kecamatan Gadingrejo, Sukoharjo, Adiluwih, Pagelaran dan Banyumas.

Kawasan peruntukan industri menengah berupa pengembangan industri skala menengah diarahkan di Kecamatan Adiluwih meliputi industri genteng pres, industri batu bata, industri gilingan padi, industri meubeler, industri kopi bubuk dan industri tepung tapioka. Sedangkan kawasan peruntukan industri kecil dan mikro akan dikembangkan pada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu meliputi industri pembuatan tungku, industri kayu, industri tahu dan tempe, industri kerupuk, industri peyek, industri emping, industri kelanting, industri keripik, industri kerajinan emas/perak, industri kerajinan tapis, industri anyaman bamboo dan industri pengolahan limbah kain/kain perca.

5.1.5 Pengembangan Kawasan Pariwisata

Pengembangan kawasan pariwisata bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut. Pengembangan kawasan pariwisata dengan luas lebih kurang 800 (delapan ratus) hektar meliputi antara lain:

1. Wisata alam meliputi; Telaga Gupit Tegalsari-Mataram di Kecamatan Gadingrejo; Bendungan Way Ngison di wilayah Pagelaran; Bendungan Bumiratu di Kecamatan Pagelaran; dan Air Terjun Way Kunyir di Pagelaran, Air Terjun di Pekon Rantau Tijang dan Selapan Kecamatan Pardasuka.

-
2. Wisata budaya meliputi Pura Giri Sutramandala di Desa Mataram Kecamatan Gadingrejo; Makam Kyai Haji Gholib di Kecamatan Pringsewu; Goa Maria Padang Bulan di Kecamatan Pringsewu; Rumah Adat di Marga Kaya Kecamatan Pringsewu; dan Rumah Adat di Pardasuka Kecamatan Pardasuka.
 3. Wisata buatan meliputi Bukit Silitonga di Kecamatan Sukoharjo; Bukit Sari Nongko di Kecamatan Sukoharjo; Villa Novi di Kecamatan Sukoharjo; Balong Kuring di Pringsewu; Kolam renang Grojogan Sewu di Kecamatan Pringsewu; Hutan Kota Terpadu di Kecamatan Pringsewu, dan Bendungan Way Sekampung di Kecamatan Pagelaran.

5.1.6 Pengembangan Kawasan Permukiman

Pengembangan kawasan peruntukan bagi permukiman yang meliputi Kawasan permukiman perkotaan berada di Kecamatan Pringsewu, Gadingrejo, Pagelaran, Ambarawa, dan Sukoharjo dengan luas sekitar 7.939 (tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) hektar; kawasan permukiman perdesaan di Kecamatan Adiluwih, Banyumas, dan Kecamatan Pardasuka dengan luas kurang lebih 2.025 (dua ribu dua puluh lima) hektar; kawasan permukiman berkepadatan tinggi akan diarahkan di Kecamatan Sukoharjo dan Ambarawa; kawasan permukiman berkepadatan sedang diarahkan di Pagelaran dan Banyumas; dan kawasan permukiman berkepadatan rendah diarahkan di wilayah Kecamatan Pardasuka dan Adiluwih.

5.1.7 Pengembangan Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya terdiri atas kawasan perdagangan dan jasa; dan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan. Kawasan perdagangan dan jasa dikembangkan di Pringsewu, Pagelaran dan Sukoharjo. Kawasan pertahanan dan keamanan yang terdiri dari: kompleks markas Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Pringsewu di Kecamatan Gadingrejo; kompleks Markas Komando Distrik Militer (Makodim) di Kecamatan Gadingrejo; kompleks markas Kepolisian Sektor (Polsek) dan Markas Rayon Militer (Koramil) di setiap kecamatan di Kabupaten Pringsewu.

Selain kawasan budidaya, di Kabupaten Pringsewu juga terdapat wilayah-wilayah yang akan di tetapkan sebagai kawasan strategis ekonomi dan kawasan strategis sosial budaya. Kawasan strategis ekonomi meliputi kawasan perdagangan regional di daerah perkotaan Pringsewu; kawasan agropolitan di wilayah Kecamatan Gadingrejo dan kawasan minapolitan

di wilayah Kecamatan Pagelaran. Sedangkan untuk kawasan strategis sosial budaya meliputi kawasan pusat pengembangan pendidikan di Kecamatan Gadingrejo; dan kawasan pariwisata budaya di Pekon Margakarya, Kecamatan Pringsewu dan Kecamatan Pardasuka.

5.2 Masalah Pembangunan Kabupaten Pringsewu

Ditinjau dari studi literatur, terdapat beberapa masalah pembangunan terutama dalam pengembangan inovasi secara umum di Kabupaten Pringsewu yaitu sebagai berikut.

1. Terbatasnya peneliti yang berada dan bekerja di Kabupaten Pringsewu.
2. Belum adanya lembaga yang khusus menyelenggarakan dan mengelola penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap inovasi serta berimplikasi pada kurangnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan inovasi daerah
4. Belum memadainya sarana prasarana pendukung inovasi seperti perpustakaan yang sesuai dengan standar, perguruan tinggi riset, technopark, pusat-pusat penelitian strategis
5. Belum banyaknya upaya pemerintah daerah dalam menggagas Kerjasama dengan daerah lain dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi

Berdasarkan kondisi SIDA Kabupaten Pringsewu yang ada saat ini, maka permasalahan yang bersifat strategis pada kondisi inovasi daerah eksisting dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 5. 1 Permasalahan Strategis Kabupaten Tanggamus

No	Kerangka Kebijakan	Permasalahan Strategis
1	Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur, sarana, dan prasarana yang ada saat ini belum sepenuhnya mendukung kebutuhan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi di Kabupaten Pringsewu. • Perlunya pembangunan sistem inovasi daerah melalui penyusunan sebuah peta jalur distribusi (peta jalan) yang jelas dan komprehensif.
2	Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Model kolaborasi, sinergi, dan koordinasi untuk memperkuat inovasi dan difusi inovasi belum terbangun secara sistemik. Sehingga perlunya sebuah wahana interaksi antar pelaku inovasi seperti yang telah direncanakan dalam sebuah konsep prasarana dan sarana pendukung inovasi, seperti perpustakaan

No	Kerangka Kebijakan	Permasalahan Strategis
		yang sesuai dengan standar, perguruan tinggi riset, technopark, pusat-pusat penelitian strategis.
3	Pengembangan budaya inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terciptanya budaya inovasi yang kuat di kalangan aparaturnya dan juga pada masyarakat Kabupaten Pringsewu, sehingga perlu adanya konsep peta jalan pembangunan inovasi Kabupaten Pringsewu yang lebih jelas dan terarah. • Belum optimalnya perlindungan dan pelestarian pada kekayaan budaya daerah.
4	Keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri daerah dan nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terlihatnya secara masif klaster industri yang berbasis pada inovasi sebagai upaya menghadapi era industri 4.0 yang mendasarkan kegiatannya pada teknologi dan juga internet, dan kesemuanya membutuhkan modal kreatifitas dan inovasi yang tinggi.
5	Keselarasan dengan perkembangan global	<ul style="list-style-type: none"> • Model pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya mendasarkan diri pada mendorong lajunya kegiatan ekonomi saja, tetapi juga memikirkan kelestarian lingkungan menjadi aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Saat ini isu mengenai lingkungan masih membutuhkan solusi konkrit di Kabupaten Pringsewu, dan ini bisa diinisiasi dalam program dan kegiatan para stakeholders dan dilakukan dalam kerangka yang lebih kreatif dan inovatif.
6	Kelembagaan dan daya dukung teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan kelembagaan yang ada di Kabupaten Pringsewu yang belum optimal bagi pembangunan daerah dan dalam mendorong daya saing daerah. • Perlunya wadah untuk melakukan inovasi agar produk-produk industri pengolahan dapat juga dilakukan oleh masyarakat sehingga mampu menjadi penggerak ekonomi daerah. • Belum adanya lembaga yang khusus menyelenggarakan dan mengelola penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
7	Sektor ekonomi unggulan	<ul style="list-style-type: none"> • Sektor ekonomi unggulan belum secara detail menjabarkan dan menetapkan komoditi unggulan yang menjadi kekuatan dalam pengembangan inovasi daerah.

No	Kerangka Kebijakan	Permasalahan Strategis
		<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sektor unggulan masih terkendala oleh sarana prasarana, pengelolaan pemasaran, dan keterkaitan rantai usaha yang belum optimal.

5.3 ISU STRATEGIS

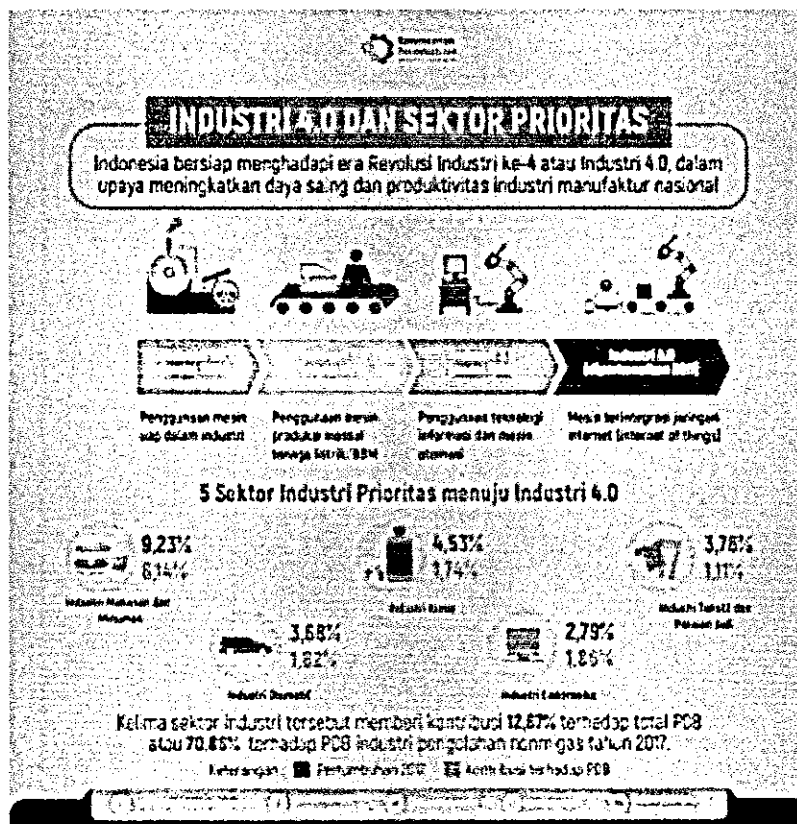
Pembangunan daerah Kabupaten Pringsewu perlu mempertimbangkan isu-isu yang relevan, seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tingkat internasional dan nasional yang ditandai oleh penerbitan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Industri 4.0 yang mulai diangkat sebagai visi pembangunan ekonomi nasional terutama pada sektor perindustrian yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Proyek Strategis Nasional (PSN), dan *Major Project* (MP) sebagai upaya mengakselerasi pembangunan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

5.3.1 Revolusi Industri 4.0

Fourth Industrial Revolution ("4IR") atau Revolusi Industri 4.0 tidak hanya berpotensi luar biasa dalam merombak industri, tapi juga mengubah berbagai aspek kehidupan manusia. Kita telah melihat banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang, yang telah memasukkan gerakan ini ke dalam agenda nasional mereka sebagai salah satu cara untuk meningkatkan daya saing di kancah pasar global. 4IR sudah pasti akan menuju Indonesia dan kita siap untuk mengimplementasikannya. Bagi Indonesia, fenomena 4IR memberikan peluang untuk merevitalisasi sektor manufaktur Indonesia dan menjadi salah satu cara untuk mempercepat pencapaian visi Indonesia untuk menjadi 10 ekonomi terbesar di dunia. Hingga tahun 2016, industri manufaktur berkontribusi sebesar 20 persen PDB Indonesia dan membuka lebih dari 14 juta lapangan pekerjaan. Berkat belanja konsumen kita yang kuat, yang berkontribusi hingga 50 persen dari PDB, ekonomi Indonesia telah bertumbuh enam kali lipat dalam kurun waktu 17 tahun dan mencapai angka lebih dari US\$ 1 triliun pada tahun 2017 serta telah berhasil berubah dari ekonomi berbasis sumber daya alam menjadi ekonomi yang berbasis sektor yang lebih bernilai tambah. Indonesia juga sedang menikmati periode bonus

demografi, berkat banyaknya populasi penduduk berusia muda dan masuk dalam rentang produktif.

Dengan adanya perubahan menuju ekonomi berbasis jasa, kontribusi industri manufaktur Indonesia menurun menjadi 22 persen pada tahun 2016 setelah sebelumnya mencapai titik tertinggi sebesar 26 persen pada tahun 2001, dan ini diperkirakan akan terus menurun pada tahun 2030 jika tidak dilakukan intervensi apapun. Di lain pihak, populasi usia produktif diperkirakan akan bertambah sebanyak 30 juta orang pada tahun 2030, sehingga akan menjadi penting bagi pemerintah untuk membuka lahan pekerjaan bagi mereka. Penerapan 4IR membuka peluang untuk merevitalisasi kembali industri manufaktur kita, meningkatkan produktifitas pekerja, mendorong ekspor netto, serta membuka sekitar 10 juta lapangan pekerjaan tambahan yang akan menjadi landasan pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk menuju 10 ekonomi terbesar di dunia.



Sumber: Kementerian Perindustrian, 2017

Gambar 5. 1 Industri 4.0 dan Sektor Prioritasnya

Untuk merevitalisasi industri manufaktur, Indonesia berkomitmen untuk mempercepat implementasi 4IR. Inisiatif Making Indonesia 4.0 ini memberikan potensi besar untuk melipatgandakan produktifitas tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan daya saing global dan mengangkat pangsa pasar ekspor global. Ekspor yang lebih tinggi akan membuka lebih

banyak lapangan pekerjaan, sehingga konsumsi domestik menjadi lebih kuat dan Indonesia dapat menjadi salah satu dari 10 (sepuluh) besar ekonomi dunia. Menjadi 10 (sepuluh) besar kekuatan ekonomi dunia berdasarkan PDB Indonesia berencana untuk menjadi salah satu dari 10 (sepuluh) kekuatan ekonomi terbesar di dunia berdasarkan PDB pada tahun 2030. Sejauh ini Indonesia telah merasakan pertumbuhan ekonomi yang sehat, dengan PDB yang terus menanjak sebanyak 11 tingkat, dari posisi 27 di tahun 2000 sampai posisi 16 di tahun 2016, berkat konsumsi dan investasi domestik yang kuat.

4IR mencakup beragam teknologi canggih, seperti kecerdasan buatan (AI), *Internet of Things* (IoT), *wearables*, robotika canggih, dan *3D printing*. Indonesia akan berfokus pada lima sektor utama untuk penerapan awal dari teknologi ini, yaitu (i) makanan dan minuman, (ii) tekstil dan pakaian, (iii) otomotif, (iv) kimia, dan (v) elektronik. Sektor ini dipilih menjadi fokus setelah melalui evaluasi dampak ekonomi dan kriteria kelayakan implementasi yang mencakup ukuran PDB, perdagangan, potensi dampak terhadap industri lain, besaran investasi, dan kecepatan penetrasi pasar. Indonesia akan mengevaluasi strategi dari setiap fokus sektor setiap tiga sampai empat tahun untuk meninjau kemajuannya dan mengatasi tantangan pelaksanaannya.

Pada tahun 2016, sektor ini berkontribusi 29 persen dari PDB manufaktur, 24 persen ekspor manufaktur, dan menyerap 33 persen tenaga kerja sektor manufaktur. Jika dibandingkan dengan negara lain, sektor makanan dan minuman Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang besar karena didukung oleh sumber daya pertanian yang berlimpah dan permintaan domestik yang besar. Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya:

1. Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones.
2. Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka.
3. Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen.

-
4. Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Hampir seluruh sektor manufaktur Indonesia menghadapi tantangan yang serupa, mulai dari ketersediaan bahan baku domestik hingga kebijakan industri. Beberapa faktor yang menghambat industri Indonesia seringkali bersifat lintas sektoral. Oleh karenanya, Making Indonesia 4.0 memuat 10 inisiatif nasional yang bersifat lintas sektoral untuk mempercepat perkembangan industri manufaktur di Indonesia.

Inisiatif pertama, perbaikan alur aliran barang dan material Indonesia bergantung pada impor bahan baku maupun komponen bernilai tinggi, khususnya di sektor kimia, logam dasar, otomotif, dan elektronik. Indonesia akan memperkuat produksi lokal pada sektor hulu dan menengah melalui peningkatan kapasitas produksi dan percepatan adopsi teknologi. Indonesia akan mengembangkan rancangan jangka panjang untuk perbaikan alur aliran barang dan material secara nasional dan menyusun strategi sumber material.

Inisiatif kedua, desain ulang zona industri Indonesia telah membangun beberapa zona industri di penjuru negeri. Indonesia akan mengoptimalkan kebijakan zona-zona industri ini termasuk menyelaraskan peta jalan sektor sektor yang menjadi fokus dalam Making Indonesia 4.0 secara geografis, serta peta jalan untuk transportasi dan infrastruktur. Untuk mengoptimalkan penggunaan lahan, Indonesia akan mengevaluasi zona-zona industri yang ada dan akan membangun satu peta jalan zona industri yang komprehensif dan lintas industri. Inisiatif ketiga, mengakomodasi standar-standar keberlanjutan (sustainability) Komunitas global telah menyuarakan kekhawatiran terkait keberlanjutan di berbagai sektor. Indonesia melihat tantangan keberlanjutan sebagai peluang untuk membangun kemampuan keberlanjutan berbasis teknologi bersih, EV, biokimia, dan energi terbarukan. Oleh karenanya, Indonesia akan berusaha memenuhi persyaratan keberlanjutan di masa mendatang, mengidentifikasi aplikasi teknologi dan peluang pertumbuhan ramah lingkungan, serta mempromosikan lingkungan yang kondusif (termasuk peraturan, pajak dan subsidi) untuk investasi yang ramah lingkungan.

Inisiatif ke empat, memberdayakan UMKM Hampir 70 persen tenaga kerja Indonesia bekerja untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendukung pelaku usaha UMKM dengan membangun *platform e-commerce* untuk UMKM, petani dan pengrajin, membangun sentra sentra teknologi (*technology bank*) dalam rangka meningkatkan akses UMKM terhadap akuisisi teknologi, dan

memberikan dukungan mentoring untuk mendorong inovasi. Inisiatif ke lima, membangun infrastruktur digital nasional Untuk mendukung Peta Jalan Making Indonesia 4.0, Indonesia akan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital, termasuk internet dengan kecepatan tinggi dan digital capabilities dengan kerjasama pemerintah, publik dan swasta untuk dapat berinvestasi di teknologi digital seperti *cloud*, *data center*, *security management* dan infrastruktur *broadband*. Indonesia juga akan menyelaraskan standar digital, sesuai dengan norma-norma global, untuk mendorong kolaborasi antar pelaku industri sehingga dapat mempercepat transformasi digital.

Inisiatif ke enam, menarik minat investasi asing Indonesia perlu melibatkan lebih banyak pelaku industri manufaktur terkemuka untuk menutup kesenjangan teknologi dan mendorong transfer teknologi ke perusahaan lokal. Untuk meningkatkan FDI, Indonesia akan secara aktif melibatkan perusahaan manufaktur global, memilih 100 perusahaan manufaktur teratas dunia sebagai kandidat utama dan menawarkan insentif yang menarik, dan berdialog dengan pemerintah asing untuk kolaborasi tingkat nasional.

Inisiatif ke tujuh, peningkatan kualitas SDM adalah hal yang penting untuk mencapai kesuksesan pelaksanaan Making Indonesia 4.0. Indonesia berencana untuk merombak kurikulum pendidikan dengan lebih menekankan pada STEAM (*Science, Technology, Engineering, the Arts, dan Mathematics*), menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri di masa mendatang. Indonesia akan bekerja sama dengan pelaku industri dan pemerintah asing untuk meningkatkan kualitas sekolah kejuruan, sekaligus memperbaiki program mobilitas tenaga kerja global untuk memanfaatkan ketersediaan SDM dalam mempercepat transfer kemampuan.

Inisiatif ke delapan, pembangunan ekosistem inovasi adalah hal yang penting untuk memastikan keberhasilan Making Indonesia 4.0. Pemerintah Indonesia akan mengembangkan cetak biru pusat inovasi nasional, mempersiapkan percontohan pusat inovasi dan mengoptimalkan regulasi terkait, termasuk diantaranya yaitu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan insentif fiskal untuk mempercepat kolaborasi lintas sektor diantara pelaku usaha swasta/BUMN dengan universitas.

Inisiatif ke Sembilan, insentif untuk investasi teknologi Insentif memiliki potensi untuk menggerakkan inovasi dan adopsi teknologi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia akan mendesain ulang rencana insentif adopsi teknologi, seperti subsidi, potongan pajak perusahaan, dan pengecualian bea pajak impor bagi perusahaan yang berkomitmen untuk menerapkan teknologi 4IR. Selain itu, Indonesia akan meluncurkan dana investasi negara untuk dukungan

pendanaan tambahan bagi kegiatan investasi dan inovasi di bidang teknologi canggih. Dan inisiatif ke sepuluh, harmonisasi aturan dan kebijakan Indonesia berkomitmen melakukan harmonisasi aturan dan kebijakan untuk mendukung daya saing industri dan memastikan kordinasi pembuat kebijakan yang erat antara kementerian dan lembaga terkait dengan pemerintah daerah.

5.3.2 Sustainable Development Goals (SDGs)

Salah satu hasil utama dari Konferensi Rio+20, yang diselenggarakan di Rio de Janeiro pada bulan Juni 2012 adalah kesepakatan negara-negara anggota untuk memulai proses untuk mengembangkan satu set tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Hasil dari konferensi Rio+20 mengamanatkan 30 anggota *Open Working Group* (OWG) dari Majelis Umum PBB bertugas untuk mempersiapkan proposal SDGs. OWG sendiri didirikan pada tanggal 22 Januari 2013. Dalam perjalanannya negara-negara anggota OWG menyampaikan serangkaian usulan terkait SDGs. Pada pertemuan ketiga belas dan terakhir di New York pada tanggal 19 Juli 2014, OWG mengusulkan 17 tujuan yang mencakup isu-isu pembangunan berkelanjutan, termasuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, meningkatkan kesehatan dan pendidikan, membuat kota yang lebih berkelanjutan, memerangi perubahan iklim, dan melindungi hutan. Adapun 17 tujuan yang diusulkan tersebut adalah sebagai berikut:



Sumber: *sdgindonesia*, 2019

Gambar 5. 2 Sustainable Development Goals (SDGs) 2030

Selanjutnya 17 (tujuh belas) agenda ini dikenal sebagai agenda berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030. Kontribusi awal Indonesia dalam perumusan SDGs diawali oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyampaikan pidato terkait keikutsertaan Indonesia di dalam agenda SDGs. SDGs merupakan visi terhadap keadaan menyeluruh dunia pada tahun 2030. Kelahiran SDGs tidak lepas dari kritik tajam, mengingat target-target pencapaiannya yang lebih kompleks dan banyak dari MDGs. Dengan hanya memiliki 8 sasaran saja, tidak sedikit hal yang masih tersisa dari MDGs. MDG berfokus pada banyak dimensi kemiskinan, termasuk pendapatan rendah, kelaparan kronis, ketidaksetaraan gender, kurangnya sekolah, kurangnya akses ke fasilitas kesehatan, air bersih serta sanitasi. Lebih lanjut, ada konsensus bahwa ruang lingkup MDG perlu diperluas untuk mencerminkan tantangan yang dihadapi dunia saat ini. Menurut Bank Dunia, sekitar 700 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Masyarakat masih banyak yang mengalami perlakuan tidak setara bahkan ketika mereka berada dalam kemajuan ekonomi di negara masing-masing. Selain itu, seluruh dunia menghadapi ancaman lingkungan yang mengerikan dari perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia dan hilangnya keanekaragaman hayati. Pemerintahan yang buruk dan korupsi telah banyak menimbulkan konflik di beberapa belahan negara di dunia.

SDGs dinilai sebagai visi global yang terlalu ambisius. Namun, perspektif lain beranggapan bahwa justru, sisi ambisius ini lah yang dibutuhkan untuk dapat “memaksa” semua pihak untuk turut menyelesaikan tantangan pembangunan dunia yang besar, seperti ketimpangan dan kerusakan lingkungan (ODI, 2015). Selain itu, perbedaan prinsip penyusunan antara SDGs dan MDGs memberikan harapan bahwa dunia akan bertransformasi menjadi tempat yang lebih baik untuk ditinggali. Secara prinsip, MDGs fokus terhadap permasalahan pembangunan di negara-negara berkembang dan tertinggal, dimana negara-negara maju lebih banyak berperan sebagai pendonor (ODI, 2015; Sachs, 2015). Di sisi lain, prinsip utama SDGs adalah berlaku universal, dengan sasaran-sasaran pembangunan yang berlaku untuk semua negara tertinggal, berkembang dan maju, beserta setiap warga negaranya.

Agenda SDGs 2030 menyepakati bahwa kerangka kerja pelaksanaan pembangunan berkelanjutan harus mempertimbangkan lima dimensi fundamental utama yang dikenal sebagai 5P yaitu : manusia (*people*), planet, kemakmuran (*prosperity*), perdamaian (*peace*) dan kemitraan (*partnership*). Pilar 5P ini dapat diartikan sebagai berikut, *People*: SDGs hadir untuk memastikan bahwa semua manusia terbebas dari kemiskinan, kelaparan, memiliki kedudukan yang setara dan mendapatkan hak untuk hidup didalam lingkungan yang sehat secara bermartabat. *Planet*: SDGs berupaya untuk melindungi bumi dari dampak buruk akibat

kegiatan manusia, seperti perubahan lingkungan dan penggunaan sumber daya alam yang tak bertanggung jawab, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masa depan. SDGs juga berkomitmen untuk melindungi planet serta mengambil tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim. *Prosperity*: SDGs hadir untuk memastikan semua umat manusia memiliki kehidupan yang sejahtera, berkecukupan dan dapat hidup secara harmonis berdampingan dengan alam. Dunia harus beralih ke pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan yang tidak menghabiskan sumber daya alam untuk generasi mendatang, dan yang mendorong kemakmuran bagi semua. *Peace*: tidak ada pembangunan berkelanjutan tanpa perdamaian dan keamanan sosial, dan sebaliknya, tidak ada perdamaian dan keamanan sosial tanpa pembangunan berkelanjutan. *Partnership*: keberhasilan pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalaui kerjasama global yang erat dengan asas solidaritas yang tinggi. Pemerintah harus berkoordinasi dengan seluruh aktor, seperti pemerintah lokal, badan regional dan internasional, pelaku bisnis serta organisasi masyarakat sipil.

Seperti yang sudah dibahas di atas, SDGs merupakan visi global bersama yang mewakili kepentingan semua pihak atau yang dikenal dengan prinsip universal. Sebagai tambahan, negara-negara yang hadir di dalam the UN *Sustainable Development Summit* sepakat bahwa SDGs merupakan perjalanan bersama hingga 2030 dan berikrar bahwa tidak akan ada satu negara pun yang tertinggal. Hal ini merupakan prinsip SDGs yang dikenal dengan *no one is left behind*. Prinsip ini semakin menunjukkan bahwa SDGs harus dipandang sebagai visi bersama, bukan visi ambisius yang hanya menguntungkan segelintir pihak saja. Prinsip SDGs lainnya adalah sasaran pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi secara holistik. Berbeda dengan MDGs yang keterkaitan antar tujuannya kurang diperhatikan, 17 tujuan SDGs disusun dengan telah mengindahkan aspek keterkaitan antar tujuan. Dengan kata lain, upaya untuk mencapai sebuah tujuan, tidak akan terlepas dari upaya untuk mencapai tujuan yang lainnya. *Le Blanc* (2015) menjelaskan bahwa banyaknya tujuan SDGs sebaiknya dinilai sebagai sebuah jaringan yang terintegrasi secara holistik, bukan suatu hal yang kompleks dan berdiri sendiri.

Dengan berbekal pengalaman dari implementasi MDG, Indonesia terus berusaha menghindari keterlambatan implementasi SDGs. Oleh karena itu, Indonesia sebagai salah satu negara yang turut mendukung kelahiran SDGs/TPB pada pertemuan pembangunan berkelanjutan PBB, tentunya harus konsisten berkomitmen menjalankannya dengan mulai menyusun payung aturan yang dapat dijadikan sebagai rujukan pelaksanaan SDGs/TPB. Berbagai langkah strategis telah dijalankan, diantaranya adalah pembentukan sekretariat

SDGS/TPB yang bertugas menyusun strategi nasional berkaitan dengan SDGS/TPB, dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan terkait pelaksanaan SDGs di Indonesia. Selanjutnya, seperti diuraikan BPS (2016), berbagai langkah strategis juga sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, diantaranya:

1. Melakukan pemetaan antara tujuan dan target SDGs dengan prioritas pembangunan nasional;
2. Melakukan pemetaan ketersediaan data dan indikator SDGs pada setiap target dan tujuan termasuk indikator proksi;
3. Melakukan penyusunan definisi operasional untuk setiap indikator SDGs;
4. Menyusun peraturan presiden terkait dengan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan;
5. Mempersiapkan rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah terkait dengan implementasi SDGs di Indonesia.

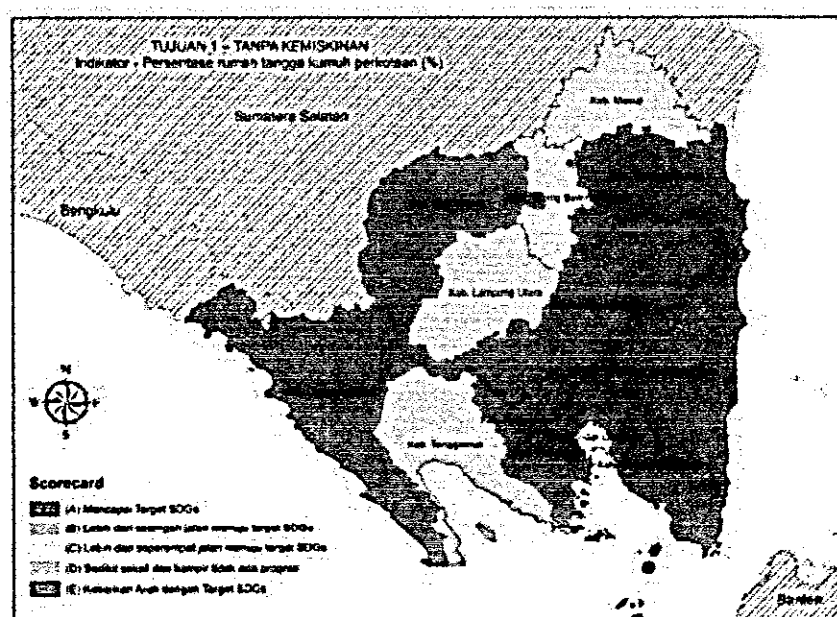
Pemerintah Indonesia juga sudah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dalam pelaksanaannya, pemerintah Indonesia juga telah melakukan berbagai proses mengarus-utamakan SDGs pada RPJM dan RPJP. Selain itu, pelibatan dari berbagai aktor strategis non-pemerintah seperti akademisi, pakar, organisasi masyarakat sipil dan filantropi dan bisnis telah dilakukan dalam berbagai proses persiapan pelaksanaan SDGs di Indonesia. Peran akademisi menjadi penting dalam pencapaian SDGS/TPB di tahun 2030, dengan antara lain melalui proses edukasi pemimpin di masa yang akan datang yang akan menjadi aktor SDGS/TPB, menyediakan ilmu pengetahuan melalui riset dan inovasi untuk membantu pencapaian SDGS/TPB. Sedangkan pelaksanaan SDGS/TPB pada level pemerintah daerah diatur pada Perpres 59 tahun 2017 dimana disebutkan bahwa tugas daerah dalam SDGS/TPB adalah:

1. Penyusunan rencana aksi daerah (RAD) untuk 5 tahunan oleh Gubernur bersama-sama dengan Bupati/Walikota dengan melibatkan organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya.
2. Mekanisme koordinasi penyusunan, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan RAD SDGS/TPB 5 tahunan ditetapkan dengan peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dengan demikian pemerintah daerah harus menyiapkan dukungan kebijakan, regulasi, anggaran dan program; Pemetaan dan integrasi target dan indikator TPB/SDGs nasional ke

dalam RPJMD; Peningkatan kapasitas Pemda dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan SDGS/TPB; Sosialisasi/diseminasi, komunikasi dan advokasi kepada seluruh masyarakat dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah penyiapan data dan informasi. Penyusunan indikator nasional untuk SDGs dilakukan dengan koordinasi terpusat oleh Bappenas bersama Badan Pusat Statistik sebagai penyedia data nasional. Penyusunan indikator nasional dilakukan melalui proses diskusi dan konsultasi publik dengan berbagai pihak, diantaranya kementerian/lembaga terkait, kelompok masyarakat sipil, akademisi, filantropi, serta pelaku bisnis dan usaha. Penyiapan data dan informasi menjadi poin penting dalam pelaksanaan dan penyusunan RAD. Dengan demikian penyusunan baseline study dari indikator SDGS/TPB di daerah menjadi suatu keniscayaan.

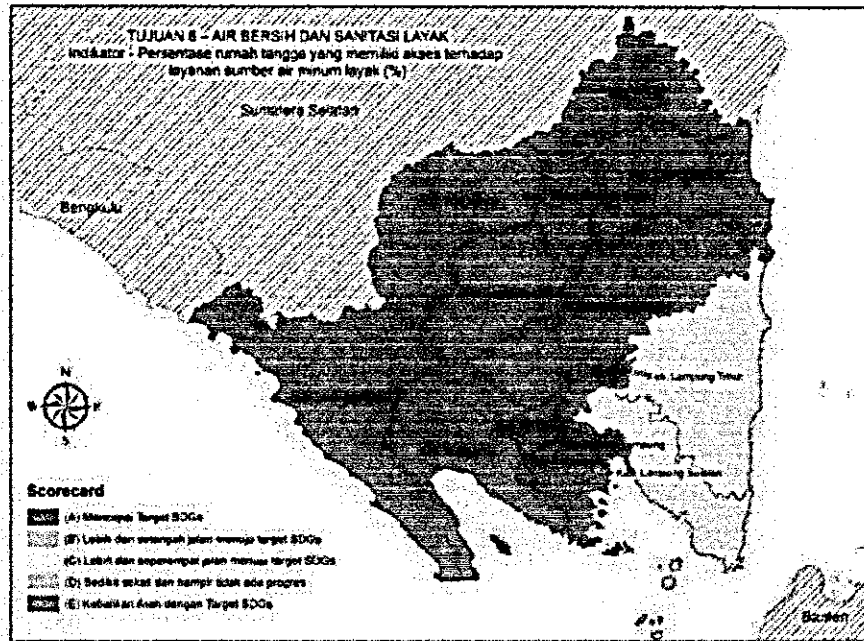
Jika melihat hasil kajian pencapaian SDGs di Provinsi Lampung (SDGs Centre UNPAD 2019), Kabupaten Pringsewu dapat dikatakan berada dalam kondisi yang relatif baik pada beberapa indikator. Pertama, terkait dengan tingkat kemiskinan, persentase rata-rata rumah tangga kumuh di Kabupaten ini berkisar antara 2-3%, yang diasumsikan akan semakin menurun pada periode tahun 2030 ke depan. Hal ini lebih baik dari pencapaian dan proyeksi di beberapa Kota/Kabupaten lain, seperti Tanggamus, Lampung Utara dan Tulang Bawang Barat yang memiliki rata-rata penduduk rumah tangga miskin berkisar pada level di atas 10%. Persentase rumah tangga kumuh di Provinsi Lampung dapat di lihat pada Gambar berikut:



Sumber: *sgindonesia, 2019*

Gambar 5. 3 Rumah Tangga Miskin Kabupaten Pringsewu Dalam Konstelasi Provinsi

aksesibilitas terhadap drainase, sanitasi, sumber energi, dan infrastruktur dasar lainnya. Kondisi di Pringsewu secara relatif terhadap daerah lain dapat dilihat di bawah ini:



Sumber: *sdgindonesia, 2019*

Gambar 5. 5 Akses Air Bersih Rumah Tangga Kabupaten Pringsewu

Secara keseluruhan pendapatan perkapita masyarakat di Kabupaten Pringsewu juga masih relatif rendah. Nilainya adalah tiga terendah se provinsi lampung yakni hanya 21 juta rupiah per kapita dibandingkan dengan rata-rata nasional yang mencapai 31 juta rupiah per kapita. Hal ini diperkirakan terjadi karena kurangnya fokus terhadap pengembangan sektor ekonomi unggulan di Kabupaten. Sejauh ini beberapa sektor yang dianggap sudah mendominasi dibiarkan untuk dikembangkan secara konvensional alih-alih dimutakhirkan dengan teknologi pendukung.

5.3.3 Isu Strategis Provinsi Lampung dan Kabupaten Pringsewu

RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 menjelaskan bahwa penyelenggaraan pembangunan Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2015–2019 telah membuahkan hasil yang diharapkan, namun demi pembangunan kedepan masih terdapat persoalan dan tantangan dari berbagai aspek baik sosial maupun ekonomi yang dirumuskan sebagai permasalahan pembangunan. Tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja

pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Beberapa hal yang tercatat perlu diperhatikan di dalam pembangunan daerah antara lain sarana prasarana dasar seperti air dan sanitasi, keamanan sosial, kondisi ekonomi, dan tata Kelola pemerintahan. Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses Air Minum layak dan aman di Tahun 2018 adalah sebesar 71,19%. Persentase rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi di Tahun 2018 adaah sebesar 64,63%. Persentase Rumah tidak Layak huni di Tahun 2018 adalah 5,02%. Persentase Penduduk Miskin pada Maret 2019 sebesar 12,62 persen, menurun 1,73 poin dibanding Sept 2015 yang sebesar 14,35 persen tetapi masih berada di bawah Nasional sebesar 9,41 persen. Indeks Pembangunan Manusia yang ada di Provinsi Lampung pada Tahun 2018 telah berjalan dengan realisasi sebesar 69,02 tetapi masih di bawah capaian Nasional sebesar 71,39 di tahun yang sama. Provinsi Lampung mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi di Tahun 2018 sebesar 5,25%, berada di atas Nasional (5,17%) dan rata-rata Sumatera (4,54%). Meski dengan capaian yang tinggi, pertumbuhan tersebut stagnan di angka 5% untuk 5 (lima) tahun ke belakang, di samping itu angka kemiskinan masih cukup tinggi. Persentase Penduduk Miskin pada Maret 2019 sebesar 12,62 persen, menurun 1,73 poin dibanding Sept 2015 yang sebesar 14,35 persen tetapi masih berada di bawah Nasional sebesar 9,41 persen.

Provinsi Lampung merupakan provinsi berpenduduk kedua terbesar di Pulau Sumatera dimana 15 orang dari 100 orang penduduk Pulau Sumatera bertempat tinggal di Provinsi Lampung. Memasuki tahun 2014 Lampung memasuki bonus demografi yang ditandai dengan jumlah persentase rasio ketergantungan (dependency ratio) penduduk yang berada dibawah angka 50%. Keuntungan bonus demografi tersebut adalah ketersediaan tenaga kerja usia produktif sebagai sumber daya penopang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Namun keuntungan tersebut harus dapat disikapi melalui program dan kegiatan pendukung peningkatan kapasitas SDM dan penyediaan lapangan pekerjaan; agar bonus demografi tersebut tidak menjadi bencana berupa ledakan pengangguran pada usia produktif. Di sisi yang lain,

Posisi strategis Provinsi Lampung yang berada pada alur laut kepulauan Indonesia dan menjadi pintu gerbang Sumatera, menyebabkan Provinsi Lampung memiliki keuntungan dan tantangan tersendiri yang harus dimanfaatkan secara maksimal demi tercapainya pembangunan daerah yang optimal, melalui pembangunan sektor infrastruktur, sektor perhubungan dan sektor Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Panjang garis pantai Provinsi Lampung lebih kurang 1.105 km, yang membentuk 4 (empat) wilayah pesisir, yaitu

Pantai Barat (210 km), Teluk Semangka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km), memiliki potensi perekonomian baik dari sektor perikanan, pariwisata maupun perhubungan yang perlu dikelola dengan baik bagi peningkatan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat pesisir dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;

Pembangunan jalan tol trans Sumatera yang dimulai pada tahun 2015 memberikan dampak akan menurunnya biaya logistik yang berdampak pada kenaikan volume perdagangan dan investasi yang akan mendorong penyerapan tenaga kerja dan kenaikan pendapatan masyarakat. Untuk menambah dampak pembangunan tol terhadap peningkatan kesejahteraan khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), bila disertai pembangunan infrastruktur konektivitas pendukung yang diarahkan pada kawasan produksi dan pasar serta memperkuat infrastruktur pertanian; Perekonomian global meningkat secara gradual, peluang ekspor Lampung untuk dapat meningkat namun hingga saat ini komoditi ekspor Lampung hanya terpaku pada komoditi batubara, CPO, Karet dan kopi, hal ini menyebabkan ekspor Lampung rentang terhadap fluktuasi. Hal ini harus segera diatasi melalui diversifikasi baik komoditi maupun negara tujuan ekspor; Semakin maraknya penggunaan teknologi digital, meningkatkan e-commerce pada dunia perdagangan yang dapat berdampak meningkatnya daya kreatifitas masyarakat dalam membentuk suatu produk baru dengan cara pemasaran yang lebih baik sehingga menumbuhkan industri usaha kecil menengah. Namun maraknya e-commerce berdampak juga pada penurunan tenaga kerja dan kompleksitas risiko sektor keuangan.

Terdapat ketimpangan wilayah Timur – Barat, Utara – Selatan dan Darat – Laut/Pesisir di Provinsi Lampung. Wilayah Timur dan Selatan Lampung berkembang cukup pesat dibanding wilayah Barat dan Utara Lampung. Wilayah Barat memiliki kondisi topografi yang cukup berat dan sebagian besar wilayahnya diperuntukkan untuk kawasan konservasi sedangkan wilayah utara lebih kepada masalah aksesibilitas yang kurang mendukung. Daerah pesisir dan pedesaan termasuk daerah produksi hasil pertanian maupun perikanan ternyata justru menjadi kantong-kantong kemiskinan yang harus menjadi prioritas untuk ditangani. Secara teoritis, angka kesenjangan di Provinsi Lampung yang diukur melalui Indeks Williamson masih berada pada tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah yang rendah yaitu sebesar 0,21 di Tahun 2017, tetapi kecenderungannya terjadi peningkatan ketimpangan dari Tahun 2014 yang hanya sebesar 0,19.

Di Kabupaten Pringsewu sendiri, pembangunannya tidak terlepas dari kebijakan yang ada di tingkat provinsi, nasional dan internasional. Pada saat ini berbagai kebijakan

internasional, telah diratifikasi Pemerintah Indonesia, yang juga akan berdampak pada pembangunan di daerah. Sementara itu pada saat yang bersamaan, di level nasional dan provinsi juga telah menetapkan beberapa kebijakan strategis yang akan berdampak di level daerah. Oleh karena itu maka diperlukan rumusan isu-isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Pringsewu berdasarkan kinerja daerah dan kondisi masyarakat serta juga memperhatikan berbagai isu-isu internasional, nasional maupun regional yang merupakan ancaman dan tantangan masa kini maupun masa mendatang agar dapat disusun perencanaan pembangunan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan.

Beberapa pembangunan yang akan terkait dengan Kabupaten Pringsewu antara lain mulai dari infrastruktur jalan dan bendungan, pengembangan Kawasan ekonomi dan lain-lain. Pembangunan jalan tol Trans Sumatera, diantaranya adalah ruas Bakauheni – Terbanggi Besar sepanjang 140,93 km yang berada di Provinsi Lampung, dengan total anggaran mencapai Rp. 16.8 triliun. Keberadaan jalan tol tersebut akan memperlancar arus barang dan orang yang sangat dinamis. Keberadaan Kabupaten Pringsewu sebagai daerah penyangga wilayah metropolitan Bandar Lampung, juga akan membuat akses jalan untuk masuk ke pintu tol, sehingga dapat mempermudah dan mempercepat arus masuk dan keluar barang atau orang, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu maka diperlukan persiapan untuk mengambil manfaat yang lebih besar terhadap keberadaan jalan tol tersebut. Pembangunan kawasan industri yang berada di Kabupaten Tanggamus, akan dapat merubah pola hidup masyarakat sekitar, termasuk di warga masyarakat Kabupaten Pringsewu. Hal ini dikarenakan adanya jalan negara yang dapat menghubungkan langsung dari Kabupaten Pringsewu menuju kawasan industri maritim tersebut, sehingga mobilitas barang dan jasa akan meningkat tajam. Apalagi dalam kawasan industri maritim tersebut juga akan diperlukan banyak tenaga kerja, keahlian tertentu dan sarana kebutuhan hidup. Oleh karena itu maka masyarakat Kabupaten Pringsewu juga perlu turut andil di dalamnya. Kabupaten Pringsewu menjadi salah satu pelaksanaan program strategis nasional dalam bidang ketahanan pangan nasional, yaitu dengan adanya pembangunan Bendungan Way Sekampung yang berada di Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu. Fungsi utama dari keberadaan bendungan tersebut adalah untuk mengaliri lahan pertanian di Provinsi Lampung. Meski demikian, karena letaknya di Kabupaten Pringsewu, maka pemerintah daerah setempat juga perlu mengambil manfaat yang lebih besar terhadap keberadaannya. Diantaranya adalah dengan menjadikannya sebagai tempat wisata yang mampu untuk menggerakkan

perekonomian daerah. Selain itu juga perlu dipersiapkan sarana dan prasarana pendukungnya, baik yang menyangkut infrastruktur maupun kualitas sumberdaya manusianya.

Beberapa hal yang masih menjadi tantangan di Kabupaten Pringsewu antara lain pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran. Masalah kemiskinan menjadi komitmen pemerintah untuk menanggulangnya. Terlebih persentase kemiskinan di Provinsi Lampung masih di atas rata-rata nasional. Angka Kemiskinan Kabupaten Pringsewu secara persentase menunjukkan penurunan, namun masih berada di atas rata-rata nasional yaitu 11,73% (2016), meskipun lebih kecil dibandingkan rata-rata provinsi. Penduduk miskin di Kabupaten Pringsewu hingga tahun 2016 masih berjumlah 45.720 jiwa. Namun secara persentase terdapat penurunan, namun pada tahun 2016 terjadi peningkatan persentase penduduk Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dari 55,87% (2015) menjadi 68,37% (2016). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu tahun 2016 menunjukkan penurunan dari 5,22% (2015) menjadi 5,04% (2016). Penurunan ini akan berdampak pada perkembangan ekonomi makro wilayah Kabupaten Pringswu. Berdasarkan Analisis Location Quotion (LQ) Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi memiliki skor tertinggi yaitu 1,54 yang berarti menjadi sektor basis. Namun PDRB Perkapitanya berada pada posisi ke 13 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Ini mengindikasikan perputaran uang di kabupaten ini lebih sedikit, atau banyak terserap ke Lembaga keuangan (bank/non bank). Dengan mencermati kondisi tersebut sepertinya Pemerintah Kabupaten Pringsewu perlu serius dalam rangka menggairahkan dinamika perekonomian Kabupaten Pringsewu terutama pada sektor Industri Pengolahan, Perdagangan dan Jasa-jasa yang menyerap tenaga kerja banyak dengan memfasilitasi ke lembaga keuangan dan meminta lembaga keuangan untuk lebih meningkatkan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Serta membenahi prasarana dan sarana perdagangan sehingga suasana transaksi akan terasa aman dan nyaman. Adapun permasalahan yang masih dihadapi dalam pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat diantaranya adalah (a) pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami fluktuasi; (b) stabilitas harga kebutuhan pokok yang cenderung fluktuatif sekaligus berpengaruh menurunnya daya beli masyarakat; (c) belum optimalnya fungsi sarana dan prasarana perekonomian; (d) masih rendahnya investasi yang masuk ke Kabupaten Pringsewu; (e) Belum optimalnya dukungan Bank/Lembaga Keuangan pada sektor pertanian dalam arti luas, dan sektor riil serta UKMK.

Masih adanya beberapa desa atau dusun yang belum terjangkau listrik, perlu mendapatkan perhatian bagaimana pemenuhannya. Infrastruktur energi masih perlu ditingkatkan, dengan mengupayakan pembangunan jaringan listrik melalui sumber energi

alternatif, mikro hidro. Isu strategis infrastruktur jaringan irigasi yang menunjang peningkatan produktivitas pertanian juga menjadi hal penting untuk tetap dilakukan, dalam rangka mendukung kedaulatan pangan di Kabupaten Pringsewu. Infrastruktur teknologi informasi juga menjadi hal penting dalam rangka mendukung perwujudan desa sebagai pusat pertumbuhan. Pesatnya kemajuan teknologi dan cepatnya persebaran informasi perlu untuk dikelola dengan baik, melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien. Infrastruktur sosial yang berkaitan dengan prasarana perkantoran, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan seni budaya juga perlu diperhatikan dan sangat dibutuhkan. Pembangunan infrastruktur sosial diupayakan untuk dapat mencukupi kebutuhan masyarakat agar tercapai pelayanan yang lebih baik, lebih dekat, lebih murah dan terjangkau. Infrastruktur sosial tidak kalah penting dengan yang bersifat fisik, karena disamping kebutuhan jasmani kebutuhan rohani juga harus dipenuhi.

BAB VI

KONDISI PENGUATAN SIDA SAAT INI

6.1 Potensi Ekonomi dan Sektor Unggulan

Untuk mengidentifikasi produk unggulan sebagai potensi suatu daerah, upaya dapat dilakukan mulai dari kualitas dan kapasitas daerah dalam memproduksi barang dan jasa dengan segala aspeknya sampai dengan peranan produk tersebut terhadap keseluruhan barang dan jasa. Secara spesifik, peranan dalam produksi ini dapat dilihat dari struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi terkait. Struktur ekonomi menggambarkan besarnya peranan masing-masing sektor atau besaran kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB suatu daerah. Suatu sektor ekonomi yang memiliki peranan atau kontribusi yang cukup besar, akan menjadi andalan bagi peningkatan perekonomian pada wilayah tersebut. Dapat diketahui pula bahwa struktur ekonomi dapat menggambarkan sebagaimana daerah tersebut bergantung terhadap suatu sektor.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Pringsewu pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai sebesar 2,84 triliun atau 25,39 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan kontribusi pada tahun 2019. Lapangan usaha pemberi kontribusi terbesar kedua yaitu Industri Pengolahan yang mencapai 14,81 persen, sedikit menurun dari tahun sebelumnya sebesar 15,46 persen. Adapun sub kategori yang menyumbang peranan terbesar adalah industri makanan dan minuman, industri barang galian bukan logam dan industri karet, batang dari karet dan plastik. Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor memberikan kontribusi terbesar ketiga yang mencapai 1,53 triliun rupiah atau 13,68 persen, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 14,34 persen. Sementara peranan lapangan usaha lainnya hanya memberikan kontribusi yang cukup kecil yaitu tidak lebih dari 6 persen, kecuali untuk kategori Konstruksi yang memberikan kontribusi sebesar 1,31 triliun rupiah atau 11,72 persen. Salah satu penyebab menurunnya peranan Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor adalah adanya pandemi covid-19 yang berdampak langsung pada kegiatan kedua lapangan usaha tersebut. Pemetaan sektor-sektor unggulan ini dapat dilihat pada sub-bab berikut.2w

6.1.1 Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Sebagai salah satu daerah agraris di Provinsi Lampung, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi sektor dengan kontribusi tertinggi terhadap PDRB Kabupaten Pringsewu. Sektor ini telah membawa manfaat besar bagi perekonomian Kabupaten Pringsewu dalam berbagai aspek, seperti menciptakan angka tenaga kerja dan kemampuan untuk menyediakan pangan yang murah bagi masyarakat. Tentunya Kabupaten Pringsewu memiliki komoditas yang diunggulkan, yang dapat dilihat dari produksi terbanyak dari masing-masing kelompok komoditas.

Tabel 6. 1 Produksi Panen Tanaman Pangan Kabupaten Pringsewu

No	Uraian	Produksi Panen Padi dan Bahan Pangan Utama (Ton)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Padi	156.889	138.009	138.421	112.699	130.867
2	Jagung	30.353	40.326	34.260	44.696	45.615
3	Kedelai	181	647	1.319	1.182	193
4	Kacang Tanah	182	66	64	14	23
5	Kacang Hijau	21	23	273	16,53	13
6	Ubi Jalar	1.296	363	829	794	323
7	Ubi Kayu	16.360	3.852	23.301	14.771	15.294

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu, 2021

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil produksi panen tanaman pangan Kabupaten Pringsewu mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap komoditasnya. Apabila melihat secara keseluruhan, padi menjadi komoditas yang paling unggul dibandingkan bahan pangan lainnya dengan angka produksi panen mencapai 130.867 ton pada tahun 2020. Kabupaten Pringsewu memiliki sentra padi organik yang sebagian besar dikembangkan dengan menggunakan pupuk kompos dan pestisida nabati sehingga memiliki cita rasa dan harga jual yang lebih tinggi. Sentra padi organik ini telah ada di Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Gadingrejo, dan Kecamatan Pringsewu. Terdapat juga kelompok tani yang sudah tersertifikasi organik oleh lembaga resmi Indonesian Organic Farming Certification (INOFICE) yaitu Kelompok Tani Sejahtera dan Kelompok Tani Manunggal yang sudah berdiri sejak tahun 1975 (Juliantika, 2018).

Selain tanaman pangan, Kabupaten Pringsewu juga memiliki komoditas yang dapat diunggulkan pada kelompok tanaman sayur-sayuran.

Tabel 6. 2 Produksi Panen Sayur-Sayuran Kabupaten Pringsewu

No	Uraian	Produksi Sayur-Sayuran di Kabupaten Pringsewu (Kwintal)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Bawang Daun	921	333	631	536	5.325
2	Petsai/sawi	661	3.476	682	1.575	3.341
3	Cabe	4.630	10.120	8.743	41.907	79.924
4	Terong	3.963	4.501	3.855	7.258	37.480
5	Tomat	1.890	2.388	1.353	1.777	62.671
6	Mentimun	1.623	4.097	2.667	5.465	4.691
7	Kacang Panjang	1.736	2.937	2.338	1.315	3.226
8	Buncis	1	1	270	70	93
9	Kangkung	527	4.031	1.899	3.817	3.287
10	Bayam	298	3.034	1.918	2.300	2.042

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu, 2021

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil produksi sayur-sayuran di Kabupaten Pringsewu dominan meningkat hingga tahun 2020 pada masing-masing komoditasnya. Komoditas dengan produksi terbanyak adalah cabai dengan angka produksi 79.924 Kwintal pada tahun 2020. Adapun kecamatan yang memiliki sumbangsi tertinggi dalam angka produksi cabai pada tahun 2020 adalah Kecamatan Pardasuka dengan produksi cabai 43.275 kwintal dan Kecamatan Adiluwih dengan produksi cabai 33.724 kwintal.

Komoditas yang diunggulkan dari kelompok buah-buahan Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. 3 Produksi Panen Buah-Buahan Kabupaten Pringsewu

No	Uraian	Produksi Buah-Buahan di Kabupaten Pringsewu (Kwintal)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Alpukat	290	235	910	2.363	30.802
2	Mangga	1.392	516	8.549	13.828	24.211
3	Rambutan	123	0	244	1.755	1.162
4	Durian	12	152	139	1.300	4.589
5	Jambu Biji	150	24	509	19.050	8.354
6	Sawo	358	1.200	528	7.254	37.918
7	Pepaya	2.316	4.457	4.675	27.213	97.960
8	Pisang	8.275	89.004	7.127	73.024	253.956
9	Belimbing	88	5	85	439	2.469
10	Nangka	1.353	400	189	1.738	27.547
11	Sirsak	237	282	155	647	8.865
12	Sukun	446	184	520	1.462	1.704

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu, 2021

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil produksi panen buah-buahan Kabupaten Pringsewu mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap komoditasnya. Apabila melihat secara keseluruhan, buah pisang menjadi komoditas yang paling unggul dibandingkan buah-buahan lainnya dengan angka produksi mencapai 253.956 ton pada tahun 2020.

6.1.2 Sektor Industri Pengolahan

Dalam bidang industri, Kabupaten Pringsewu didominasi oleh industri kecil juga industri rumahan, diantaranya jenis industri makanan ringan, kerajinan tradisional, serta industri kreatif. Adapun industri tersebut ialah sentra industri keripik pisang, keripik singkong, kain tapis, manik-manik, kain perca, kerajinan anyaman bambu, industri batu bata, genteng, dan lain-lain.

Dari data Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan, pada tahun 2020 Kabupaten Pringsewu memiliki 59 industri kecil dan 207 industri rumahan atau rumah tangga yang tersebar di seluruh kecamatan.

Tabel 6. 4 Jumlah Industri Kecil dan Industri Rumahan Kabupaten Pringsewu

Jenis Industri	Jumlah Industri tahun 2020
Kerajinan Tapis	68
Makanan	82
Kain perca	13
Batik	5
Batu bata/Genteng	8
Kopi Bubuk	27
Lainnya	63
Industri Kecil	59
Industri Rumah Tangga	207
Total Industri	266

Sumber: Diskoperindag Kabupaten Pringsewu, 2021

Industri terbanyak yang ada di Kabupaten Pringsewu adalah industri makanan dengan jumlah 82 usaha industri (keripik pisang, keripik tempe, kue, keripik ubi, rempeyek, dan lain-lain). Selanjutnya adalah industri kerajinan tapis dengan jumlah 68 usaha industri. Industri kain perca Pringsewu berpusat di Kecamatan Banyumas telah mampu menembus pasar di seluruh Sumatera dan Jawa.

6.1.3 Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor

Sektor Perdagangan menjadi sektor dengan kontribusi terbesar ketiga terhadap PDRB Kabupaten Pringsewu. Adapun bidang perdagangan yang dimiliki Kabupaten Pringsewu adalah bisnis retail (perdagangan sembako, outlet, minimarket, supermarket, dept. store, retailwaralaba : Indomaret & Alfamart) dan perdagangan hasil bumi.

Sampai dengan tahun 2020, Kabupaten Pringsewu telah memiliki 31 pasar tradisional dan 57 toko swalayan yang tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Pringsewu.

Tabel 6. 5 Jumlah Perdagangan Kabupaten Pringsewu

Kecamatan	Jumlah Sarana Perdagangan tahun 2020		
	Supermarket	Minimarket	Pasar Tradisional
Pardasuka	-	2	3
Ambarawa	1	3	3
Pagelaran	-	6	4
Pagelaran Utara	-	-	2
Pringsewu	2	21	6
Gadingrejo	-	12	7
Sukoharjo	-	4	2
Banyumas	-	2	2
Adiluwih	-	3	2
Total	3	54	31

Sumber: Diskoperindag Kabupaten Pringsewu, 2021

Kecamatan Pringsewu merupakan kecamatan yang memiliki sarana perdagangan terbanyak dengan 2 supermarket, 21 minimarket, dan 6 pasar tradisional. Kabupaten Pringsewu tidak hanya memiliki bidang perdagangan bisnis retail, akan tetapi juga perdagangan hasil bumi yaitu pada distribusi sarana produksi pertanian/perikanan/peternakan (saprotan/saprokan/sapronak termasuk pupuk, obat-obatan, pakan ikan/ternak).

6.1.4 Dukungan OPD Terhadap Potensi Ekonomi dan Sektor Unggulan

Pada era saat ini tentunya setiap wilayah termasuk Kabupaten Pringsewu dihadapkan tantangan kemajuan ilmu pengetahuan dan globalisasi. Terlebih revolusi industri dan society 5.0 yang telah hadir karena teknologi yang semakin berkembang, penting untuk suatu wilayah membentuk networking. Dalam hal ini untuk membawa fondasi seperti pertumbuhan ekonomi yang telah bergeser dari ekonomi berbasis industri (*industrial-based economy*) menuju pencapaian tahapan ekonomi yang berbasis pengetahuan/inovasi (*knowledge-based/innovation-driven economy*). Kabupaten Pringsewu memberikan perhatian khusus kepada sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap PDRB. Hal ini dibuktikan dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu, salah satunya binaan kepada kelompok tani. Jumlah penerima bantuan juga kelompok tani yang diberikan binaan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu terus meningkat hingga tahun 2020.

Tabel 6. 6 Cakupan Bina Kelompok Tani

Bidang	2016	2017	2018	2019	2020
Tanaman Pangan Hortikultura	668	655	671	713	758
Peternakan Kesehatan Hewan					
Perkebunan	6	10	11	10	8
Sarana Prasarana	10	7	8	5	5
Total Penerima Bantuan	684	672	690	728	766
Jumlah Kelompok Tani	834	866	902	950	966

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu, 2021

Pada tahun 2020, juga mulai dilakukan penyusunan dokumen kajian peningkatan perekonomian Kabupaten Pringsewu sektor pertanian tahun 2020, disebutkan pada latar belakang penyusunan dokumen bahwa terdapat masalah perekonomian yang teridentifikasi yaitu sektor pertanian yang merupakan kontributor pertama dalam pembentukan PDRB Kabupaten Pringsewu, namun memiliki tren pertumbuhan yang terus menurun. Dari masalah ini, muncul perumusan Grand Strategy Research and Development (R&D) pada penciptaan teknologi dan inovasi pertanian. Selanjutnya disebutkan juga bahwa tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Pringsewu adalah tertinggi ke-4 di Provinsi Lampung, didominasi oleh angkatan kerja dengan tingkat Pendidikan menengah. Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang pertanian yang diselaraskan dengan teknologi dan inovasi pertanian yang diciptakan.

Pada tahun 2021, di bidang industri pengolahan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan penyusunan statistik Ekonomi Kreatif melalui pendataan Survei perusahaan/usaha Industri Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Siparekraf). Dalam survey ini, dikumpulkan berbagai data terutama pada sektor usaha pariwisata yang bergerak di 8 subsektor, antara lain Usaha Jasa Transportasi Wisata, Usaha Jasa Perjalanan Wisata, Usaha MICE, Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata, Usaha Pramuwisata, dan Usaha SPA, serta 16 subsektor Ekonomi Kreatif yang terdiri dari subsektor arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fotografi, kriya, kuliner, musik, fashion, aplikasi dan game developer, penerbitan, periklanan, televisi dan radio, seni pertunjukan, seni rupa serta film, animasi, dan video. Pada sektor industri dilakukan binaan terhadap UMKM yang diwadahi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pringsewu. Pelaku usaha bisa melakukan registrasi UMKM binaan melalui website Diskoperindag.

Pada umumnya, beberapa OPD di Pringsewu sudah memiliki program-program yang mendukung keberlangsungan kegiatan ekonomi Kabupaten Pringsewu. Terdapat juga program inovasi yang telah dibuat untuk mengoptimalkan potensi dan sektor unggul ekonomi. Namun masih perlu adanya lembaga khusus atau program yang dapat mengintegrasikan untuk mengontrol, menjamin keefektifan dan keberlanjutan program-program tersebut. Kegiatan Inovasi Daerah telah tersusun dalam SK Bupati Pringsewu No. B/88/KPTS/B.01/2020 tentang Nama-Nama Kegiatan Inovasi Daerah ke Dalam Suatu Keputusan Bupati Pringsewu.

Tabel 6. 7 Kegiatan Inovasi Daerah Kabupaten Pringsewu

No	Uraian Nama Kegiatan/Inovasi	Perangkat Daerah/Instansi
1	Usaha Ekonomi Kreatif	Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu
2	Inovasi Pengolahan Bonggol Pisang (Bonpis)	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu
3	Pengolahan Cabai Sortir menjadi Cabai Bubuk	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu
4	Demapan (Pengembangan Desa Mandiri Pangan) Kabupaten Pringsewu	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu
5	Diversifikasi Tanaman Pangan dalam Rangka Meningkatkan Produksi Pangan Lokal Kabupaten Pringsewu	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu
6	Pangan Lestari	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu
7	Bela Beli Produk Pringsewu	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu

No	Uraian Nama Kegiatan/Inovasi	Perangkat Daerah/Instansi
8	Sentra IKM (Industri Kecil dan Menengah Pringkuning Semi Tulung Agung	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu
9	Pembinaan dan Promosi Kerajinan Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu
10	Pelatihan Kemasan, Perijinan dan Pemasaran	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu
11	Pelatihan Kerajinan Anyaman	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu
12	Pelatihan Pengolahan Kopi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu
13	Partisipasi dalam Inacraft	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu
14	Pelatihan Souvenir Kain Perca	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu
15	Agronomi Wisata Taman Sabin Wonodadi Gading Rejo	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu
16	Pembentukan dan Pembinaan POKDARWIS di Kabupaten Pringsewu	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu
17	Pelatihan Perencanaan Wisata Alam POKDARWIS Pringsewu Bersahaja	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu
18	Pengendalian Pengawasan Perikanan	Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu

No	Uraian Nama Kegiatan/Inovasi	Perangkat Daerah/Instansi
19	Pelatihan dan Sosialisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu
20	Pelatihan dan Sosialisasi Perikanan Budidaya dan Tangkap	Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu
21	Pemberian Bantuan Benih Ikan Gurame dalam Rangka Pengembangan Budidaya Ikan dan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu	Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu
22	Asuransi Nelayan Berjaya	Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu
23	Peningkatan Kualitas Produksi Tembakau	Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu
24	Peremajaan Tanaman Kakao dan Lada	Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu
25	Pemberdayaan P3A	Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu
26	Monitoring Evaluasi dan Penerapan Pupuk dan Pestisida	Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu
27	Penerapan Menggunakan Pupuk Organik	Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu
28	Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP) Bantuan Premi AUTP	Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu
29	Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna	Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu
30	Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian Modern Becoco Tanam	Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu
31	Penyediaan Sarana Pengolahan Lahan mendukung Upsus	Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu

No	Uraian Nama Kegiatan/Inovasi	Perangkat Daerah/Instansi
32	Pengembangan Budidaya Peternakan	Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu
33	Pemeliharaan Kesehatan Ternak	Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu
34	Pencegahan dan Pengendalian Rabies	Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu
35	Pelayanan Kesehatan Hewan	Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu
36	Pendampingan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)	Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu
37	Pengembangan Ternak Kelinci	Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu
38	Sosialisasi Peningkatan Konsumsi Protein Hewani	Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu
39	Penerapan Higiene Sanitasi pada Unit usaha Pangan Asal Hewan	Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu
40	Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Penyakit Zoonosis	Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu
41	Pembinaan dan Pengawasan Pangan Asuh	Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu
42	Pengembangan Kawasan Hortikultura (Cabai)	Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu
43	Pengembangan Kawasan Hortikultura (Bawanag Merah)	Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu
44	Penumbuhan Brigade Proteksi TPH Melalui Kelompok	Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu

- g. organisasi kemasyarakatan di daerah, dilakukan dengan cara memberdayakan organisasi kemasyarakatan dan mensinergikan dengan penguatan SIDA.

6.2.2 Kelembagaan Inovasi Daerah Kabupaten Pringsewu

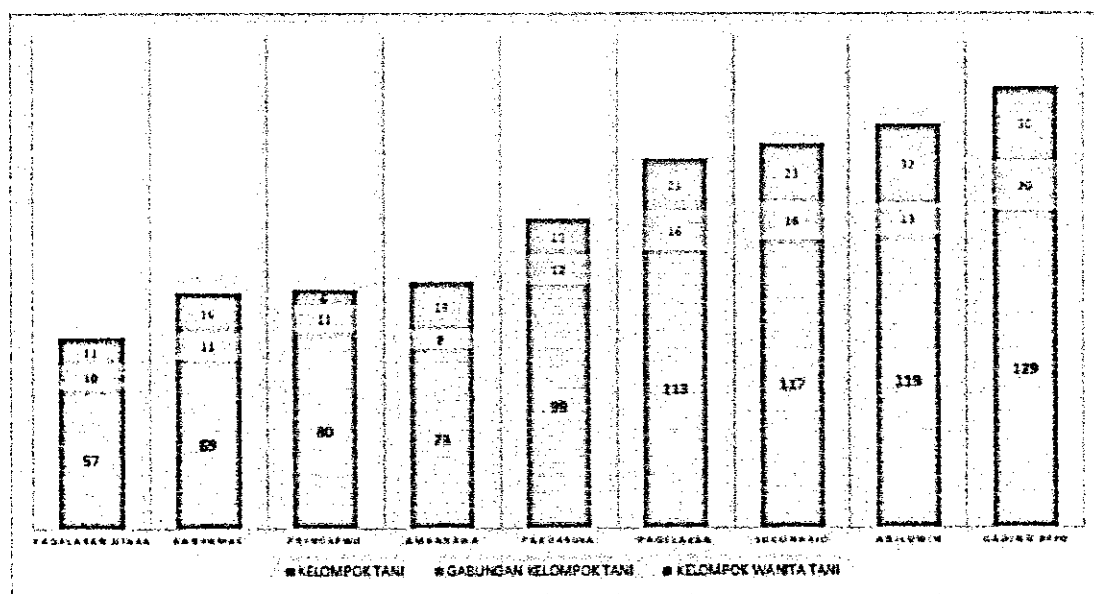
Dalam Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Inovasi Daerah terdapat bagian kedua mengenai Kelembagaan Inovasi daerah. Bagian kedua tersebut memuat bahwa perangkat daerah sesuai bidangnya bertanggung jawab dalam menyelenggarakan inisiatif inovasi daerah, masyarakat dan perguruan tinggi menyelenggarakan inisiatif inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk dan proses, serta kelembagaan penelitian dan pengembangan ditugaskan Bupati Pringsewu untuk mengkoordinasikan, memantau, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan inovasi daerah. Namun, dibutuhkan juga pengembangan kelembagaan khusus untuk menginisiatif kolaboratif inovasi. Interaksi antar pelaku inovasi akan menumbuhkan budaya inovasi yang lebih tangguh dan inovasi yang lebih besar manfaatnya. Adapun keberadaan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut:

Tabel 6. 8 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu

OPD Kabupaten Pringsewu	
No	Badan
1	Sekretariat Daerah Kab. Pringsewu
2	Sekretariat DPRD
3	Inspektorat
4	Sekretariat Korpri
5	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
No	Dinas
1	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Dinas Kesehatan
4	Dinas Perhubungan
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
8	Dinas Sosial

9	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
10	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
11	Dinas Perikanan
12	Dinas Pertanian
13	Dinas Lingkungan Hidup
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
15	Dinas Perpustakaan dan Arsip
16	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
17	Dinas Ketahanan Pangan
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
No	Bagian
1	Bagian Hukum
2	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pada salah satu sektor unggulan yaitu sektor pertanian terdapat kelembagaan berupa beberapa kelompok masyarakat yang tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Pringsewu. Grafik berikut menjelaskan bahwa terdapat lembaga masyarakat berupa Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani dengan jumlah kelembagaan terbanyak berada di Kecamatan Gading Rejo.



Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu, 2020

Gambar 6. 1 Grafik Jumlah Kelompok Masyarakat Sektor Pertanian di Kabupaten Pringsewu

Keberadaan kelembagaan kelompok masyarakat ini dapat mendukung kemajuan sektor pertanian dan menginisiasi inovasi pada sektor pertanian. Sebaiknya kelembagaan kelompok masyarakat bukan hanya terbatas pada sektor pertanian, tetapi juga penting untuk masyarakat terlibat dalam setiap sector ekonomi lainnya, seperti pariwisata dan industri UMKM. Bahkan selain sector ekonomi, sebaiknya masyarakat juga menunjukkan keterlibatannya dalam sector pendidikan, kesehatan, pemberdayaan, social, lingkungan dan lain-lain. Keberadaan kelembagaan masyarakat dalam setiap sector akan lebih menginisiasi masyarakat dan pemerintah daerah untuk mencanangkan inovasi-inovasi dan melaksanakannya untuk dampak yang lebih baik.

6.2.3 Budaya Inovasi di Kabupaten Pringsewu

Meskipun telah ada Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Inovasi Daerah yang memuat Bab X mengenai Penilaian dan Penghargaan Inovasi, belum ada teknis pelaksanaannya di Pringsewu karena belum ada penunjukkan terhadap lembaga yang terkait dengan penugasan tersebut. Selama ini di Kabupaten Pringsewu, pemberian insentif kepada pelaku inovasi banyak berupa kemudahan administrasi. Kampanye inovasi juga dapat menjadi salah satu cara menguatkan budaya inovasi, namun belum digalakan dengan baik. Penguatan budaya inovasi dapat dilakukan salah satunya dengan memberikan insentif pada pelaku inovasi baik berupa apresiasi, kemudahan-kemudahan lainnya dan bahkan pemberian hadiah yang besar.

Beberapa Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pringsewu telah melakukan inovasi dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan urusan pemerintahan lainnya tapi belum optimal. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar OPD belum mempunyai bagian kelembagaan yang khusus bertugas menginisiasi inovasi daerah, baik berupa inisiatif, perencanaan sampai pelaksanaan inovasi daerah. Menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan masyarakat pada setiap sector, baik itu pertanian, pariwisata, UMKM, pendidikan, kesehatan dll juga akan meningkatkan budaya inovasi pada sector tersebut untuk produktivitas sector tersebut. Lembaga BUMDes di Kabupaten Pringsewu mencotohkan hal tersebut dengan program *One Village One Product*, meskipun perlu dioptimalisasi.

Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan pelayanan public. terdapat enam bidang pelayanan dasar yang wajib memiliki SPM yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang sosial bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang perumahan rakyat. Pada dasarnya rencana pencapaian SPM sebagian besar telah tergambar dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Dalam bidang pendidikan misalnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu sebagai pengampu SPM bidang pendidikan dasar telah memasukkan rencana pencapaian SPM bidang pendidikan Kabupaten Pringsewu dalam Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan dalam bentuk Program dan Kegiatan. Adapun sebaiknya program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu juga memuat mengenai penyelenggaraan inisiatif inovasi, perencanaan inovasi hingga pelaksanaannya.

6.2.4 Pelayanan Berbasis Teknologi di Kabupaten Pringsewu

Seluruh organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pringsewu telah menerapkan *e-government* untuk mewujudkan sistem informasi dan komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat (seperti OSS, Sicantik, Sibe). Namun, belum seluruhnya kegiatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan urusan pemerintahan lainnya di setiap organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pringsewu yang menerapkan teknologi online yang cepat. Selain perlu penumbuhan kelembagaan non formal masyarakat yang bergerak pada sektor tertentu, juga diperlukan pemanfaatan TIK pada pengelolaan lembaga tersebut untuk meningkatkan produktivitas sektor tersebut.

Kabupaten Pringsewu telah menerapkan sistem informasi digital tingkat desa yang memberikan informasi internal desa tersebut yang meliputi Profil desa, Pemerintahan desa, Kelembagaan berupa kelompok masyarakat, Data Statistik, Dana Desa dan APBDDes, Produk Hukum berupa SK dan Layanan Pengaduan. Pemerintah daerah juga telah menginisiasi system data dan informasi yang menyeluruh kepada seluruh aparat pemerintahan kabupaten serta warga yang ada di kabupaten tersebut. Berikut merupakan program sistem data dan informasi yang telah dilaksanakan dan masih dikembangkan pemerintah:

- a. Persentase pekon telah mampu mengoperasikan *e-government* yaitu 41,98 persen dan ditargetkan mencapai 95,42 persen pada tahun akhir RPJMD
- b. Persentase pekon yang telah tertib pengelolaan keuangan melalui IT yaitu 80.25 persen dan ditargetkan mencapai 95 persen pada tahun akhir RPJMD
- c. Persentase SKPD yang aktif updating terhadap websitenya sebesar 50 persen
- d. Persentase rutinitas Rapemda dalam menyiarkan programnya yaitu 65 persen dan ditargetkan mencapai 85 persen pada tahun akhir RPJMD
- e. Persentase ketersediaan peta digital dan analog tata ruang yaitu 30,50 persen dan ditargetkan mencapai 60 persen pada tahun akhir RPJMD

- f. Prosentase aparatur pengelola website SKPD yang mendapat pelatihan yaitu 45,50 persen dan ditargetkan mencapai 80,50 persen pada tahun akhir RPJMD

Pada umumnya, beberapa OPD di Pringsewu sudah memiliki program-program yang mendukung keberlangsungan kegiatan Kelembagaan Kabupaten Pringsewu. Terdapat juga program inovasi yang telah dibuat untuk mengoptimalkan potensi dan sektor unggul ekonomi. Namun masih perlu adanya lembaga khusus atau program yang dapat mengintegrasikan untuk mengontrol, menjamin keefektifan dan keberlanjutan program-program tersebut. Kegiatan Inovasi Daerah telah tersusun dalam SK Bupati Pringsewu No. B/88/KPTS/B.01/2020 tentang Nama-Nama Kegiatan Inovasi Daerah ke Dalam Suatu Keputusan Bupati Pringsewu.

Tabel 6.9 Kegiatan Inovasi Daerah Kabupaten Pringsewu

No.	Uraian Nama Kegiatan/Inovasi	Perangkat Daerah Instansi
1	Usaha Ekonomi Kreatif	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu
2	Demapan (Pengembangan Desa Mandiri Pangan) Kabupaten Pringsewu	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu
3	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (Nbm) Kabupaten Pringsewu tahun 2019 dan tahun 2020	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu
4	Pangan Lestari	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu
5	Peningkatan Unit Usaha Bumdes	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu
6	Peningkatan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu
7	Peningkatan Keberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu
8	Pengendalian Pengawasan Perikanan	Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu
9	Pemberian Bantuan Benih Ikan Gurame dalam rangka pengembangan budidaya ikan dan tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu	Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu
10	Pemberdayaan P3A	Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu
11	Penumbuhan Brigade Proteksi TPH melalui Kelompok	Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu
12	Peningkatan pengelolaan pos penyuluhan desa (Posluhdes)	Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu
13	Penyusunan Produk Hukum Daerah Berupa Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu
14	Pembentukan kelompok keluarga sadar hukum dan pembentukan pekon/kelurahan sadar hukum	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu
15	Penyusunan Sop-Ap Bersenyum manis	Bagian Hukum Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu

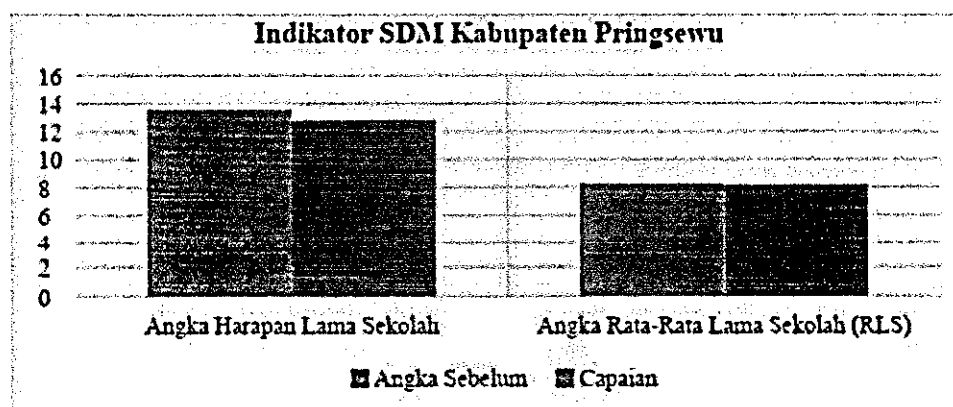
No.	Uraian Nama Kegiatan/Inovasi	Perangkat Daerah Instansi
16	Kelembagaan yang Terintegrasi	Bagian Hukum Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu
17	Sosialisasi Pengadaan Barang dan jasa Tingkat Pekon (Bagian Adminitrasi Pembangunan Setdakab Pringsewu)	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu
18	Musrenbang Kecamatan Gadingrejo	Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu
19	Musrenbang Kecamatan Pringsewu	Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu
20	Musrenbang Tingkat Kecamatan Sukharjo	Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu
21	Musrenbang Kecamatan Pardasuka	Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu
22	Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan Banyumas	Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu
23	Musrenbang Tingkat Kecamatan Adiluwih	Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu
24	Musrenbang Tingkat Kecamatan Pagelaran Utara	Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu
25	Unit pemberantaraan Pungli (UPP) Kabupaten Pringsewu	Inspektorat Kabupaten Pringsewu
26	Musrenbang Kabupaten Pringsewu	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu

Sumber: Keputusan Bupati Kab. Pringsewu, 2020

6.3 Jaringan SIDA

6.3.1 Realisasi Capaian Indikator Inovasi Menurut Rencana Pengembangan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pringsewu

Dalam pengembangan dan perencanaan, pada setiap akhir dari tahap perencanaan tentu akan dilakukan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan berupa penilaian keberhasilan program yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun sebelumnya. Melalui beberapa penilaian RPJMD terdapat beberapa indikator yang berkaitan dengan Sistem Inovasi Daerah, terutama kondisi secara umum dari SDM di Kabupaten Pringsewu. Berikut data ketercapaian indikator RPJMD Kabupaten Pringsewu 2020:



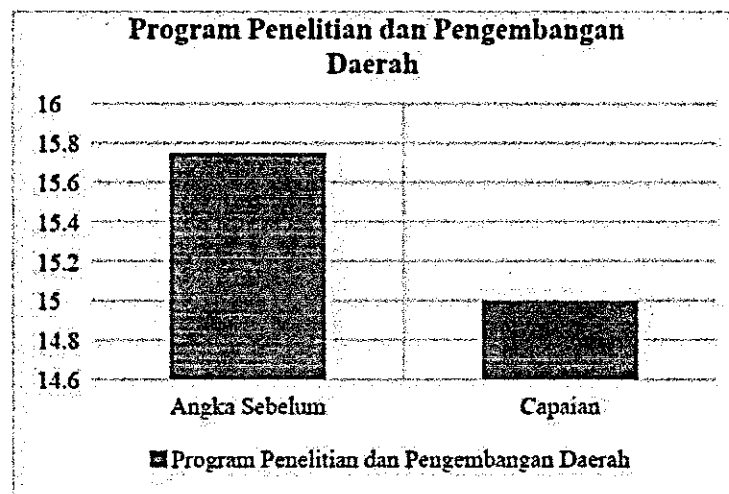
Sumber: RKPD Kabupaten Pringsewu, 2020

Gambar 6. 2 Grafik Indikator SDM Kabupaten Pringsewu

Pada data diatas menunjukkan bahwa terhadap ketidak capaian dalam mencapai indicator harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketidak tercapaian indicator yang berkaitan dengan SDM Kabupaten Pringsewu.

6.3.2 Jaringan Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Pringsewu

Jaringan Sistem Inovasi Daerah merupakan hal interaksi antar kelembagaan atau organisasi di dalam Sistem Inovasi Daerah. Interaksi yang dimaksud adalah upaya untuk mensinergikan kemampuan yang dimiliki masing – masing lembaga dalam suatu rantai kegiatan. Hal ini menjadi penting untuk mensinergikan sistem inovasi daerah, mulai dari proses penangkapan isu sampai proses realisasi isu. Hal ini digambarkan dari penilaian indicator program penelitian dan pengembangan daerah yang ditindaklanjuti (gambar 2.3)



Sumber: RKPD Kabupaten Pringsewu, 2020

Gambar 6. 3 Grafik Indikator Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Grafik diatas menunjukkan bahwa indicator program penelitian dan pengembangan daerah yang ditindak lanjuti. Terkait hal ini, menunjukkan bahwa terdapat ketidak berlanjutan dari proses penelitian dan pengembangan yang tidak ditindak lanjuti oleh pihak lainnya. Dalam konteks ini adalah bagaimana pihak pemerintah daerah telah melakukan upaya – upaya untuk bersinergi dengan institusi luar (akademisi, LSM, dll). Di mana upaya upaya jaringan sistem inovasi daerah ini nantinya berorientasi pada pengembangan melalui komunikasi intensif antar Lembaga yang mendukung Sistem Inovasi Daerah. Selanjutnya adalah bagaimana upaya untuk memobilisasi sumber daya manusia dalam melakukan penataan jaringan Sistem Inovasi Daerah. Komponen terakhir adalah optimalisasi pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, Informasi, Sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi. Menjadi penting untuk mengetahui tugas pokok dan fungsi dari dinas yang memiliki peran dalam melakukan fungsi jaringan sistem inovasi daerah di Kabupaten Pringsewu. Melalui subbab jaringan Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Pringsewu, diharapkan mampu menjelaskan bagaimana kondisi dan peluang dalam pengembangan jaringan Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Pringsewu.

6.3.3. Prioritas Program Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu 2020

Dalam pengembangan dan mewujudkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu 2020, tentunya terdapat beberapa prioritas program. Selain itu juga telah ditentukan OPD yang mengampu dari kegiatan dan prioritas program. Pada prioritas program juga tentunya terdapat beberapa program yang sejalan dengan pengembangan sistem inovasi daerah di Kabupaten Pringsewu. Berikut beberapa program prioritas yang berkaitan dengan pengembangan sistem inovasi daerah di Kabupaten Pringsewu:

1. Peningkatan Infrastruktur Publik dan Permukiman. Dalam pengembangan program tentunya akan mengarahkan pada beberapa OPD yang akan mengampu dalam menjalankan prioritas dan sasaran daerah. OPD yang akan mengampu ada prioritas program ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Pengembangan SDM yang cerdas, sehat, religious dan berbudaya. Dalam pengembangan program tentunya akan mengarahkan pada beberapa OPD yang akan mengampu dalam menjalankan prioritas dan sasaran daerah. OPD yang akan mengampu ada prioritas program ini adalah Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan Daerah.
3. Peningkatan dan Pemerataan Perekonomian Guna Mendorong Daya Saing Daerah dan Pengentasan Kemiskinan. Dalam pengembangan program tentunya akan mengarahkan pada beberapa OPD yang akan mengampu dalam menjalankan prioritas dan sasaran daerah. OPD yang akan mengampu ada prioritas program ini adalah Dinas PMPTSP, Diskoperindag, Sekretaris Daerah, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pembedayaan Masyarakat Pedesaan, Dinas Sosial, Disnakertrans, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Dinas Ketahanan Pangan.
4. Lingkungan Hidup yang berkelanjutan dan Mitigasi Bencana. Dalam pengembangan program tentunya akan mengarahkan pada beberapa OPD yang akan mengampu dalam menjalankan prioritas dan sasaran daerah. OPD yang akan mengampu ada prioritas program ini adalah Dinas Lingkungan Hidup.
5. Tata Kelola Pemerintahan dan Ketentraman. Dalam pengembangan program tentunya akan mengarahkan pada beberapa OPD yang akan mengampu dalam menjalankan prioritas dan sasaran daerah. OPD yang akan mengampu ada prioritas program ini adalah BAPPEDA, Diskominfo, Dinas Perpustakaan Daerah, BKPSDM, Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, BPKAD, Inspektorat, Kesbangpol, Satpol PP, Disdukcapil didukung oleh seluruh OPD.

Melalui berbagai penjelasan dari definisi jaringan serta keterkaitan dengan berbagai OPD, berikut kondisi jaringan sistem inovasi daerah di Kabupaten Pringsewu:

a. Komunikasi intensif

Dalam komunikasi intensif, terdapat beberapa komponen yang menjadi bagian dari pembentukan komunikasi intensif. Komponen tersebut berupa adanya penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya dan kegiatan sejenisnya. Selain itu juga menjalin Kerjasama kelitbangan antar Lembaga / organisasi Sistem Inovasi Daerah dan Forum Komunikasi penelitian dan pengembangan daerah. Berikut bentuk kegiatan yang menjadi rutinitas kegiatan dalam upaya komunikasi intensif terkait Sistem Inovasi Daerah:

- 1) Beberapa bentuk komunikasi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Pringsewu adalah menjalin bentuk kerja sama dengan ITERA, UNILA termasuk beberapa perguruan tinggi setempat terkait penelitian, publikasi ilmiah, pendampingan penyusunan RPJMD, atau aktivitas sosial masyarakat seperti dengan UIN terkait penerjemahan Al Quran.
- 2) Beberapa dinas yang sering berinteraksi dengan institusi akademis (STMIK, UAP, UMPri, STIT, dll) yaitu BAPPEDA, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kesbangpol, BPPPAKB, Dinas kominfo, Dinas pemuda dan olahraga, berdiskusi dengan akademisi dan peneliti untuk mendapatkan masukan dan informasi terkait pembangunan sectoral terkait serta isu-isu strategis yang berkembang.
- 3) Institusi diluar Pemerintah Daerah rutin untuk diundang dalam kegiatan sosialisasi program Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu. Selain sosialisasi, Pemda Kabupaten Pringsewu memberikan pembinaan karakter maupun izin bagi kegiatan yang akan dilakukan di Kabupaten Pringsewu. Bentuk lain yang dilakukan Pemda Kabupaten Pringsewu adalah memberikan bantuan kepada institusi, salah satunya alat olahraga kepada STIT.

Bentuk interaksi ini bersifat dua arah baik dari pihak Pemerintah Kabupaten Pringsewu maupun dari pihak institusi luar. Dalam konteks interaksi institusi biasanya akan berkoordinasi terkait kegiatan mahasiswa yang melibatkan Dinas PMD, Dinas Kesehatan, BPPPAKB maupun dinas lainnya.

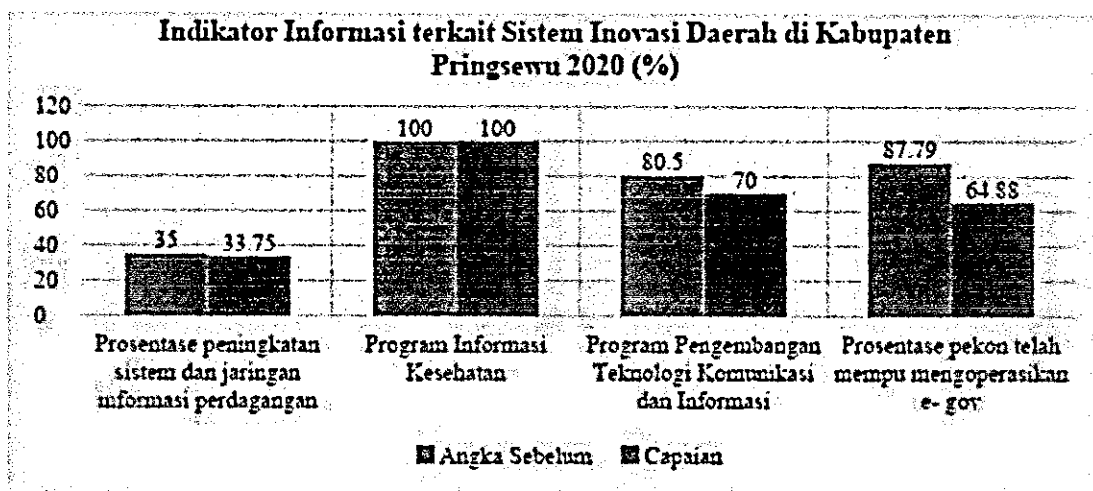
b. Mobilisasi Sumber Daya Manusia

Mobilisasi Sumber Daya Manusia merupakan salah satu komponen dalam penataan jaringan Sistem Inovasi Daerah terdiri dari beberapa komponen yaitu Kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan sistem inovasi daerah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan Sistem Inovasi Daerah, Kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan Kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA antara Lembaga pemerintahan dan Lembaga non pemerintahan. Berikut beberapa bentuk mobilisasi Sumber Daya Manusia pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu:

- 1) Pengembangan Jurnal yang merupakan salah satu program dari kelitbangan BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Pengembangan jurnal dilakukan berupa pengelolaan website dan sebagai editor dari pihak STMIK Pringsewu, UAP, UMPri, STIT, dll. Selain itu merupakan kegiatan pembinaan penelitian dan publikasi (Kejurnalan). Institusi akademis yang sering dilibatkan adalah STMIK Pringsewu, UAP, UMPri, STIT, dll.
- 2) Selain jurnal juga terdapat kegiatan lomba inovasi Teknologi tepat guna, dalam melaksanakan kegiatan juga melibatkan akademisi seperti STMIK, UAP, UMPri serta juga dari POLINELA dilibatkan sebagai juri lomba maupun narasumber sosialisasi jurnal atau workshop terkait inovasi.
- 3) Kegiatan lain adalah kegiatan P2KTD (Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa) yang berkaitan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dimana kegiatan ini melibatkan STMIK Pringsewu.

c. Optimalisasi pendayagunaan HKI, informasi, sarana prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi

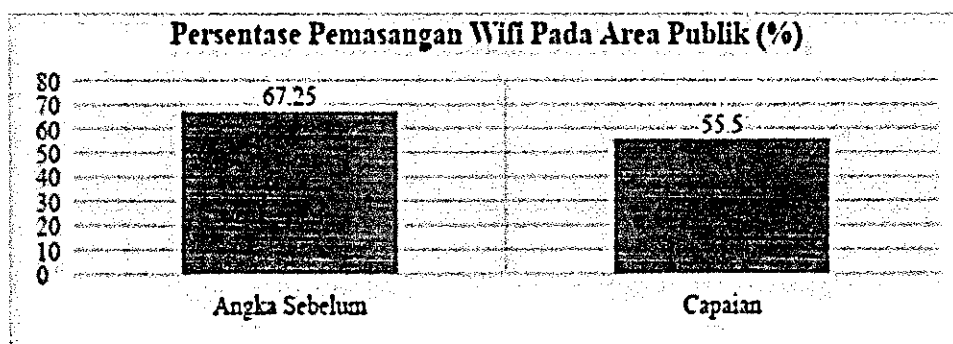
Upaya untuk pemanfaatan HKI, Informasi SIDA dan sarana prasarana SIDA dan teknologi merupakan komponen pendukung dalam membangun sistem inovasi daerah di Kabupaten Pringsewu. Secara umum penjelasan dari pemanfaatan HKI, Informasi SIDA, sarana prasarana SIDA dan teknologi dapat diindikasikan dari beberapa indikator capaian kinerja Pemerintah Pringsewu. Berikut indikator terkait informasi terhadap sistem inovasi daerah di Kabupaten Pringsewu:



Sumber: RKPd Kabupaten Pringsewu, 2020

Gambar 6. 4 Grafik Indikator Informasi terkait Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Pringsewu 2020 (%)

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa dalam pengembangan sistem informasi, pemerintah Kabupaten Pringsewu telah melakukan beberapa program dan menjadikan indicator terkait sistem informasi sebagai suatu target capaian. Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa terjadi penurunan pada ketiga point yaitu persentase peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan, program pengembangan teknologi komunikasi dan informasi dan persentase pekon yang telah mampu mengoperasikan *e-government*. Indikator yang hanya tercapai adalah program informasi Kesehatan yang nilainya tetap. Hal ini mengindikasikan terjadi menurunnya upaya pemerintah untuk mengembangkan sistem informasi dan tidak tercapai.



Sumber: RKPd Kabupaten Pringsewu, 2020

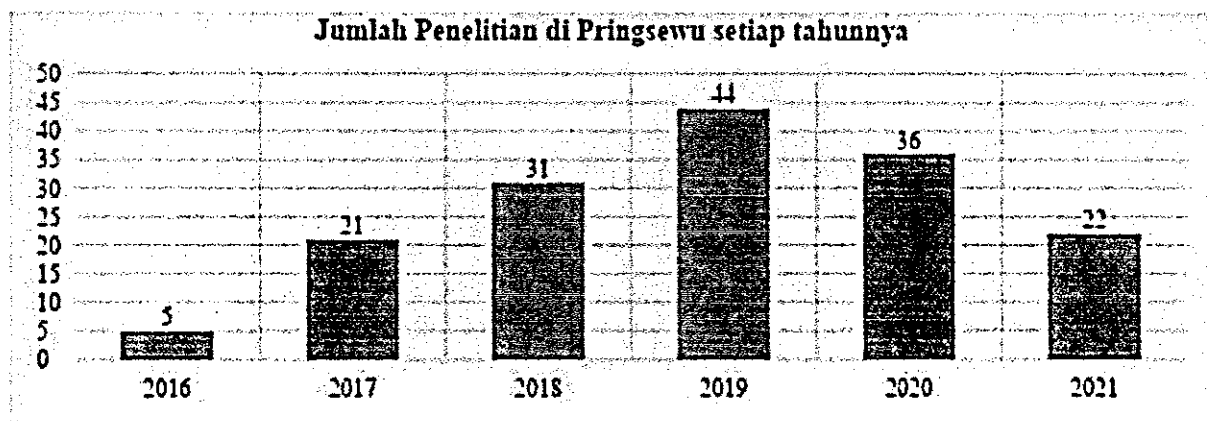
Gambar 6. 5 Grafik Indikator Sarana Prasarana terkait Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Pringsewu 2020 (%)

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bagaimana upaya untuk memenuhi sarana prasarana dalam mendukung Sistem inovasi Daerah juga telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Dimana Pemerintah menentukan indicator ketercapaian melalui program pemasangan WIFI pada area publik.

Melalui perhitungan indikator diatas menunjukkan bahwa terjadi penurunan terhadap target capaian terhadap pemasangan Wifi di area public. Keberadaan Wifi dapat menjadi bentuk upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat mengakses informasi secara cepat dan efisien. Diharapkan melalui peningkatan program pemasangan Wifi di area public dapat meningkatkan keterbukaan informasi, sehingga dapat menstimulasi munculnya inovasi – inovasi.

6.3.4 Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pringsewu

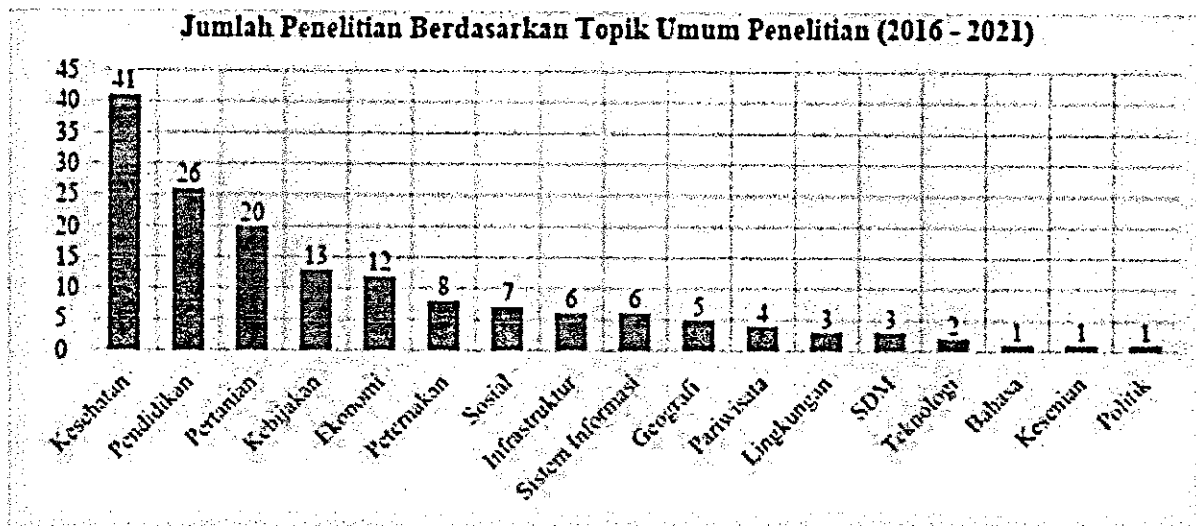
Keberadaan kegiatan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pringsewu menjadi penting untuk di analisis. Hal ini akan menjadi indikasi terhadap aktivitas dan sektor yang menjadi ketertarikan terhadap Kabupaten Pringsewu untuk dikaji. Dalam proses identifikasi penelitian di Kabupaten Pringsewu dilakukan melalui publikasi penelitian yang terakreditasi. Proses pencarian publikasi ini dilakukan melalui aplikasi *Publish or Perish 7* sejak tahun 2016 – 2021. Berdasarkan hasil tabulasi, terpilih 159 jurnal yang terpublikasi dan terekam pada aplikasi *Publish or Perish 7*. Berikut beberapa data penelitian yang telah diakumulasi sejak tahun 2016 – 2021:



Sumber: Hasil Survei, 2021

Gambar 6. 6 Jumlah Penelitian di Kabupaten Pringsewu 2016 - 2021

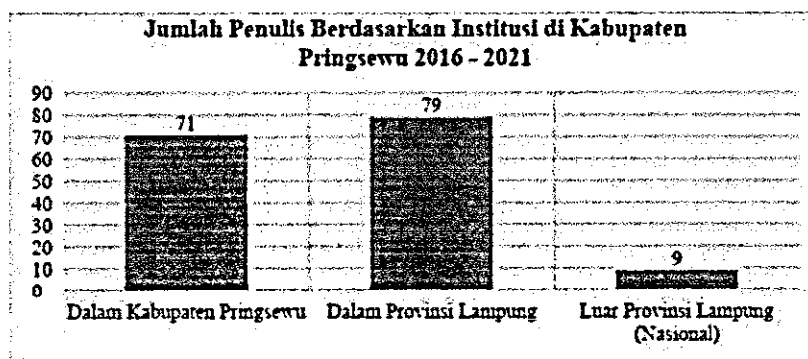
Pada grafik diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan tertinggi pada tahun 2019 sebanyak 44 penelitian. Namun terjadi penurunan pada tahun 2020 dan tahun 2021 (bulan oktober). Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pringsewu memiliki peluang untuk dijadikan obyek dan menjadi wadah aktivitas penelitian, Diharapkan dengan semakin meningkatnya penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pringsewu dapat memberikan inputan pada pemerintah, industri maupun stakeholder lain, sehingga menghasilkan inovasi-inovasi pada berbagai sektor di Kabupaten Pringsewu. Selain jumlah, pengklasifikasian data juga disesuaikan dengan topik penelitian yang terpublikasi di Kabupaten Pringsewu:



Sumber: Hasil Survei, 2021

Gambar 6. 7 Jumlah Penelitian berdasarkan Topik Umum Penelitian di Kabupaten Pringsewu 2016 - 2021

Pada grafik diatas menunjukkan kategori penelitian yang dilakukan sejak 2016 – 2021 di Kabupaten Pringsewu. Grafik diatas menunjukkan bahwa penelitian paling banyak berada pada kategori Kesehatan, Pendidikan, Pertanian, Kebijakan dan Ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa input dalam upaya pengembangan inovasi pada kategori Kesehatan, Pendidikan, Pertanian, Kebijakan dan Ekonomi dapat berkembang lebih cepat. Selain itu kategori tersebut perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk ditindak lanjuti untuk menyelesaikan permasalahan didaerah. Selain itu, perlu adanya wadah untuk mempublikasi berbagai penelitian di Kabupaten Pringsewu, sehingga dapat menstimulasi Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Pringsewu. Selain kategori penelitian, menjadi penting untuk mengetahui siapa para penulis publikasi:

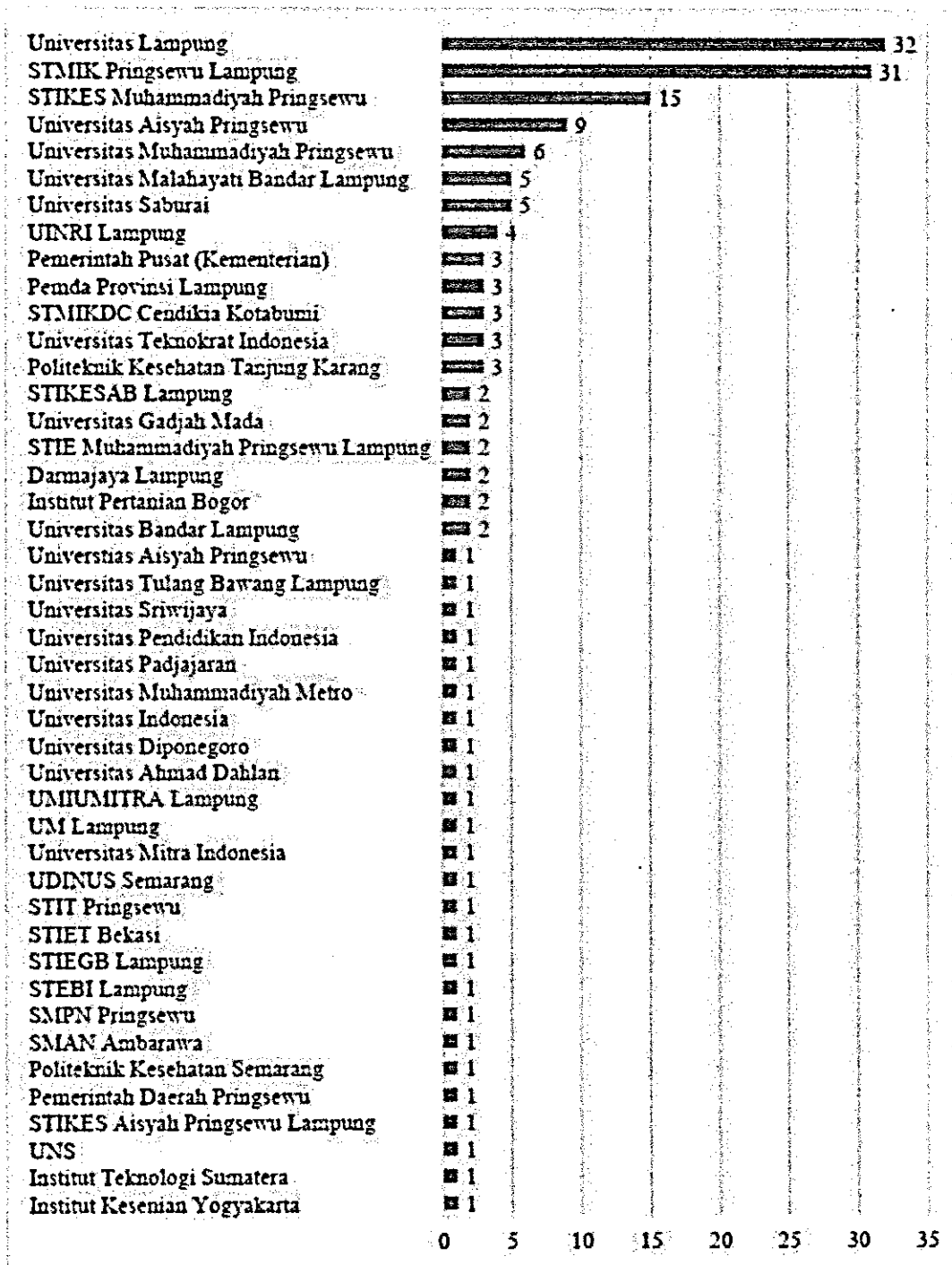


Sumber: Hasil Survei, 2021

Gambar 6. 8 Jumlah Penelitian berdasarkan Topik Umum Penelitian di Kabupaten Pringsewu 2016 - 2021

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa persebaran peneliti berdasarkan asal institusinya. Pada grafik tersebut, klasifikasi institusi dibagi menjadi 3 hal yaitu klasifikasi dalam Kabupaten Pringsewu, Dalam Provinsi Lampung dan Luas Provinsi Lampung (Nasional). Berdasarkan data institusi penulis yang tersebar menunjukkan bahwa institusi paling tinggi berada dari dalam Provinsi Lampung dengan 79 publikasi. Selanjutnya adalah publikasi dari institusi penulis dari dalam Kabupaten Pringsewu dengan 71 publikasi. Sumber publikasi paling sedikit adalah institusi bersumber dari luar Provinsi Lampung skala nasional dengan jumlah publikasi sebanyak 9 publikasi.

Berdasarkan persebaran institusi, lalu didetailkan pada identitas institusinya. Selanjutnya adalah proses pendetailan informasi institusi untuk mengetahui peluang stakeholder Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk menjalin kerjasama dalam menghasilkan inovasi pembangunan daerah. Berikut persebaran institusi yang melakukan publikasi penelitian di Kabupaten Pringsewu.



Sumber: Hasil Survei, 2021

Gambar 6. 9 Grafik Jumlah Penelitian Berdasarkan Institusi yang Melakukan Publikasi Penelitian Di Kabupaten Pringsewu 2016 - 2021

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan persebaran institusi yang melakukan publikasi penelitian di Kabupaten Pringsewu. Beberapa institusi paling tinggi adalah Univesitas Lampung dengan jumlah publikasi sebanyak 32, selanjutnya adalah STMIK Pringsewu sebanyak 31 publikasi dan STIKES Muhammadiyah Pringsewu sebanyak 15 publikasi. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua institusi ini memiliki potensi untuk melakukan keberlanjutan

penelitian di Kabupaten Pringsewu. Hal ini menjadi peluang bagi Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk menjalin Kerjasama dalam rangka membangun jaringan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pringsewu. Berdasarkan dari data penelitian di Kabupaten Pringsewu, menunjukkan terdapat beberapa potensi dan peluang sebagai berikut:

- Pemerintah Kabupaten Pringsewu dapat melakukan penjalinan Kerjasama dengan beberapa kampus yang memiliki kontribusi besar penelitian di Kabupaten Pringsewu.
- Selain itu beberapa sektor penelitian berupa sektor Kesehatan, Pendidikan dan Pertanian memiliki peluang untuk menghasilkan berbagai inovasi. Hal ini dikarenakan tingginya publikasi dan penelitian yang banyak dilakukan di Kabupaten Pringsewu.
- Banyaknya jumlah kegiatan penelitian dan publikasi dapat menjadi peluang bagi Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk menampung penelitian tersebut. Namun dalam mendukung hal tersebut perlu diakomodir dan diwadahi oleh pemerintah Kabupaten Pringsewu dengan beberapa kegiatan yaitu Lokakarya dan ruang diskusi dalam pengembangan Kabupaten Pringsewu.

6.3.5 Program Inovasi OPD di Kabupaten Pringsewu

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam mewujudkan program inovasi adalah dengan mentabulasi data inovasi. Data inovasi ini terkumpul dan telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kabupaten Pringsewu nomor: B/88/KPTS/B.01/2020 tentang nama – nama kegiatan inovasi. Dalam penjelasan program inovasi yang disampaikan akan diklasifikasikan pada 3 hal yaitu pelayanan, program internal dan program eksternal dari OPD. Berikut inovasi yang diusulkan OPD di Kabupaten Pringsewu:

Pada umumnya, beberapa OPD di Pringsewu sudah memiliki program-program yang mendukung keberlangsungan kegiatan jaringan SIDA di Kabupaten Pringsewu. Terdapat juga program inovasi yang telah dibuat untuk mengoptimalkan potensi dan sektor unggul ekonomi. Namun masih perlu adanya lembaga khusus atau program yang dapat mengintegrasikan untuk mengontrol, menjamin keefektifan dan keberlanjutan program-program tersebut. Kegiatan Inovasi Daerah telah tersusun dalam SK Bupati Pringsewu No. B/88/KPTS/B.01/2020 tentang Nama-Nama Kegiatan Inovasi Daerah ke Dalam Suatu Keputusan Bupati Pringsewu.

Tabel 6. 10 Kegiatan Inovasi Daerah Kabupaten Pringsewu

No.	Uraian Nama Kegiatan/Inovasi	Perangkat Daerah Instansi
1	Peningkatan kerjasama antara wilayah pelaku dan antara sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pringsewu
2	Sewuati (Sarana Efektif Wadahi Urusan Adminitrasi Kependudukan yang Tertib dan Inovatif) di Kabupaten Pringsewu	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu
3	Peningkatan Ketersediaan fasilitas Pelayanan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu
4	Implementasi SIMPKB dalam Blue Smart Card	Dinas Perhubungan Kabupaten Pringsewu
5	Pembinaan dan Promosi Kerajinan Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
6	Penyusunan atau penyempurnaan regulasi di Bidang Perizinan dan Non Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu
7	Sosialisasi dan Publikasi Pelayanan Perizinan dan Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu
8	Kaji Terap Teknologi Budidaya	Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu
9	Pendokumentasian Produk Hukum Secara Elektronik	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu
10	Pelayanan Publik Secara Online Bersenyum Manis	Bagian Hukum Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu
11	Sakip Pringsewu Bersahaja	Bagian Hukum Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu
12	Ekspose/Publikasi Data Hasil Pembangunan (Bagian Administrasi Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu
13	Pengelolaan dan Informasi Hasil Pembangunan Daerah Tepra (Kabgian Administrasi Pembangunan)	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu
14	Aplikasi Monitoring PBJ Online Kabupaten Pringsewu	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu
15	Aplikasi LPSE Pringsewu Bersahaja	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu
16	Aplikasi Sikap Pringsewu Bersahaja	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu
17	Integritas (Informatif, Komunikatif, Aspiratif) Majalah Triwulan Inspektorat Kabupaten Pringsewu	Inspektorat Kabupaten Pringsewu
18	Implementasi Aplikasi Offline Manajemen Resiko dalam Mewujudkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Kabupaten Pringsewu level 3	Inspektorat Kabupaten Pringsewu
19	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan pemerintah Daerah	Inspektorat Kabupaten Pringsewu

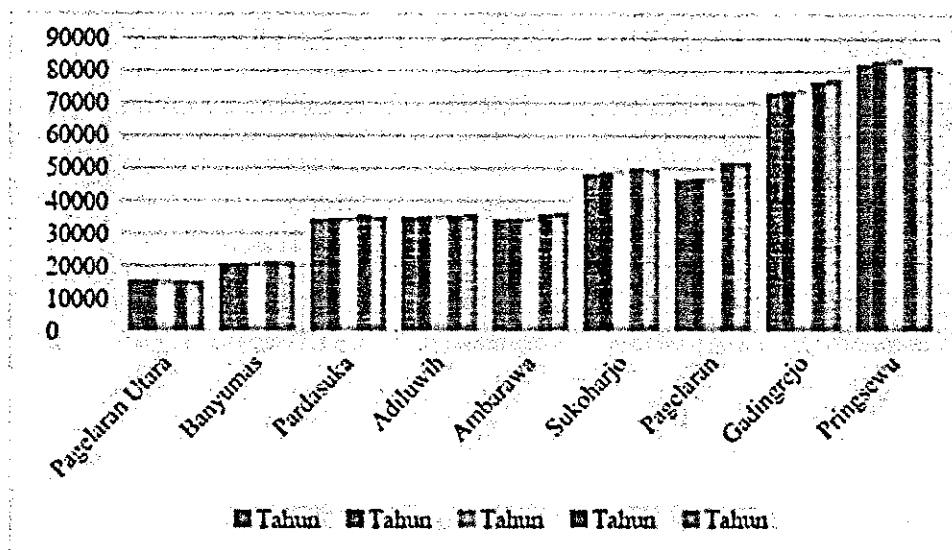
Sumber: Pemerintah Daerah Kab. Pringsewu, 2021

6.4 Sumber Daya SIDA

6.4.1 Sumber Daya Kependudukan

1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan Data Kabupaten Pringsewu dari tahun 2016 hingga 2020 diperoleh data hasil jumlah penduduk per-kecamatan selama 5 tahun terakhir sebagai berikut.

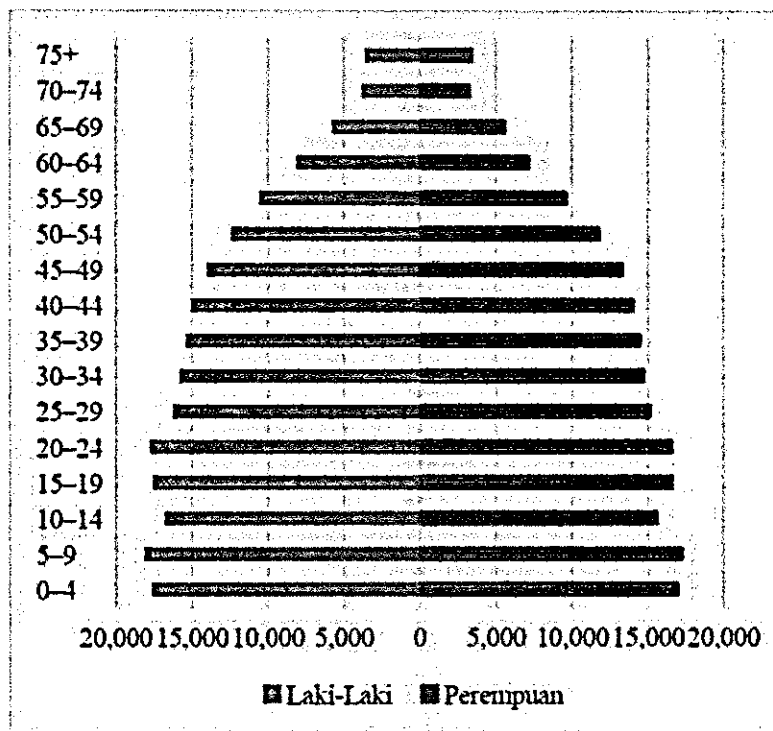


Sumber: Badan Pusat Statistik Pringsewu, 2021

Gambar 6. 10 Jumlah Penduduk di Kabupaten Pringsewu Tahun 2016-2020

Pada diagram diatas diketahui jumlah penduduk dari tiap kecamatan di Kabupaten Pringsewu selama 5 tahun terakhir, tingkatan jumlah penduduk masing- masing kecamatan terlihat bervariasi. Ada yang pertumbuhan penduduknya konstan selama 5 tahun terakhir seperti Kecamatan Pardasuka, Pagelaran Utara, Banyumas, dan Adiluwih, lalu ada yang mengalami peningkatan seperti Ambarawa, Pagelaran, Gadingrejo dan Sukoharjo, namun ada juga yang cenderung menurun yaitu Kecamatan Pringsewu. Dapat dilihat bahwa Kecamatan Pringsewu total memiliki jumlah penduduk tertinggi selama 5 tahun terakhir, hal tersebut dikarenakan Kecamatan Pringsewu merupakan pusat dari Kabupaten Pringsewu dimana hal tersebut menjadi salah satu daya tarik untuk tinggal di wilayah tersebut. Dalam hal ini jumlah penduduk memiliki kaitan terhadap relevansi peran masyarakat dalam mendukung kesiapan Kabupaten Pringsewu mengembagnkan inovasi daerah, dimana jumlah penduduk yang semakin banyak berbanding lurus dengan usia produktif yang lebih mendominasi dibandingkan dengan usia non- produktifnya, hal ini dapat mengidentifikasi bahwa hasil yang didapat sangat baik dalam segi jumlah sumber daya manusia untuk mengembangkan inovasi daerah.

Jumlah penduduk yang melimpah juga jika diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni maka akan meningkatkan hasil produksi inovasi daerah. Karena di suatu kawasan pengembangan sistem inovasi daerah dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki potensi karena sumber daya manusia merupakan pelaku utama dalam keberlangsungan penciptaan inovasi.



Sumber: Badan Pusat Statistik Pringsewu, 2021

Gambar 6. 11 Piramida Penduduk di Kabupaten Pringsewu Tahun 2020

Piramida penduduk untuk Kabupaten Pringsewu memiliki model piramida penduduk muda (*Expansive*) dimana angka kelahiran lebih tinggi dibandingkan angka kematian yang menghasilkan usia produktif menjadi tinggi. Usia produktif di Kabupaten Pringsewu, terbilang cukup banyak dibanding usia non-produktif. Jumlah penduduk produktif sebanyak ialah 277.212 jiwa sementara jumlah penduduk non-produktif sebanyak 128.254 jiwa yang terdiri dari balita, remaja usia dibawah 15 tahun, dan para lansia. Terlihat bahwa di kabupaten pringsewu pada saat ini memiliki jumlah penduduk dengan usia produktif yang dua kali lebih banyak daripada penduduk dengan usia non-produktif. Hal ini menunjukkan bahwa dengan usia produktif yang lebih tinggi dapat menghasilkan sumber daya manusia yang efisien dan inovasi yang lebih banyak dalam pengembangan sistem inovasi daerah.

2. Indeks pembangunan manusia

Indeks pembangunan Manusia adalah angka yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan sumberdaya manusia di suatu wilayah. Unsur pembentuk IPM terdiri dari tiga bidang yaitu kesehatan, pendidikan dan perekonomian. Indikator dari bidang kesehatan yaitu usia harapan hidup. Indikator dari bidang pendidikan yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Sementara dari bidang perekonomian indikator yang dipergunakan yaitu rata-rata pengeluaran perkapita.

Terdapat empat status capaian IPM dalam suatu daerah yaitu, kurang dari 50 berarti IPM rendah, 50 – 66 berarti IPM menengah bawah, 66 – 80 berarti IPM menengah atas, dan di atas 80 berarti IPM tinggi. IPM Kabupaten Pringsewu selalu mengalami peningkatan. Bahkan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Lampung. Adapun perbandingan antara IPM Kabupaten Pringsewu dengan tiap kabupaten di Provinsi Lampung sebagai berikut:

Tabel 6. 11 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2016–2020

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Lampung Barat	65,45	66,06	66,74	67,50	67,80
Tanggamus	64,41	64,94	65,67	66,37	66,42
Lampung Selatan	66,19	66,95	67,68	68,22	68,36
Lampung Timur	67,88	68,05	69,04	69,34	69,37
Lampung Tengah	68,33	68,95	69,73	70,04	70,16
Lampung Utara	65,95	66,58	67,17	67,63	67,67
Way Kanan	65,74	65,97	66,63	67,19	67,44
Tulang Bawang	66,74	67,07	67,70	68,23	68,52
Pesawaran	63,47	64,43	64,97	65,75	65,79
Pringsewu	68,26	68,61	69,42	69,97	70,30
Mesuji	60,72	61,87	62,88	63,52	63,63
Tulang Bawang Barat	63,77	64,58	65,30	65,93	65,97
Pesisir Barat	61,50	62,20	62,96	63,79	63,91
Kota Bandar Lampung	75,34	75,98	76,63	77,33	77,44
Kota Metro	75,45	75,87	76,22	76,77	77,19
Provinsi Lampung	67,65	68,25	69,02	69,57	69,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu, 2021

Dari tingkat capaian IPM Kabupaten Pringsewu masuk dalam kategori menengah atas karena berada di antara 66,00—80,00. Posisi IPM Kabupaten Pringsewu selama 5 tahun terakhir berada di posisi ke empat setelah Kota Metro, Kota Bandar Lampung, dan Lampung Tengah, namun tahun 2020 posisi IPM Kabupaten Pringsewu naik ke peringkat tiga melampaui Lampung Tengah.

3. Jumlah Fasilitas Pendidikan

Jika suatu bangsa menginginkan kemajuan di bidang pendidikan, maka harus ada upaya untuk mengembangkan potensi dan bakat dari peserta didik. Untuk mengembangkan potensi dan bakat peserta didik, dilakukan melalui proses pembelajaran. Dengan proses pembelajaran yang baik dan berkualitas, peserta didik akan mendapatkan pengetahuan, keterampilan serta bekal untuk menghadapi berbagai kemajuan dan tantangan zaman. Salah satu indikator kemajuan bidang pendidikan di suatu daerah dapat dilihat dari sebaran jumlah fasilitas di seluruh penjuru wilayah tersebut, semakin banyak maka dapat dikatakan perkembangan bidang pendidikan di wilayah tersebut dalam keadaan baik. Dengan pendidikan yang berkualitas, akan dihasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan mempunyai keterampilan yang dibutuhkan pada zamannya. Salah satu fungsi dunia pendidikan yaitu menghasilkan output (keluaran) dalam jumlah besar, terampil dan disiplin serta mempunyai kompetensi yang dibutuhkan untuk inovasi yang berguna bagi bangsa dan negara. Berikut paparan mengenai jumlah pendidik di Kabupaten Pringsewu.

a. TK

TK ialah Jenjang pendidikan anak usia dini (usia 6 tahun atau di bawahnya) dalam bentuk pendidikan formal. Kurikulum TK ditekankan pada pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Berikut merupakan data jumlah fasilitas TK di Kabupaten Pringsewu selama 4 tahun terakhir.

Tabel 6. 12 Jumlah Fasilitas Pendidikan Kanak-Kanak (TK) Menurut kecamatan di kabupaten Pringsewu, 2017–2020

Kecamatan	TK			
	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Pardasuka	6	25	25	6
Ambarawa	8	20	20	8
Pagelaran	11	28	27	10
Pagelaran Utara	3	12	14	5
Pringsewu	22	49	50	24
Gadingrejo	25	50	51	25
Sukoharjo	18	27	27	20
Banyumas	4	23	21	6
Adiluwih	14	24	24	16
Kabupaten Pringsewu/	111	258	259	120

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu, 2021

Dapat terlihat pada awal tahun 2017 Kabupaten Pringsewu memiliki 111 fasilitas TK yang tersebar di seluruh kecamatan, dan terus meningkat hingga mencapai 259 TK pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020, jumlah fasilitas ini mengalami penurunan yang cukup signifikan akan tetapi tetap mencakup seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu. Ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Pringsewu masih memperhatikan pentingnya pendidikan bagi anak usia dini, dilihat dari fasilitas ini yang tersebar di seluruh kecamatan.

b. SD

Pendidikan sangat penting untuk perkembangan ke depan bagi bangsa Indonesia. Terutama pendidikan dasar, karena pada jenjang pendidikan dasar peserta didik akan dibentuk karakter untuk menjadi seperti apa di masa mendatang. Pendidikan dasar memberikan dasar-dasar untuk mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya. Keberhasilan mengikuti pendidikan di sekolah menengah dan perguruan tinggi banyak dipengaruhi oleh keberhasilan dalam mengikuti pendidikan dasar. Berikut merupakan data jumlah fasilitas SD di Kabupaten Pringsewu selama 5 tahun terakhir.

Tabel 6. 13 Jumlah Fasilitas Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Menurut kecamatan di kabupaten Pringsewu, 2016–2020

Kecamatan	SD				
	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Pardasuka	29	29	29	29	29
Ambarawa	24	24	24	24	21
Pagelaran	31	31	31	31	31
Pagelaran Utara	10	10	10	10	10
Pringsewu	40	40	41	42	40
Gadingrejo	56	56	56	56	53
Sukoharjo	32	32	32	32	32
Banyumas	19	19	19	19	19
Adiluwih	29	29	29	29	29
Kabupaten Pringsewu/	270	270	271	272	264

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu, 2021

Dapat terlihat pada awal tahun 2016 Kabupaten Pringsewu memiliki 270 fasilitas SD yang tersebar di seluruh kecamatan, dan terus meningkat hingga mencapai 272 SD pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020, jumlah fasilitas ini mengalami penurunan yaitu dengan jumlah akhir sebesar 264 SD. Selama 5 tahun terakhir jumlah fasilitas SD di Kabupaten Pringsewu tetap tersebar seluruh kecamatan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Pringsewu sangat memperhatikan pentingnya pendidikan dasar untuk anak-anak agar siap untuk mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya.

c. SMP

SMP (Sekolah Menengah Pertama) merupakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar yang melanjutkan dari pendidikan sekolah dasar. Pendidikan dan pembelajaran di tingkat SMP memberikan penekanan peletakan pondasi dalam menyiapkan generasi agar menjadi manusia yang mampu menghadapi perkembangan zaman yang sangat pesat terkait ide-ide dan inovasi. Berikut merupakan data jumlah fasilitas SMP di Kabupaten Pringsewu selama 5 tahun terakhir.

Tabel 6. 14 Jumlah Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Kecamatan di Kabupaten Pringsewu, 2016–2021

Kecamatan	SMP				
	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Pardasuka	5	5	5	5	5
Ambarawa	6	6	6	6	6
Pagelaran	10	10	10	10	9
Pagelaran Utara	1	1	1	1	2
Pringsewu	11	11	11	12	13
Gadingrejo	10	10	10	10	10
Sukoharjo	5	5	5	5	5
Banyumas	4	4	4	4	4
Adiluwih	3	3	3	3	3
Kabupaten Pringsewu/	55	55	55	56	57

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu, 2021

Dapat terlihat pada awal tahun 2016 Kabupaten Pringsewu memiliki 55 fasilitas SMP yang tersebar di seluruh kecamatan. Dari tahun 2017 hingga tahun 2018 jumlah fasilitas SMP tidak mengalami peningkatan dan pada tahun 2019 bertambah menjadi 56 lalu pada tahun 2020 bertambah lagi menjadi 57 fasilitas. Selama 5 tahun terakhir jumlah fasilitas SMP di Kabupaten Pringsewu tetap tersebar seluruh kecamatan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Pringsewu sangat memperhatikan pentingnya melanjutkan pendidikan dasar untuk anak-anak agar siap untuk mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya.

d. SMA, SMK dan Perguruan Tinggi

Sekolah Menengah Atas merupakan tingkatan terakhir dari pendidikan dasar di Indonesia. Pendidikan di SMA bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu, teknologi dan kesenian dan juga untuk meningkatkan kemampuan peserta didik sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya. Berikut merupakan data jumlah fasilitas SMA di Kabupaten Pringsewu selama 5 tahun terakhir.

Tabel 6. 15 Jumlah Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Akhir (SMA) Menurut Kecamatan di Kabupaten Pringsewu, 2016–2021

Kecamatan	SMA				
	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Pardasuka	1	1	1	1	1
Ambarawa	2	2	2	2	2
Pagelaran	6	5	5	5	5
Pagelaran Utara	0	0	0	0	0
Pringsewu	5	5	5	4	4
Gadingrejo	5	5	5	5	5
Sukoharjo	2	2	2	2	2
Banyumas	1	1	1	1	1
Adiluwih	1	1	1	1	1
Kabupaten Pringsewu/	23	22	22	21	21

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu, 2021

Dapat terlihat pada awal tahun 2016 Kabupaten Pringsewu memiliki 23 fasilitas SMA, tetapi tidak tersebar di seluruh kecamatan dimana pada kecamatan Pagelaran Utara tidak tercatat sama sekali adanya fasilitas pendidikan sekolah menengah atas dalam 5 tahun terakhir. Dari tahun 2017 hingga tahun 2020 jumlah fasilitas SMA di Kabupaten Pringsewu justru semakin menurun. Ini menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan masyarakat untuk tidak melanjutkan melanjutkan pendidikan di sekolah menengah atas. Walaupun dengan tingkat IPM yang cukup tinggi ketimbang kabupaten lain di Provinsi Lampung, ternyata masih ada fenomena seperti ini di Kabupaten Pringsewu. Diharapkan pendidikan dasar untuk anak-anak bisa membuat generasi kedepan siap untuk mengikuti perkembangan zaman serta pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya.

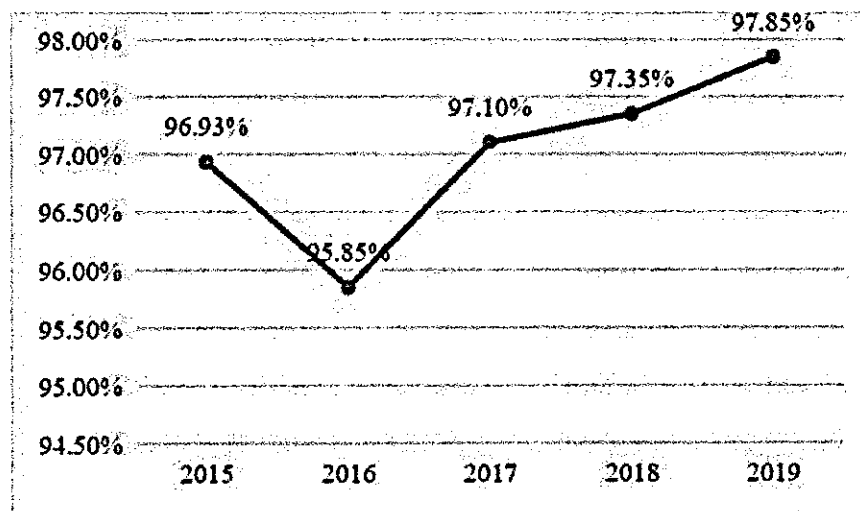
Selain itu Kabupaten Pringsewu memiliki sekolah kejuruan dan Perguruan tinggi yang diharapkan dapat meningkatkan inovasi sesuai potensinya. Terdapat 3 SMK Negeri dan 31 SMK Swasta serta 5 Perguruan Tinggi di Kecamatan Pringsewu dan 2 Perguruan Tinggi di Kecamatan Gading Rejo, sebagai berikut :

- a) STIMIK Pringsewu
- b) STIT Pringsewu
- c) UAP (Universitas Aisyah Pringsewu)

- d) AMIK DCC (Dian Cipta Cendikia) Pringsewu
- e) UMPRI (Universitas Muhammadiyah Pringsewu)
- f) STIKES Muhammadiyah Pringsewu

4. Angka Melek Huruf

Yaitu kemampuan membaca dan menulis tercermin dari angka melek huruf yang dalam hal ini didefinisikan sebagai persentase penduduk 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. Berikut merupakan data angka melek huruf dari tahun 2015- 2019



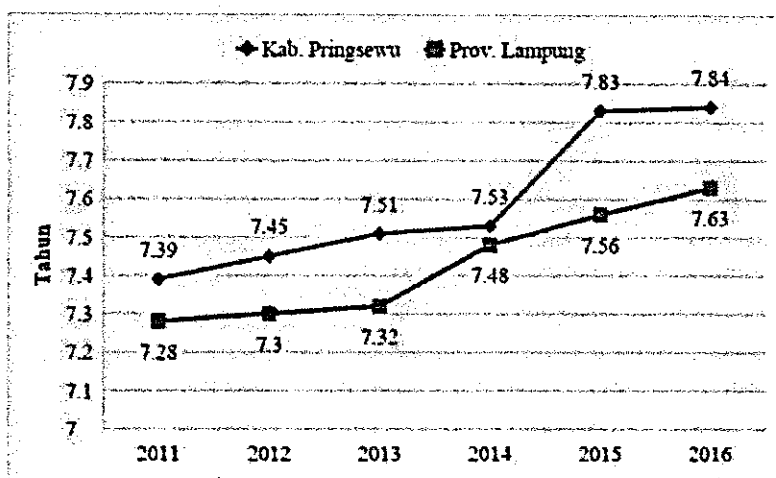
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu

Gambar 6. 12 Grafik Angka Melek Huruf Kabupaten Pringsewu Tahun 2015–2019

Dari data ini dapat terlihat bahwa tiap tahun angka melek huruf di kabupaten pringsewu terus meningkat dimana pada akhir tahun 2019 tercatat sebesar 97.85% penduduk dapat membaca dan menulis.

5. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama Sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2017

Gambar 6. 13 Grafik Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pringsewu dengan Provinsi Tahun 2010–2016

Perbandingan rata-rata lama sekolah Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung, dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Tabel 6. 16 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pringsewu Dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2011–2016

No	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Lampung Barat	6.85	7.03	7.21	7.25	7.27	7.28
2	Tanggamus	6.19	6.27	6.35	6.63	6.86	6.87
3	Lampung Selatan	6.55	6.72	6.89	7.01	7.24	7.53
4	Lampung Timur	6.87	7.01	7.15	7.16	7.2	7.55
5	Lampung Tengah	6.92	7.03	7.04	7.06	7.14	7.37
6	Lampung Utara	7.41	7.42	7.42	7.69	7.7	7.71
7	Way Kanan	6.4	6.41	6.68	6.76	7.32	7.33
8	Tulang Bawang	6.58	6.71	6.84	7.1	7.11	7.12
9	Pesawaran	6.75	6.77	6.99	7.21	7.23	7.24
10	Pringsewu	7,39	7,45	7,51	7,53	7,83	7,84
11	Mesuji	5.62	5.63	5.65	5.8	6.12	6.13
12	Tulang Bawang Barat	6.35	6.42	6.48	6.81	6.82	6.83
13	Pesisir Barat	---	---	7.35	7.36	7.47	7.48
14	Kota Bandar Lampung	9.95	10.2	10.8	10.9	10.87	10.9
15	Kota Metro	9.74	9.75	10.5	10.5	10.55	10.6

No	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
	LAMPUNG	7,28	7.3	7.32	7.48	7.56	7.63

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2017

6. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah merupakan lamanya sekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa yang akan datang. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk usia 7 tahun keatas. Adapun perbandingan angka harapan lama sekolah Kabupaten Pringsewu dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, dapat diketahui dari tabel berikut:

Tabel 6. 17 Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pringsewu Dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2011-2016

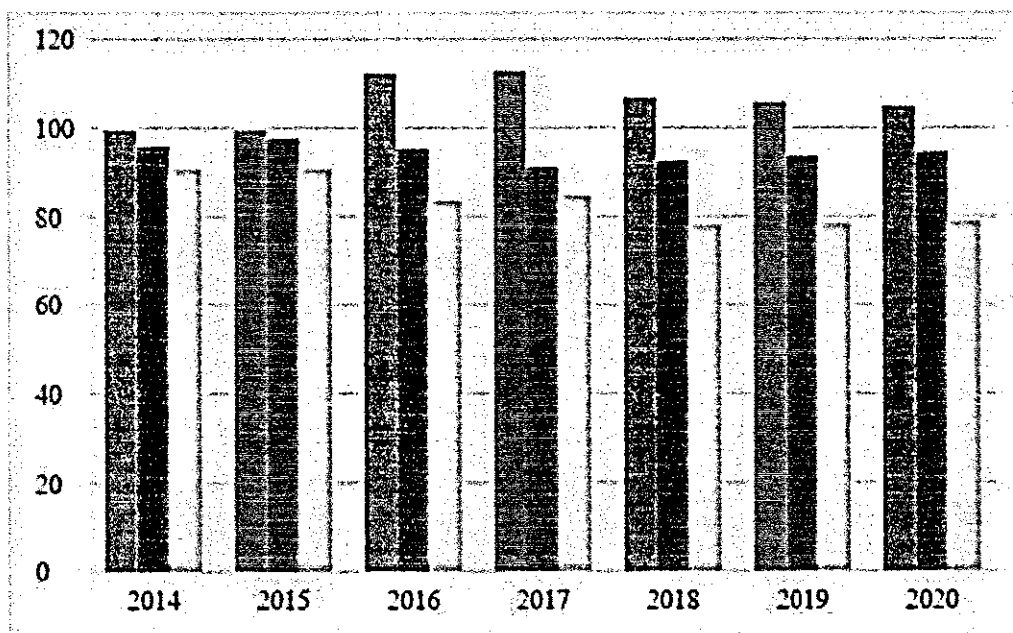
No	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Lampung Barat	11.04	11.17	11.31	11.36	11.74	12.17
2	Tanggamus	10.86	11.03	11.29	11.49	11.92	11.93
3	Lampung Selatan	10.89	10.92	10.95	10.98	11.65	11.68
4	Lampung Timur	11.3	11.78	12.26	12.38	12.4	12.41
5	Lampung Tengah	10.69	11.27	11.89	12.16	12.2	12.21
6	Lampung Utara	11.38	11.39	12.04	12.38	12.41	12.42
7	Way Kanan	10.78	11.32	11.85	11.96	11.98	12.31
8	Tulang Bawang	10.34	10.42	10.76	11.11	11.15	11.55
9	Pesawaran	11.05	11.16	11.28	11.44	12.08	12.25
10	Pringsewu	11.83	11.98	12.27	12.47	12.75	12.76
11	Mesuji	10.06	10.15	10.25	10.34	10.78	11.2
12	Tulang Bawang Barat	10.52	10.81	11.01	11.29	11.49	11.97
13	Pesisir Barat	---	---	10.62	11.12	11.53	11.85
14	Kota Bandar Lampung	12.6	13.05	13.22	13.31	13.35	13.67
15	Kota Metro	13.08	13.47	13.85	14.25	14.26	14.27
	LAMPUNG	11.04	11.37	11.9	12.24	12.25	12.35

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2017

Berdasarkan data tersebut maka posisi angka harapan lama sekolah Kabupaten Pringsewu berada diatas rata-rata Provinsi Lampung. Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung, angka harapan lama sekolah Kabupaten Pringsewu menduduki peringkat tiga setelah Kota Metro dan Kota Bandar Lampung, sekaligus menjadi peringkat pertama kategori kabupaten di Provinsi Lampung.

7. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator melihat partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan yang bersekolah pada masing-masing kelompok usia sekolah dibagi dengan jumlah penduduk di masing-masing kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Pada pendidikan dasar sembilan tahun dapat dibagi 2 (dua) kelompok usia yaitu usia 7-12 tahun pada jenjang SD/MI dan kelompok usia 13-15 tahun pada jenjang SMP/MTs dan pendidikan menengah SMA/MA/SMK kelompok usia 16-18 tahun. Adapun data perkembangan Angka Partisipasi Kasar bidang Pendidikan di Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pringsewu, 2020

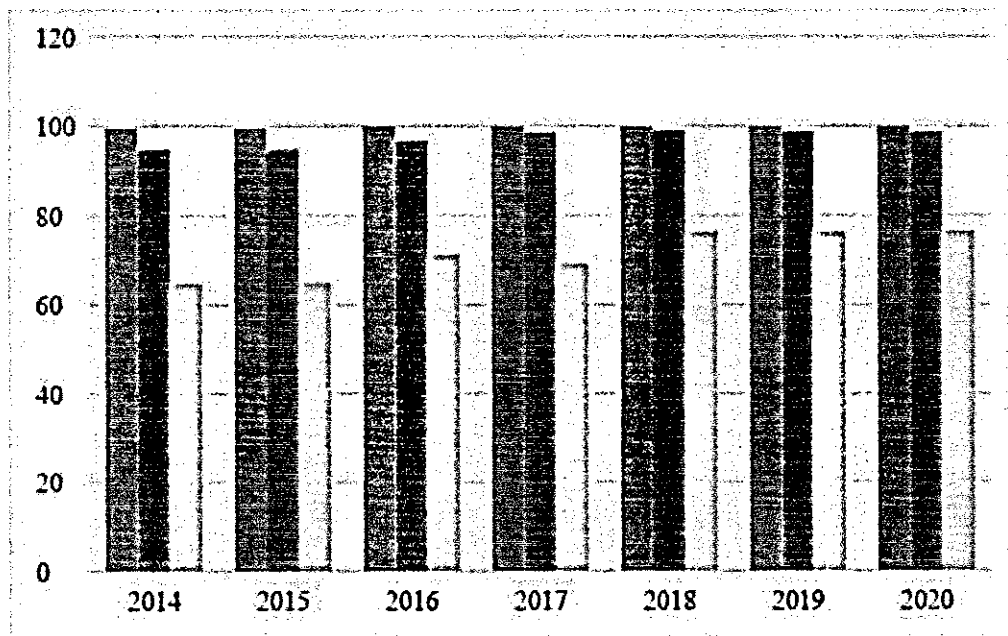
Gambar 6. 14 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Pringsewu Tahun 2014–2020

Dari data ini terlihat kecenderungan penduduk pada usia sekolah yang ikut berpartisipasi pada bidang pendidikan. Pada jenjang pendidikan SD tingkat partisipasi ini cenderung meningkat setiap tahunnya, yang menunjukkan minat untuk bersekolah terus meningkat, untuk jenjang SMP tingkat partisipasi kasar cenderung fluktuatif.

Pada pendidikan SMA persentasenya terus menurun selama 6 tahun terakhir yang menunjukkan berkurangnya minat masyarakat untuk menyelesaikan tahapan pendidikan dasarnya. Hal ini juga terlihat dari ketimpangan partisipasi minat pendidikan dimana semakin tinggi tingkatannya terlihat semakin menurun angka partisipasinya.

8. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator untuk bisa melihat tingkat partisipasi sekolah terhadap jumlah penduduk yang masih sekolah pada masing-masing kelompok usia sekolah dibagi jumlah penduduk di kelompok usia sekolah bersangkutan.



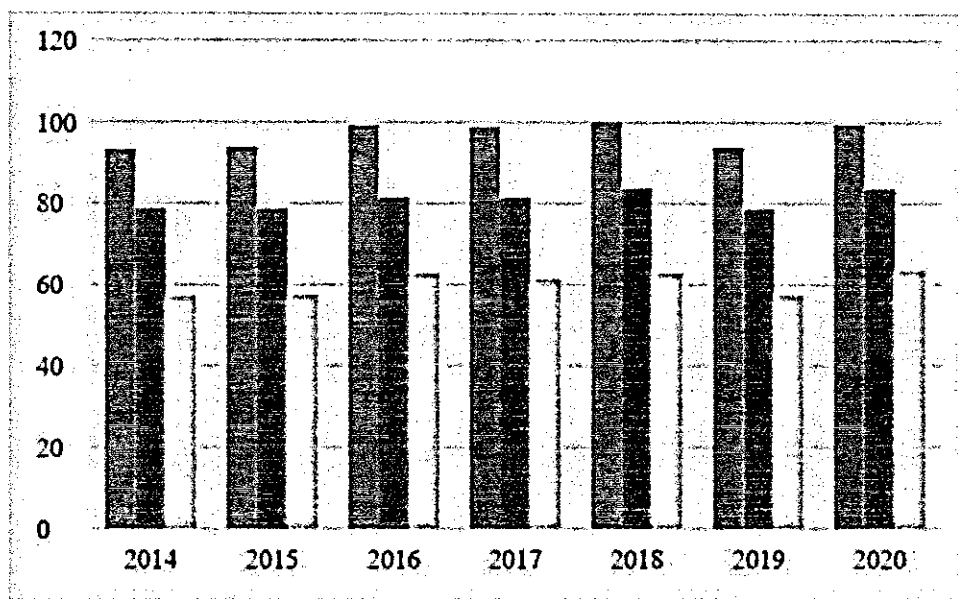
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pringsewu, 2020

Gambar 6. 15 Angka Partisipasi Sekolah Kab. Pringsewu Tahun 2014–2020

Dari data ini terlihat kecenderungan penduduk pada usia sekolah yang ikut berpartisipasi pada bidang pendidikan. Baik pada pendidikan SD, SMP, maupun SMA tingkat partisipasi ini terus meningkat setiap tahunnya, yang menunjukkan minat untuk bersekolah terus meningkat. Akan tetapi dari data ini juga terlihat bahwa ada ketimpangan partisipasi minat pendidikan dimana semakin tinggi tingkatannya terlihat semakin menurun angka partisipasinya. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada masyarakat kurang berminat untuk menyelesaikan tahapan pendidikan dasarnya.

9. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah pada tingkat pendidikan tertentu. APM pada pendidikan dasar 9 tahun yaitu jumlah murid SD/MI usia 7-12 tahun dan untuk APM pada jenjang pendidikan SMP/MTs adalah jumlah murid SMP/MTs usia 13-15 tahun. Sedangkan APM pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK adalah jumlah murid usia 16-18 tahun. Adapun APM di Kabupaten Pringsewu disajikan dalam gambar berikut:



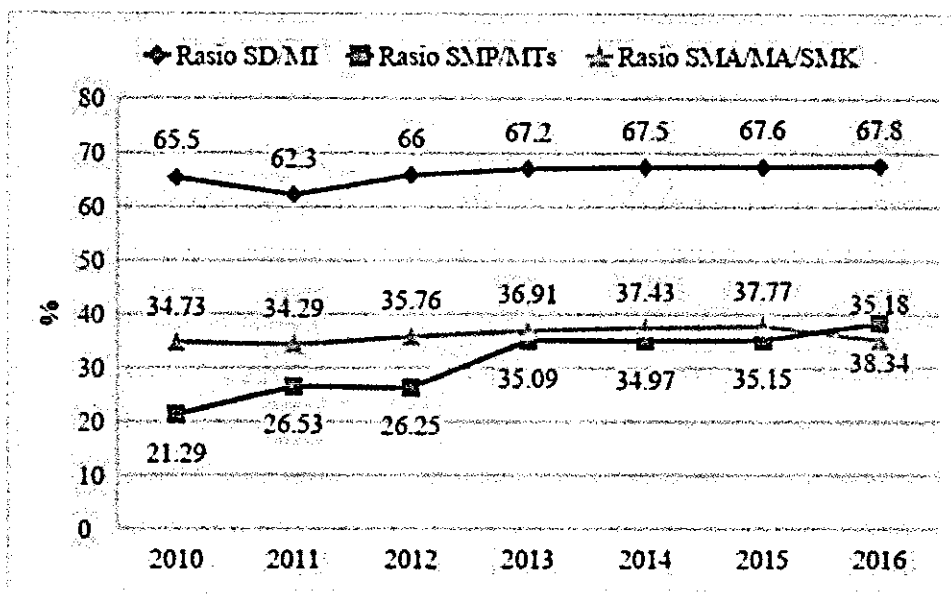
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pringsewu, 2020

Gambar 6. 16 Angka Partisipasi Sekolah Kab. Pringsewu Tahun 2014–2020

Dari data ini terlihat kecenderungan penduduk pada usia sekolah yang ikut berpartisipasi pada bidang pendidikan dasar 9 tahun. Baik pada pendidikan SD, SMP, maupun SMA tingkat partisipasi ini terus meningkat setiap tahunnya, yang menunjukkan minat untuk bersekolah terus meningkat. Akan tetapi dari data ini juga terlihat bahwa ada ketimpangan partisipasi minat pendidikan dimana semakin tinggi tingkatannya terlihat semakin menurun angka partisipasinya. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada masyarakat kurang berminat untuk menyelesaikan tahapan pendidikan dasar 9 tahun yang telah diatur oleh undang-undang.

10. Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan per 10.000 penduduk usia sekolah



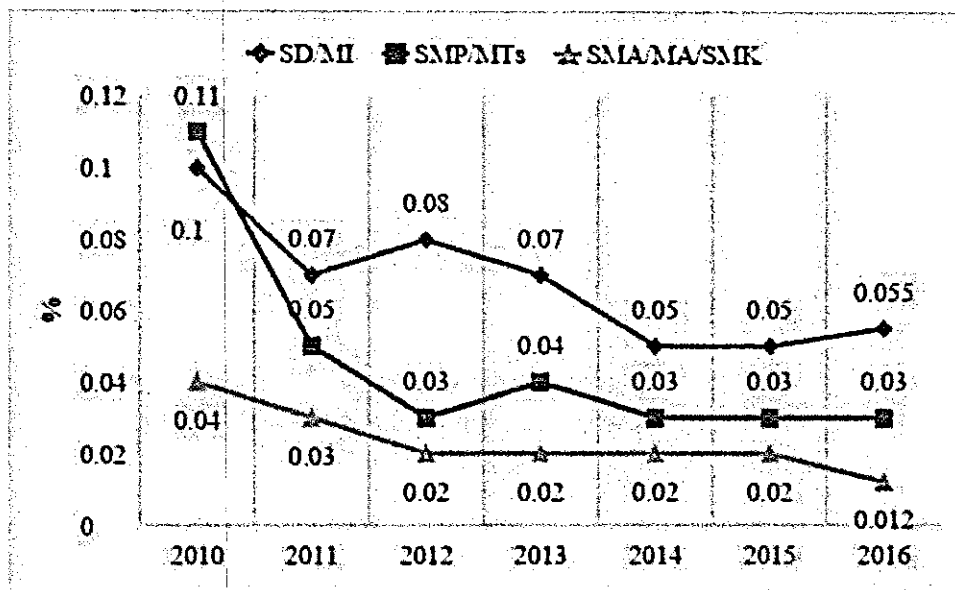
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pringsewu, 2017

Gambar 6. 17 Rasio Ketersediaan Sekolah di Kabupaten Pringsewu Tahun 2010–2016

Dari data ini terlihat bagaimana kecukupan jumlah sekolah di Kabupaten Pringsewu. Baik pada pendidikan SD, SMP, atau SMA tidak ada yang mencukupi kebutuhan fasilitas sekolah di Kabupaten Pringsewu. Untuk SD persentasenya selalu bertambah setiap tahunnya walaupun tidak signifikan, begitupun SMP dan SMA. Untuk SMP dan SMA bahkan tidak bisa mencapai 50% untuk kebutuhan fasilitas sekolah selama 7 tahun waktu berjalan. Ini menunjukkan masih banyak masyarakat di Kabupaten Pringsewu yang terkendala untuk menyelesaikan kebutuhan pendidikan dasarnya, karena kekurangan fasilitas belajar mengajar.

11. Angka Putus Sekolah (APS) SD/SMP/SMA

Angka putus sekolah mencerminkan jumlah anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Penyebab utama anak putus sekolah antara lain karena kondisi ekonomi, kesadaran pentingnya pendidikan, dan keadaan geografis yang kurang menguntungkan. Perhitungan angka putus sekolah adalah Persentase jumlah siswa jenjang pendidikan tertentu yang putus sekolah terhadap jumlah seluruh siswa tahun sebelumnya pada jenjang pendidikan tertentu.



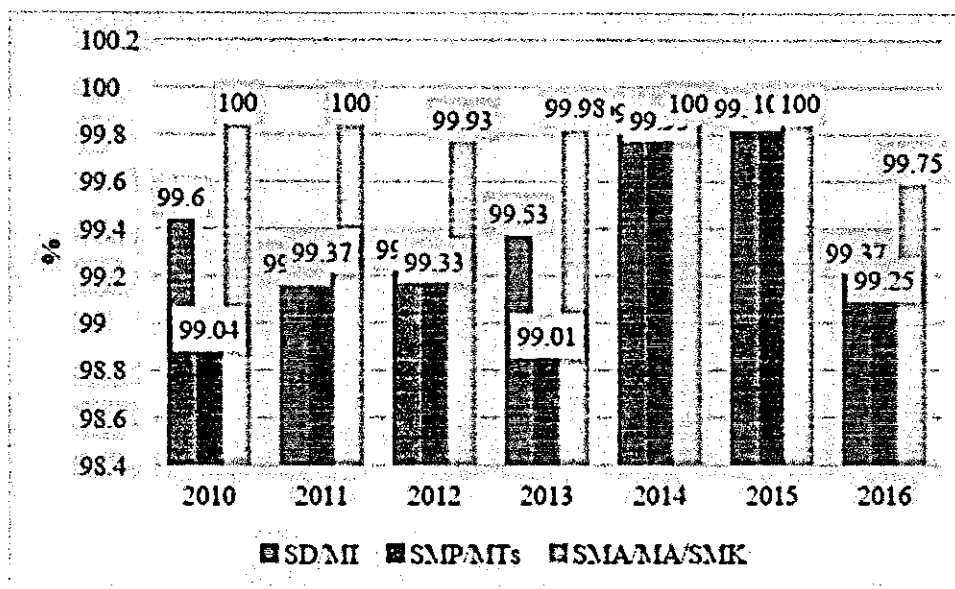
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pringsewu, 2017

Gambar 6. 18 Angka Putus Sekolah di Kabupaten Pringsewu Tahun 2010–2016

Data ini menunjukkan persentase murid yang tidak menyelesaikan pendidikannya dari tiap jenjang. Ini merupakan hasil yang baik dimana terlihat selama 7 tahun waktu berjalan, persentase ini terus menurun setiap tahunnya. Ditambah persentase ini tergolong sangat kecil yang bisa diartikan hampir 100% siswa tidak menghentikan masa bersekolahnya. Hal ini menunjukkan semangat juang yang tinggi baik dari orang tua maupun anak mereka, untuk bisa mengejar pendidikan untuk taraf hidup yang lebih baik.

a. Angka Kelulusan SD/SMP/SMA

Angka kelulusan sekolah merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan dalam pengelolaan pendidikan di suatu daerah. Angka kelulusan yang semakin tinggi, mencerminkan semakin berhasilnya sistem pengelolaan pendidikan yang dilaksanakan. Perhitungan angka kelulusan adalah merupakan Persentase jumlah siswa lulusan jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi tahun sebelumnya pada jenjang pendidikan tersebut.



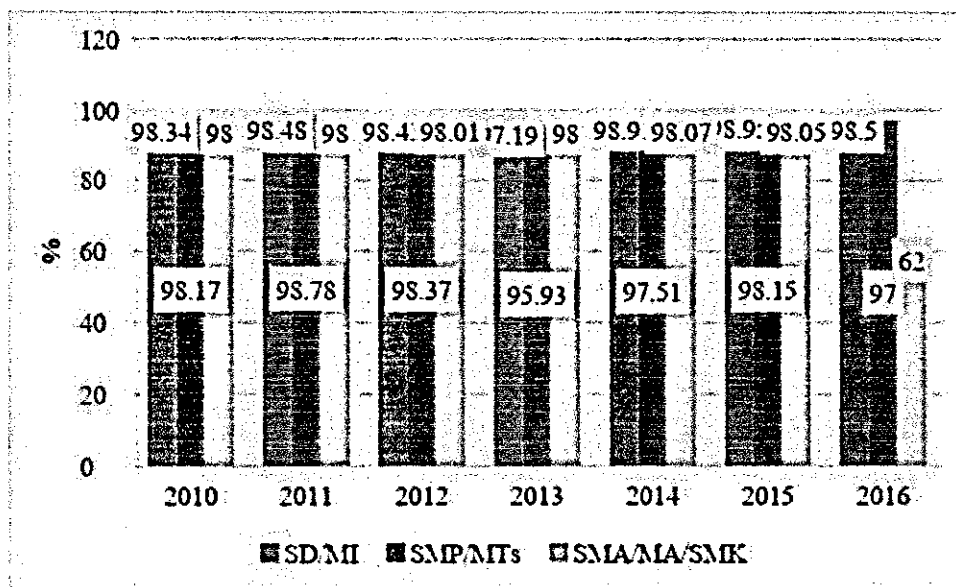
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pringsewu, 2017

Gambar 6. 19 Grafik Angka Kelulusan Sekolah di Kabupaten Pringsewu Tahun 2010–2016

Data ini menunjukkan persentase kelulusan murid dari tiap jenjang. Ini juga merupakan hasil yang cukup baik dimana terlihat selama 7 tahun waktu berjalan, persentase kelulusan selalu diatas 99% dan terbilang konstan tanpa ada penurunan yang signifikan. Ditambah persentase ini tergolong sangat besar yang bisa diartikan hampir 100% siswa tidak menghentikan masa bersekolahnya. Hal ini menunjukkan semangat juang yang tinggi baik dari orang tua maupun anak mereka, untuk bisa mengejar pendidikan untuk taraf hidup yang lebih baik

12. Angka Melanjutkan Sekolah

Angka melanjutkan sekolah menggambarkan jumlah anak usia sekolah yang meneruskan pendidikannya ke jenjang pendidikan berikutnya. Makin tinggi angka melanjutkan sekolah, maka semakin baik kinerja dalam bidang pendidikan.



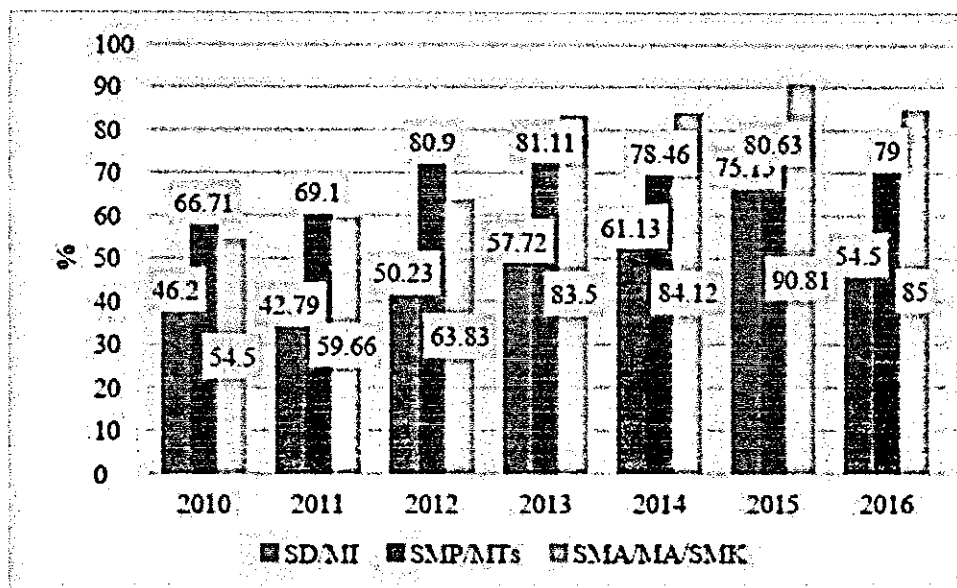
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pringsewu, 2017

Gambar 6. 20 Grafik Angka Melanjutkan Sekolah di Kabupaten Pringsewu Tahun 2010–2016

Data ini menunjukkan persentase murid yang melanjutkan pendidikannya dari tiap jenjang. Ini juga merupakan hasil yang cukup baik dimana terlihat selama 7 tahun waktu berjalan, persentase terbilang konstan tanpa ada penurunan yang signifikan. Ditambah persentase ini tergolong sangat besar yang bisa diartikan hampir 100% siswa ingin melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan semangat juang yang tinggi baik dari orang tua maupun anak mereka, untuk bisa mengejar pendidikan untuk taraf hidup yang lebih baik. Akan tetapi juga terlihat penurunan yang cukup drastis pada tahun 2016 dimana minat untuk melanjutkan sekolah dari pendidikan SMA hanya sebesar 62%. Diharapkan fenomena ini tidak berlangsung lama, dikarenakan untuk menghadapi zaman yang sekarang tiap manusia harus dibekali kemampuan berpikir yang tinggi untuk bisa terus mengikuti perkembangan zaman.

16. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Guru yang memenuhi kualifikasi S1 atau D-IV merupakan indikator yang mencerminkan kelayakan guru dalam mengajar.



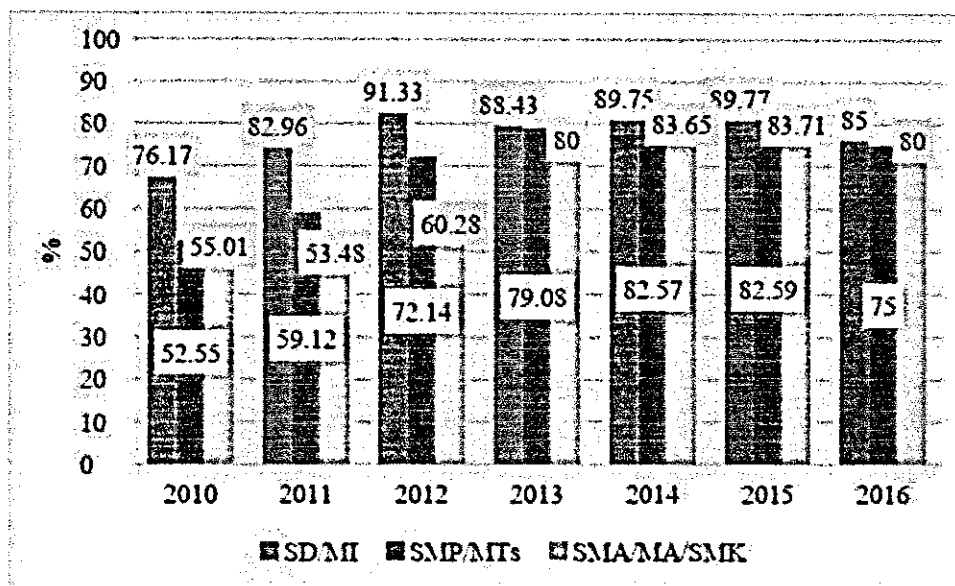
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pringsewu, 2017

Gambar 6. 21 Grafik Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Pringsewu Tahun 2010–2016

Dari data ini terlihat secara umum bagaimana kualitas guru yang mengajar di Kabupaten Pringsewu. Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, seorang guru sekolah setidaknya harus menyelesaikan pendidikan S1 atau minimal D4 untuk bisa mengajar di sekolah. Dari data ini menunjukkan bahwa kondisi belajar mengajar di Kabupaten Pringsewu tidak sesuai dengan Undang-Undang. Baik dari SD hingga SMA, tidak ada yang mencapai nilai 100% untuk guru yang sudah menyelesaikan pendidikan S1 atau D4.

17. Kualitas Guru Bersertifikasi Mengajar

Sertifikasi mendidik merupakan bukti formal atau pengakuan yang diberikan pada guru sebagai tenaga profesional.



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pringsewu, 2017

Gambar 6. 22 Guru Bersertifikat Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2010–2016

Sama halnya dengan data guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di atas. Data ini menampilkan persentase guru yang telah bersertifikat. Terlihat secara jelas baik dari SD hingga SMA, tidak ada yang mencapai nilai 100% untuk guru yang memiliki sertifikasi mengajar. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada guru yang mengajar tanpa memiliki sertifikat mengajar.

18. Permasalahan Sosial

Berdasarkan RPJMD 2017-2022, berikut merupakan konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Pringsewu yang berkaitan dengan pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Pringsewu:

- Program Pemerintah Pusat berupa Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Sejahtera, masih belum saling bersinergi dalam menangani kemiskinan. (RPJMD 2017-2022 Kab. Pringsewu)
- Masih rendahnya infrastruktur jaringan komunikasi dan informatika baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu maupun area publik.
- Masih kurangnya SDM di bidang komunikasi dan informasi yang disebabkan oleh kesenjangan antara kemajuan IPTEK yang sangat cepat dengan penguasaan teknologi oleh aparatur bidang komunikasi dan informasi.

- d. Permasalahan komunikasi dan Informasi menyangkut ketersediaan website dan jaringan internet bagi seluruh unit kerja di lingkungan PD di Kabupaten Pringsewu, yang sampai saat ini belum optimal.
- e. Belum optimalnya pengelolaan sistem diseminasi informasi dalam pendistribusian informasi daerah untuk mempublikasikan berbagai potensi daerah yang masih membutuhkan sentuhan para investor
- f. Masih rendahnya aplikasi IPTEK dalam sistem produksi UMKM sehingga kurang mendukung daya saing dan kualitas produksi.
- g. Kurangnya minat baca masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya budaya membaca masyarakat. Saat ini keberadaan perpustakaan masih didominasi milik sekolah atau Perguruan Tinggi. Sedangkan perpustakaan yang dikelola pekon masih sangat kecil.

6.4.2 Sumber Daya Aparatur Sipil Negara Kabupaten Pringsewu

1. Bimbingan Teknis dan Pelatihan Sumber Daya Manusia

Dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara di Kabupaten Pringsewu, pemerintah daerah tersebut seringkali mengikuti atau mengadakan bimbingan teknis, pelatihan, workshop dan lokakarya di Kabupaten Pringsewu serta baik di Luar Kabupaten Pringsewu maupun di Luar Provinsi Lampung. Adapun macam-macam jenis pelatihan yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

- a. Kursus-kursus singkat/pelatihan/Bimtek GCIO
- b. Kursus-kursus singkat/pelatihan/Bimtek/Workshop/Lokakarya dan sejenisnya Keluar Wilayah Provinsi Lampung
- c. Kursus-kursus singkat/pelatihan Diklat Struktural dan Fungsional
- d. Bimbingan Teknis/Pelatihan/Pendidikan Formal dan Non Formal
- e. Pelatihan SDM dalam bidang sesuai dengan OPD masing-masing

Untuk pelatihan GCIO merupakan pelatihan khusus yang didapat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. GCIO adalah sebuah jabatan strategis yang memadukan teknologi dan sistem informasi dengan aspek-aspek manajemen lainnya agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi pemerintahan.

CIO adalah eksekutif yang bertanggung jawab atas perencanaan, penyelarasan, penyiapan, implementasi, dan evaluasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di dalam suatu organisasi. Mengingat pentingnya jabatan tersebut, dukungan kompetensi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya sangat diperlukan.

Dari berbagai bentuk bimbingan teknis dan pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya aparatur sipil negara untuk inovasi daerah di Kabupaten Pringsewu khususnya pada bidang teknologi dan informasi.

2. Profil Pejabat Organisasi Perangkat Daerah

Dalam tiap Organisasi Perangkat Daerah terdapat jabatan struktural yang memiliki tanggung jawab di bidangnya masing-masing. Adapun struktur jabatan secara berurut dari yang tinggi yaitu Kepala Dinas atau Badan, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian, Bidang atau Seksi.

Tabel 6. 18 Profil Pejabat Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2021

INSTANSI	NAMA JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	LAMA MENJABAT
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepala BKPSDM	Magister Manajemen	1 tahun 2 bulan
	Sekretaris BKPSDM	Magister Teknik	8 bulan
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sarjana Ekonomi	8 bulan
	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Magister Manajemen	1 tahun 11 bulan
	Kepala Bidang Pengadaan, Pembinaan dan Informasi ASN	Magister Manajemen	10 bulan
	Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Fasilitasi Profesi ASN	Sarjana Teknik	10 bulan

INSTANSI	NAMA JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	LAMA MENJABAT
	Kepala Sub Bidang Pembinaan, Disiplin dan Penghargaan ASN	Magister Manajemen	10 bulan
	Kepala Sub Bidang Data, Dokumentasi dan Informasi ASN	(Tidak Ada Pejabat)	-
	Kepala Bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan Kompetensi	Magister Sains	1 tahun 2 bulan
	Kepala Sub Bidang Mutasi dan Kependidikan	Sarjana Ekonomi	2 tahun 10 bulan
	Kepala Sub Bidang Diklat Teknis Per Jenjangan dan Teknis Fungsional	Magister Manajemen	2 tahun 10 bulan
	Kepala Sub Bidang Promosi, Pengembangan Karir dan Kompetensi	Sarjana Teknik	1 tahun 1 bulan
Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala DISKOMINFO	Magister Manajemen	1 tahun 10 bulan
	Sekretaris DISKOMINFO	Sarjana Pendidikan	6 bulan
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sarjana Sains	4 tahun 10 bulan
	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sarjana Komputer	5 bulan

INSTANSI	NAMA JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	LAMA MENJABAT
	Kepala Bidang Tata Kelola SPBE, Persandian dan Keamanan Informasi	Sarjana Ekonomi	5 bulan
	Kepala Seksi Komunikasi Publik	Sarjana Ilmu Pemerintahan	10 bulan
	Kepala Seksi Pengelolaan Infrastruktur dan Sumber Daya SPBE	Sarjana Komputer	10 bulan
	Kepala Seksi Aplikasi Informatika	Sarjana Hukum	5 bulan
	Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik Sektoral	Sarjana Sosial	6 bulan
	Kepala Seksi Informasi Publik	Sarjana Komputer	10 bulan
	Kepala Seksi Statistik Sektoral	Magister Manajemen	10 bulan
	Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi	Magister Manajemen	10 bulan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala DISDIKBUD	Magister Manajemen	1 tahun 10 bulan
	Sekretaris DISDIKBUD	Magister Pendidikan	6 bulan
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sarjana Ekonomi	3 tahun 9 bulan

INSTANSI	NAMA JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	LAMA MENJABAT
	Kepala Sub Bagian Keuangan	Magister Ilmu Pemerintahan	4 tahun 10 bulan
	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Magister Manajemen	1 tahun 11 bulan
	Kepala Bidang Pendidikan Dasar	Sarjana Pendidikan	2 tahun 8 bulan
	Kepala Seksi Pembinaan SD	Sarjana Pendidikan	2 bulan
	Kepala Seksi Pembinaan SMP	Magister Pendidikan	2 tahun 10 bulan
	Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar	Magister Pendidikan	2 bulan
	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas	Sarjana Pendidikan	1 tahun 11 bulan
	Kepala Seksi Pembinaan PAUD	Sarjana Pendidikan	2 bulan
	Kepala Seksi Pembinaan Dikmas	Sarjana Pendidikan	2 bulan
	Kepala Seksi Kesetaraan	Sarjana Pendidikan	4 tahun 10 bulan
	Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan	Sarjana Pendidikan	6 bulan
	Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD-Dikmas	Magister Manajemen	4 tahun 10 bulan

INSTANSI	NAMA JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	LAMA MENJABAT
	Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan SD	Sarjana Pendidikan SD	2 tahun 7 bulan
	Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan SMP	Sarjana Pendidikan	2 tahun 9 bulan
	Kepala Bidang Kebudayaan	Sarjana Pendidikan	6 bulan
	Kepala Seksi Pelestarian Adat Budaya	Sarjana Pendidikan	2 bulan
	Kepala Seksi Kesenian dan Kelembagaan Adat	Sarjana Sosial	2 bulan
	Kepala Seksi Promosi Seni Budaya Kreatif	Sarjana Ekonomi	4 tahun 10 bulan

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pringsewu, 2021

Dari data profil pejabat di atas dapat diketahui bahwa sering terjadinya rolling jabatan yang tidak sesuai dengan latar belakang SDM ASN tersebut serta angka rata-rata lama menjabat juga menjadi rendah. Hal ini tentu akan mengurangi tingkat percepatan inovasi yang berasal dari SDM ASN.

Pada umumnya, beberapa OPD di Pringsewu sudah memiliki program-program yang mendukung keberlangsungan kegiatan Sumber Daya SIDA di Kabupaten Pringsewu. Terdapat juga program inovasi yang telah dibuat untuk mengoptimalkan potensi dan sektor unggul ekonomi. Namun masih perlu adanya lembaga khusus atau program yang dapat mengintegrasikan untuk mengontrol, menjamin keefektifan dan keberlanjutan program-program tersebut. Kegiatan Inovasi Daerah telah tersusun dalam SK Bupati Pringsewu No. B/88/KPTS/B.01/2020 tentang Nama-Nama Kegiatan Inovasi Daerah ke Dalam Suatu Keputusan Bupati Pringsewu.

Tabel 6. 19 Kegiatan Inovasi Daerah Kabupaten Pringsewu

No.	Uraian Nama Kegiatan/Inovasi	Perangkat Daerah Instansi
1	Peningkatan Akurasi Penyusunan Data formasi kebutuhan guru melalui aplikasi google forms di Kabupaten Pringsewu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu
2	Produktifitas dan Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan paving blok manual	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pringsewu
3	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Pelatihan barbershop	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pringsewu
4	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Pelatihan menjahit	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pringsewu
5	Pendidikan dan pelathian keterampilan pelatihan sablon	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pringsewu
6	Pendidikan dan pelatihan keterampilan pelatihan sangkar burung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pringsewu
7	Peningkatan Kapasitas Pengelola Bumdes	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu
8	Peningkatan Peran Masyarakat dalam membangun desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu
9	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Pekon	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu
10	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pembangunan Pekon	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu
11	Pelatihan Kemasan, Perijinan, dan Pemasaran	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
12	Pelatihan Kerajinan Anyaman	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
13	Pelatihan Pengolahan Kopi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
14	Partisipasi dalam Inacraft	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
15	Pelatihan Souvenir Kain Perca	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
16	Workshop untuk bidang pelayanan di 9 Kecamatan dalam Rangka Memberikan informasi terkait pelayanan perizinan dan non perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu
17	Pelatihan dan sosialisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu
18	Pelatihan dan sosialisasi perikaan budidaya dan tangkap	Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu
19	Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna	Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu
20	Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian Modern Bercoco Tanam (Dukungan Aplikasi Transplanter)	Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu
21	Penyuluhan dan pendampingan petani pelaku agribisnis	Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu

No.	Uraian Nama Kegiatan/Inovasi	Perangkat Daerah Instansi
22	Pekan Nasional (Penas) Kontak Tani Nelayan Andalan (Ktana)	Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu
23	Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani	Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu
24	Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Penyuluh Pertanian	Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu
25	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu)	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu
26	Bimbingan Teknis Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu
27	Bimtek Aplikasi SiRUP Pringsewu Bersahaja	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu
28	Binawakekon (Pembinaan dan pengawasan Keuangan Pekon se-kecamatan pagelaran Utara	Kecamatan Pagelaran Pagelaran Kabupaten Pringsewu

Sumber: Keputusan Bupati Kabupaten Pringsewu, 2020

6.5 Arah Pembangunan Kabupaten Pringsewu

Kabupaten Pringsewu telah memiliki arahan pembangunan pengembangannya sampai dengan tahun 2031 yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pringsewu tahun 2011-2031. Kemudian setiap dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Kabupaten Pringsewu memiliki kesesuaian dengan arahan pembangunan dalam RTRW Kabupaten Pringsewu. Berikut merupakan hubungan arah pembangunan Kabupaten Pringsewu berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Pringsewu, RPJMD Kabupaten Pringsewu, dan berdasarkan RPJP Kabupaten Pringsewu.

	RTRW Kabupaten Pringsewu (2011 – 2031)	RPJMD Kabupaten Pringsewu (2017 – 2022)	RPJP Kabupaten Pringsewu (2005 – 2025)
Arah Pembangunan	Penataan ruang di wilayah Kabupaten Pringsewu adalah untuk mewujudkan Kabupaten Pringsewu sebagai pusat pendidikan, pusat perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan dengan didukung oleh sumber daya manusia yang cerdas dan kompetitif, dalam rangka menciptakan masyarakat yang sejahtera.	Pringsewu Berdaya Saing, Harmonis Dan Sejahtera (Bersahaja). Dimana untuk mewujudkan hal tersebut perlu untuk: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Publik dan Permukiman Secara Merata. ▪ Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkarakter. ▪ Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Masyarakat. ▪ Memperkuat Kualitas Ketahanan Pangan dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. ▪ Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Ketenteraman Masyarakat. 	Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing. Untuk mewujudkan hal tersebut sehingga perlu untuk: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Membangun sarana dan prasarana wilayah serta utilitas dasar untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar ▪ Mengembangkan perekonomian daerah berbasis keunggulan sumber daya melalui tata kelola yang modern dan berwawasan lingkungan ▪ Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, bermoral tinggi dan berkompetensi ▪ Membangun kehidupan masyarakat yang tenteram harmonis, beragama dan berbudaya ▪ Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berkelanjutan (<i>good governance, clean governance and sustainable</i>)

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hubungan antara ketiga dokumen perencanaan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan terkait dengan arahan pembangunan Kabupaten Pringsewu untuk pengembangan inovasi daerah dimana Pemerintah Kabupaten Pringsewu memiliki fokus pembangunan terhadap 3 hal, yaitu:

1. SDM (Pengembangan pusat Pendidikan sebagai upaya mewujudkan SDM yang unggul dan meningkatkan daya saing perekonomian, tentram harmonis dan berbudaya)
2. Infrastruktur Publik (Sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan ekonomi)
3. Tata Kelola (mewujudkan kelembagaan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berkelanjutan).

BAB VII

PERUMUSAN KONSEP KONDISI SIDA KABUPATEN PRINGSEWU

7.1 Analisis SWOT SIDA

7.1.1. SWOT Potensi Ekonomi dan Sektor Unggulan Kabupaten Pringsewu

Berdasarkan dari data potensi keonomi dan sektor unggulan Kabupaten Pringsewu, berikut adalah penjabaran SWOT Potensi Ekonomi dan Sektor Unggulan Kabupaten Pringsewu:

- *Strength* (Kekuatan)
 - Potensi sumber daya alam yang melimpah
 - Kegiatan perekonomian pada bidang pertanian, perkebunan, perikanan, telah didukung oleh OPD
 - Potensi kegiatan usaha yang sangat luas
- *Weakness* (Kelemahan)
 - Kapasitas dan pengembangan sumber daya manusia belum optimal
 - Belum adanya pembinaan secara berkesinambungan terhadap pelaku usaha
 - Kelompok UMKM masih menghadapi kesulitan yang mendasar, misalnya permodalan, kemampuan manajerial yang rendah, diikuti dengan rendahnya kualitas prodk, serta ketertinggalan informasi dan teknologi.
- *Opportunity* (Peluang)
 - Kemampuan SDM dalam penguasaan IPTEK untuk kegiatan perekonomian
 - Usaha berbasis teknologi (e-commerce dan jejaring usaha) sudah mulai digalakan
 - Adanya pembangunan infrastruktur strategis termasuk jalan tol dan bendungan serta Kawasan industri skala nasional di Provinsi Lampung
- *Threat* (Ancaman)
 - Dampak dari pandemi *covid-19*
 - Pesatnya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi global dan belum siapnya infrastruktur terkait

7.1.2 SWOT Kelembagaan SIDA Kabupaten Pringsewu

Berdasarkan dari data kelembagaan SIDA Kabupaten Pringsewu, berikut adalah penjabaran SWOT Kelembagaan SIDA Kabupaten Pringsewu:

- *Strength* (Kekuatan)
 - Telah ada mempunyai Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Inovasi Daerah yang memuat ketentuan mengenai inovasi daerah di Pringsewu.
 - Sektor unggulan pertanian memiliki beberapa kelembagaan berupa kelompok masyarakat yang tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Pringsewu.
 - Seluruh organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pringsewu telah menerapkan *e-government* untuk mewujudkan system informasi dan komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- *Weakness* (Kelemahan)
 - Dalam kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pringsewu, sebagian besar belum mempunyai bagian kelembagaan yang khusus bertugas menginisiasi inovasi daerah, baik berupa inisiatif, perencanaan sampai pelaksanaan inovasi daerah.
 - Bab X Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Inovasi Daerah memuat Penilaian dan Penghargaan Inovasi, tetapi belum ada teknis pelaksanaannya untuk penguatan budaya inovasi
 - Belum seluruhnya pelayanan di setiap organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pringsewu yang menerapkan teknologi online yang cepat.
- *Opportunity* (Peluang)
 - Lembaga pendidikan di Kab Pringsewu dan sekitarnya dapat mendukung inisiatif inovasi daerah untuk wilayah Pringsewu dan pelaksanaannya
- *Threat* (Ancaman)
 - Masih ada ketergantungan terhadap pusat dalam hal inisiatif program dan pembiayaan

7.1.3 SWOT Jaringan SIDA Kabupaten Pringsewu

Berdasarkan dari data jaringan SIDA dapat disimpulkan SWOT dari hasil tabulasi program. Berikut penjabaran SWOT Jaringan SIDA di Kabupaten Pringsewu:

- *Strength* (Kekuatan)
 - Dalam pengembangan jaringan, keberadaan institusi akademisi di Kabupaten Pringsewu dan Provinsi Lampung merupakan kekuatan dalam pengembangan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pringsewu.
 - Jumlah penelitian yang cukup menjadi kekuatan yang dapat dimanfaatkan dalam penanganan permasalahan dan pengembangan Kabupaten Pringsewu.

- *Weakness* (Kelemahan)
 - Kelemahan dalam pengembangan jaringan SIDA adalah masih belum adanya wadah yang mempertemukan berbagai penelitian (hub) terkait Kabupaten Pringsewu.
 - Masih minimnya program stimulatif bagi internal OPD dalam melakukan penelitian.
 - Kelemahan lain adalah belum adanya sarana prasarana yang berperan dalam pengembangan sistem inovasi daerah.
- *Opportunity* (Peluang)
 - Beberapa peluang yang dapat ditangkap oleh Pemda Kabupaten Pringsewu adalah tingginya penelitian yang berasal dari luar Kabupaten Pringsewu.
- *Threat* (Ancaman)
 - Ancaman yang perlu diperhatikan adalah tingginya program inovasi yang telah diterapkan oleh pemda diluar Pringsewu, sehingga hilangnya peluang Kabupaten Pringsewu dalam mewujudkan inovasi daerah.

7.1.4. SWOT Sumber Daya SIDA Kabupaten Pringsewu

Berdasarkan dari data sumber daya SIDA dapat disimpulkan SWOT dari hasil tabulasi program. Berikut penjabaran SWOT sumber daya SIDA di Kabupaten Pringsewu:

- *Strength* (Kekuatan)
 - Jumlah usia produktif yang lebih tinggi dibandingkan dengan usia lainnya dapat menghasilkan sumber daya manusia yang efisien dalam pengembangan inovasi yang lebih banyak
 - Tingkat capaian IPM termasuk dalam kategori menengah atas dengan nilai 70,3 serta merupakan peringkat ketiga se-Provinsi Lampung
 - Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Murni yang terus meningkat setiap tahunnya
 - Terdapat sekolah kejuruan dan perguruan tinggi yang dapat mendukung peningkatan inovasi sesuai potensinya
- *Weakness* (Kelemahan)
 - Masih banyaknya kejadian putus sekolah dan tidak memenuhi kebijakan wajib belajar 9 tahun
 - Masih rendahnya rasio ketersediaan sekolah bahkan kurang dari 50% untuk SMP dan SMA
 - Masih minimnya guru yang memenuhi kualifikasi lulusan S-1/D-IV
 - Masih terdapat konflik sosial dengan rendahnya kemauan untuk melakukan inovasi
 - Sering terjadinya rolling jabatan yang tidak sesuai dengan latar belakang SDM serta angka rata-rata lama menjabat juga menjadi rendah

- *Opportunity* (Peluang)
 - Pelatihan dan Bimtek yang beragam dalam peningkatan kualitas SDM ASN
- *Threat* (Ancaman)
 - Persaingan nasional atau global terkait kualitas SDM yang sudah berjalan, sedangkan SDM lokal belum banyak bisa ikut didalamnya

7.2 Permasalahan dalam Pelaksanaan SIDA

Dalam pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Di Kabupaten Pringsewu terdapat beberapa permasalahan yang menjadi tantangan. Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa instansi, maka diperoleh informasi bahwa permasalahan tersebut diantaranya yaitu:

A. Tata Kelola :

1. Masih belum terselenggaranya evaluasi terhadap pengembangan inovasi;
2. Masih belum terbiasanya tata Kelola pemerintah menggunakan sistem elektronik

B. Sarana dan Prasana

1. Keterbatasan sarana dan prasana komunikasi dan informatika

C. Anggaran

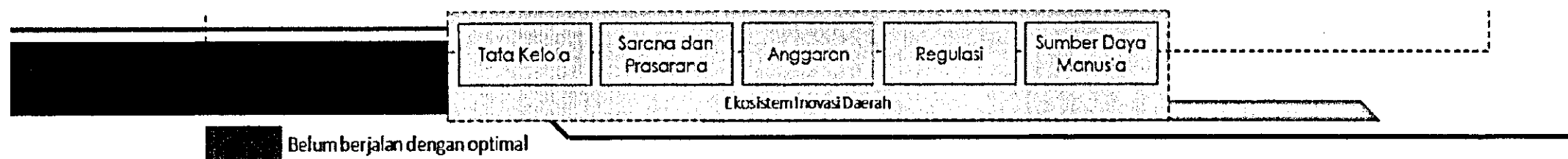
1. Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap keterbatasan anggaran pada setiap dinas

D. Sumber Daya Manusia

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan kebutuhan dari tupoksi Dinas (Efektivitas setiap individu)
2. Keterbatasan setiap OPD untuk mulai mengoperasikan jalannya pemerintahan secara elektronik

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Gambar 7.1 Permasalahan dalam Pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)



BAB VIII

FOKUS PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS SIDA

Penetapan indikator ketercapaian kinerja SIDA Kabupaten Pringsewu bertujuan untuk memberi arahan mengenai pengukuran keberhasilan pencapaian SIDA Kabupaten Pringsewu sampai akhir periode perencanaan. Penetapan indikator SIDA Kabupaten Pringsewu diakumulasi dari pencapaian indikator keluaran program SIDA Kabupaten Pringsewu setiap tahun, sehingga kondisi yang diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun perencanaan dapat dicapai. Indikator ketercapaian SIDA Kabupaten Pringsewu dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja capaian SIDA Kabupaten Pringsewu.

Adapun indikator ketercapaian kinerja Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pringsewu terbagi menjadi indikator ketercapaian mengenai potensi ekonomi dan sektor unggulan, kelembagaan SIDA, jaringan SIDA dan sumber daya SIDA Kabupaten Pringsewu. Berikut adalah indikator ketercapaian kinerja SIDA Kabupaten Pringsewu.

Tabel 8. 1 Indikator Ketercapaian Kinerja SIDA Kabupaten Pringsewu

No	Komponen	Variabel	Indikator
1	Potensi Ekonomi dan Sektor Unggulan	<ul style="list-style-type: none"> Lembaga pendamping dan pembina kelompok pertanian dan perkebunan serta pelaku usaha Pembuatan program/kegiatan inovasi yang mendukung ekonomi bagi kelompok pertanian dan perkebunan, pelaku usaha, melibatkan dinas koperasi dan umkm, perguruan tinggi dan lembaga pengabdian masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Lembaga integrasi kegiatan inovasi bidang ekonomi Penjaminan mutu kegiatan inovasi Jumlah program pendukung kegiatan ekonomi berbasis inovasi Jumlah perusahaan/usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah Program pembinaan dan pelatihan kelompok pertanian dan perkebunan, serta pelaku usaha
2	Kelembagaan SIDA	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan lembaga yang meningkatkan penyelenggaraan inovasi daerah Pembuatan program-program yang meningkatkan budaya inovasi daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Terbentuknya badan penelitian dan pengembangan Kab Pringsewu Jumlah inisiatif inovasi daerah meningkat dari OPD, perguruan tinggi dan kelembagaan masyarakat

No	Komponen	Variabel	Indikator
3	Jaringan SIDA	<ul style="list-style-type: none"> Komunikasi antar Lembaga dalam pengembangan Inovasi Daerah Upaya mobilisasi Sumber Daya Manusia Pemanfaatan sarana prasarana dan Hak Kekayaan Intelektual 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah partisipan yang mengikuti komunikasi pengembangan inovasi daerah Jumlah Kerjasama dengan akademisi, LSM dan Swasta dalam pengembangan inovasi daerah Jumlah program kegiatan antar OPD dalam pengembangan inovasi daerah Jumlah program kegiatan antar OPD dalam pengembangan keterampilan / pengetahuan SDM Jumlah paten yang didaftarkan Jumlah sarana prasarana pendukung SIDA Jumlah publikasi terkait inovasi daerah Jumlah Program pendukung Inovasi Daerah Jumlah Peserta yang mengikuti program Inovasi Daerah
4	Sumber Daya SIDA	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan penguatan pendidikan dan pelatihan inovasi untuk pengembangan inovasi Pengembangan sosialisasi pentingnya berinovasi 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pelayanan sarana pendidikan Jumlah guru kualifikasi lulusan S-1/D-IV Persentase Angka Partisipasi Murni Jumlah keikutsertaan pelatihan dan bimbingan teknis di bidang teknologi dan informasi

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Dalam rencana penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pringsewu, berikut merupakan pilar penguatan yang disusun sebagai dasar dari kebijakan yang akan dilakukan untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka mencapai kondisi SIDA yang diinginkan:

Tabel 8. 2 Pilar Penguatan SIDA Kabupaten Pringsewu

No	Pilar Penguatan SIDA Kabupaten Pringsewu	Sistem Inovasi Daerah	Kerangka Kebijakan	Kondisi SIDA yang akan dicapai
1	Ekosistem Inovasi didalam Tata Kelembagaan Pemerintah Daerah	Kelembagaan SIDA	Membenahi tata kelola dan memperbaiki akuntabilitas	<p>a. Terimplementasinya open data di level K/L sebagai bentuk tanggung jawab, sekaligus untuk mendorong interaksi antar actor</p> <p>b. Adanya partisipasi masyarakat untuk melakukan evaluasi Kebijakan hingga di tingkat desa</p>
		Jaringan SIDA	Membentuk Jaringan yang dinamis	<p>a. Meningkatnya jumlah dan intensitas kerja sama antara industri, universitas, dan lembaga riset</p> <p>b. Meningkatnya persentase peneliti/perekayasa/analisis kebijakan yang terpapar kolaborasi riset dan inovasi internasional</p>
		Sumber Daya SIDA	Menyediakan dukungan sumber daya yang memadai	<p>a. Terciptanya SDM riset, inovasi, dan kebijakan publik yang andal melalui peningkatan kapasitas terus-menerus (baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan) sebagai bagian dari proses pengembangan jenjang karier</p> <p>b. Meningkatnya partisipasi masyarakat (nonprofit) dalam Pendanaan riset dan inovasi yang mendorong belanja riset Mayoritas bersumber dari swasta</p> <p>c. Adanya alokasi pendanaan riset untuk isu terkini (emerging issues) dan kebutuhan yang berubah</p> <p>d. Terbentuknya sistem pendanaan riset dan inovasi terintegrasi dengan ownership stakeholder tinggi</p>
		Ekonomi dan Sektor Unggulan	Memastikan kerangka regulasi yang kuat dan jelas	a. Kebijakan penelitian dan Inovasi yang konsisten Dengan domain Kebijakan

No	Pilar Penguatan SIDA Kabupaten Pringsewu	Sistem Inovasi Daerah	Kerangka Kebijakan	Kondisi SIDA yang akan dicapai
				lain (misalnya Ekonomi, industri, Perdagangan, dan Pendidikan) sehingga berdampak pada ekonomi dan sector unggulan b. Perbaikan pengaturan Data untuk tata Kelola Ekosistem pengetahuan Dan inovasi c. Prioritas penelitian dan inovasi pada ekonomi dan sector unggulan di Kabupaten Pringsewu
2	Ekosistem Inovasi didalam Pengembangan Ekonomi dan Sektor Unggulan	Kelembagaan SIDA	Membenahi kelembagaan pengembangan ekonomi dan sector unggulan	a. Pembentukan klaster pelaku usaha ekonomi / sector unggulan b. Membentuk forum antar pelaku usaha, akademisi dan pemerintah
		Jaringan SIDA	Membentuk Jaringan yang dinamis	a. Meningkatkan Kerjasama antar pelaku usaha lokal dengan pelaku usaha diskala yang lebih luas b. Menyelenggarakan kegiatan / event untuk memamerkan produk, ekonomi atau sector unggulan
		Sumber Daya SIDA	Menyediakan dukungan sumber daya yang memadai	a. Melakukan peningkatan SDM terkait pengelolaan usaha, ekonomi dan sector unggulan
		Ekonomi dan Sektor Unggulan	Memastikan kerangka regulasi yang kuat dan jelas	a. Melakukan peningkatan kebijakan yang mendorong pengembangan produk, ekonomi dan sector unggulan
3	Ekosistem Inovasi didalam Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	Kelembagaan SIDA	Memperkuat Kelembagaan Tim Koordinasi	a. Kelembagaan Sistem Inovasi berfungsi dengan baik b. SOP Tim Koordinasi ada dan dijalankan
		Jaringan SIDA	Memperkuat Kerjasama Antar daerah dan antara daerah dengan pusat	a. Kerjasama antar daerah terjalin b. Kerjasama Lembaga pusat dan perguruan tinggi terjalin

No	Pilar Penguatan SIDA Kabupaten Pringsewu	Sistem Inovasi Daerah	Kerangka Kebijakan	Kondisi SIDA yang akan dicapai
		Sumber Daya SIDA	Menumbuhkembangkan Kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Berfungsinya ruang publik kreatif b. Posyantek berfungsi memecahkan permasalahan kebutuhan teknologi tepat guna c. Meningkatkan kapasitas inovatif aparat pemkab melalui implementasi inovasi daerah d. Tersedianya relawan berinovasi dari kalangan mahasiswa
		Ekonomi dan Sektor Unggulan	Mengembangkan Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis untuk daya Tarik penanaman modal dan perijinan	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbangunnya system perizinan bisnis/investasi yang cepat b. Adanya insentif/pembiayaan kreativitas keinovasian c. Memiliki komunitas kreatif d. Investasi IPTEKIN
4	Ekosistem Inovasi didalam Pengembangan Bisnis Berbasis Teknologi (teknopreneur)	Kelembagaan SIDA	Memperkuat kelembagaan pusat inovasi yang memiliki peran sebagai incubator dan BDSP (Layanan Pengembangan Bisnis) untuk pengembangan UMKM dan teknopreneur baru	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbentuknya dan berfungsinya kelembagaan incubator teknologi yang memberikan layanan inkubasi b. Terbentuknya dan berfungsinya BDSP (Business Development Service Provider)
		Jaringan SIDA	Mengembangkan interaksi antara penghasil Iptekin dengan UMKM dan Tenkpreneur	<ul style="list-style-type: none"> a. Terwujudnya Kerjasama antara penghasil Iptekin dengan UMKM /masyarakat dan menghasilkan Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) serta menghasilkan IKM Inovatif b. Meningkatnya permintaan perizinan bagi pelaku usaha mikro c. Terselenggaranya forum temu bisnis dan Kerjasama antar penghasil Iptekin dengan UMKM serta Lembaga pembiayaan

No	Pilar Penguatan SIDA Kabupaten Pringsewu	Sistem Inovasi Daerah	Kerangka Kebijakan	Kondisi SIDA yang akan dicapai
		Sumber Daya SIDA	Membangun budaya inovasi di kalangan Perguruan Tinggi dan Pemuda	a. Berkembangnya kurikulum teknopreneur di Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Vokasi
		Ekonomi dan Sektor Unggulan	Mengembangkan jenis usaha potensial baru yang inovatif	a. Tersedianya kajian potensi/prospek bisnis sebagai acuan pengembangan usaha baru

Sumber: Hasil Analisis, 2022

8.1 Visi Misi SIDA di Kabupaten Pringsewu

Berdasarkan upaya untuk mewujudkan arah pengembangan indikator inovasi yang akan dicapai, tentunya perlu ada dukungan Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Visi Misi Kabupaten Pringsewu. Pengembangan strategi Sistem Inovasi Daerah tentu akan mendukung visi Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu yaitu **“PRINGSEWU BERDAYA SAING, HARMONIS DAN SEJAHTERA (BERSAHAJA)”**.

Berikut tabel keterkaitan strategi terhadap pemaknaan visi RPJMD Kabupaten Pringsewu:

Tabel 8. 3 Keterkaitan Strategi Terhadap Pemaknaan Visi RPJMD Kabupaten Pringsewu

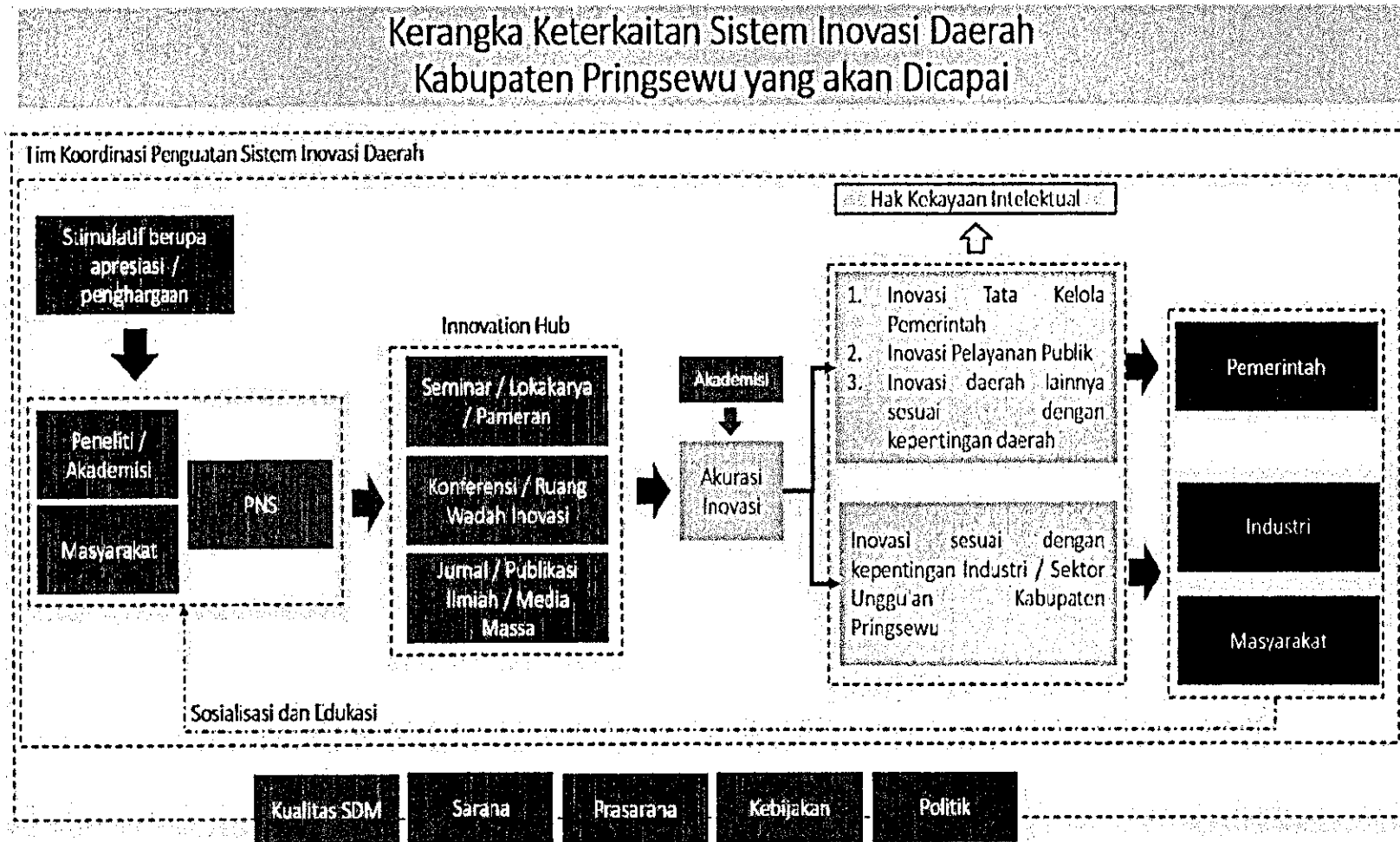
Pemaknaan Visi RPJMD Kabupaten Pringsewu	Strategi Penguatan SIDA
<p>Pembangunan lima tahun kedepan di Kabupaten Pringsewu diharapkan dapat mewujudkan kemampuan dan ketangguhan terhadap tatanan dasar masyarakat Pringsewu yang memiliki keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan global dimasa yang akan datang, yang di indikasikan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Infrastruktur yang memadai; Sumberdaya manusia yang berkualitas; Hasil produksi yang memenuhi standard global; Iklim usaha yang kondusif, dan Pemerintahan daerah yang profesional dan bersih. 	<p>Melakukan upaya untuk mewadahi inovasi yang berkaitan dengan komoditas unggulan dan sector ekonomi Kabupaten Pringsewu. Dimana hal ini perlu secara rutin dilakukan untuk direalisasikan pada berbagai lini pendukung daya saing daerah. Inovasi yang telah diakomodasi lalu diwujudkan melalui publikasi, pameran atau pembinaan terhadap <i>stakeholder</i> terkait.</p>

<p>Pembangunan lima tahun kedepan di Kabupaten Pringsewu diharapkan mampu menciptakan kondisi atau terjalannya tata hubungan masyarakat Kabupaten Pringsewu yang serasi dan selaras berdasarkan nilai-nilai agama (religius), kearifan lokal dan hukum, sehingga dapat tercipta sinergisitas kerja yang optimal dalam rangka membangun Kabupaten Pringsewu, yang diindikasikan dengan :</p>	<p>Pemerintah dapat mewadahi inovasi pada beberapa bidang social, kearifan lokal, kultur, budaya hingga agama. Dimana dalam menjawab tantangan masa depan, tentu membutuhkan alternatif solusi untuk menghindari terjadinya perpecahan social.</p>
<p>Pembangunan lima tahun kedepan di Kabupaten Pringsewu diharapkan mampu menciptakan kondisi atau terjalannya tata hubungan masyarakat Kabupaten Pringsewu yang serasi dan selaras berdasarkan nilai-nilai agama (religius), kearifan lokal dan hukum, sehingga dapat tercipta sinergisitas kerja yang optimal dalam rangka membangun Kabupaten Pringsewu, yang diindikasikan dengan :</p> <p>Tata hubungan antar dan inter agama, antar suku, antar budaya, antar <i>stakeholders</i>, antar lembaga, lingkungan hidup dan antar elemen masyarakat lainnya, yang senantiasa memegang teguh jejama secancangan;</p> <p>a. Kolaborasi tata hubungan masyarakat Kabupaten Pringsewu yang saling bersinergi membentuk kekuatan atau modal pembangunan.</p>	<p>Pemerintah dapat mewadahi inovasi pada beberapa bidang social, kearifan lokal, kultur, budaya hingga agama. Dimana dalam menjawab tantangan masa depan, tentu membutuhkan alternatif solusi untuk menghindari terjadinya perpecahan social.</p>
<p>Pembangunan lima tahun kedepan di Kabupaten Pringsewu diharapkan dapat mewujudkan kondisi masyarakat Kabupaten Pringsewu yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar dan pelayanan dasarnya sehingga dapat hidup nyaman, tenteram, damai, sentosa dan makmur lahir bathin, yang diindikasikan dengan :</p> <p>a. Terpenuhinya kebutuhan dasar, mencakup kebutuhan pangan, sandang dan papan;</p> <p>b. Terpenuhinya pelayanan dasar, mencakup pelayanan pendidikan; pelayanan kesehatan; pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang; pelayanan perumahan rakyat dan kawasan permukiman; pelayanan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta pelayanan sosial.</p>	<p>Strategi dalam mewujudkan pemaknaan visi ini adalah dengan mengakomodasi inovasi dibidang sarana, prasarana, ekonomi dan kebijakan. Dimana dalam mendukung hal tersebut tentunya perlu didukung dengan inovasi - inovasi yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kebutuhan dasar.</p>

<p>Pembangunan lima tahun kedepan di Kabupaten Pringsewu yang berdaya saing, harmonis dan sejahtera diharapkan senantiasa dibingkai dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Pringsewu bersahaja, yang diindikasikan dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pola hidup yang sederhana dan tidak berlebih-lebihan; b. Memiliki kewaspadaan yang tinggi terhadap segala ancaman; c. Berhati-hati dan bijaksana dalam mengambil keputusan; d. Memiliki karakter tinggi, malu untuk melakukan perbuatan tidak terhormat secara moral, dan Mengedepankan sikap kreatifitas dan optimis yang tinggi, sehingga mendapat kebahagiaan lahir dan bathin. 	<p>Pada pemaknaan ini, upaya dalam penguatan SIDA adalah dengan memberikan peningkatan SDM dan jaringan terkait system inovasi daerah di Kabupaten Pringsewu. Hal ini</p>
--	---

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Dalam mewujudkan kondisi yang akan dicapai, berikut adalah kerangka kerja yang akan dicapai Kabupaten Pringsewu dalam menghasilkan inovasi:



Sumber: Hasil Analisis, 2021

Gambar 8. 1 Kerangka Keterkaitan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pringsewu yang Akan Dicapai

8.2 Tujuan dan Sasaran

Dalam pengembangan sistem inovasi daerah tentunya perlu untuk menentukan arah pembangunan kedepannya. Hal ini ditinjau dari hasil identifikasi dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam penjelasan sistem inovasi daerah akan mengakomodir strategi dan indikator yang akan dicapai oleh Kabupaten Pringsewu. Kondisi yang menjadi acuan besar pengembangan system inovasi daerah dapat dilakukan melalui ketercapaian hal – hal berikut:

1. Terbangunnya kerangka umum dalam berperan menciptakan iklim inovasi yang kondusif. Upaya dalam mewujudkan tersebut adalah adanya system basis data inovasi yang baik. Selain itu terdapat beberapa komponen pendukung yaitu kebijakan penguatan serta pengembangan inovasi, sarana dan prasarana yang mendukung berkembangnya inovasi daerah. Upaya ini juga dapat dilakukan dengan melakukan stimulative berupa apresiasi bagi innovator yang rutin diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu.
2. Terbangunnya kelembagaan inovasi daerah yang mendukung kegiatan komunikasi, koordinasi, Kerjasama, kolaborasi, sehingga dapat memperkuat inovasi daerah. Peningkatan kelembagaan ini dapat dilakukan dengan memastikan adanya peningkatan kapasitas organisasi. Dengan keberadaan kelembagaan ini nantinya menjadi wadah untuk melakukan inkubasi inovasi, sehingga dapat berdampak terhadap pengembangan daerah secara efektif.
3. Terdapatnya system Kerjasama atau jaringan inovasi daerah dengan berbagai stakeholder yang bersifat pentahelix. Dimana stakeholder yang perlu dilibatkan adalah akademisi, masyarakat, industry dan media bersama pemerintah Kabupaten Pringsewu. Keberadaan model Kerjasama tersebut, diharapkan dapat diterapkan dalam rangka mendorong inovasi di Kabupaten Pringsewu.
4. Berkembangnya pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat melalui kurikulum yang berperan dalam menghasilkan budaya inovasi. Budaya inovasi dimaksudkan agar Kabupaten Pringsewu menjadi ruang bagi masyarakat yang memiliki inovasi. Secara nyata perlu adanya peningkatan usaha untuk melakukan sosialisasi dan kampanye inovasi agar akrab terhadap masyarakat. Dengan semakin meningkatnya budaya ini, diharapkan dapat memunculkan pelaku usaha kreatif dan inovatif untuk meningkatkan daya saing daerah.

5. Perlu adanya upaya system inovasi yang teridentifikasi secara rutin untuk memastikan berdampak pada sector ekonomi unggulan Kabupaten Pringsewu. Inovasi terkait sector ekonomi unggulan nantinya dapat ditindak lanjuti dengan mengkomunikasikan hasil inovasi dengan stakeholder dalam upaya perwujudannya. Hasil usulan inovasi terkait ekonomi unggulan tidak hanya untuk kepentingan pemerintah, namun juga kepentingan masyarakat Kabupaten Pringsewu. Dalam menanggapi hal tersebut, sehingga perlu untuk secara rutin melakukan publikasi atau exhibition hasil usulan inovasi.

8.3 Arahan Kebijakan dan Strategi

Dalam mewujudkan SIDA di Kabupaten Pringsewu, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam mewujudkan Potensi Potensi Ekonomi dan Sektor Unggulan, Kelembagaan, Jaringan dan Sumber Daya SIDA di Kabupaten Pringsewu. Berikut beberapa strategi yang dapat dilakukan:

1. Menambah program/kegiatan inovasi dalam rangka mengoptimalkan potensi ekonomi di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan serta industri
2. Penjaminan mutu keefektifan dan keberlanjutan program/kegiatan inovasi bidang ekonomi
3. Perbup Pringsewu 25/2021 Tentang Inovasi Daerah bagian kedua mengenai Kelembagaan Inovasi daerah memuat bahwa perangkat daerah sesuai bidangnya bertanggung jawab dalam menyelenggarakan inisiatif inovasi daerah. Setiap kelembagaan OPD di Kab Pringsewu perlu membuat program untuk menggiatkan inovasi daerah.
4. Perlu pembentukan kelembagaan masyarakat untuk segala sektor sehingga lebih inisiatif dalam inovasi daerah terutama peningkatan produk dan proses. Juga melibatkan perguruan-perguruan tinggi dalam giat berinovasi untuk Kab. Pringsewu.
5. Membentuk kelembagaan penelitian dan pengembangan yang ditugaskan untuk mengkoordinasikan, memantau, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan inovasi daerah.
6. Melakukan program stimulasi bagi OPD dalam menghasilkan inovasi – inovasi yang menjawab kebutuhan Kabupaten Pringsewu
7. Melakukan program yang mewadahi inovasi daerah baik pada ruang – ruang penelitian, diskusi, dll

8. Melakukan program yang mewadahi SDM Masyarakat dalam menghasilkan inovasi sesuai kebutuhan Kabupaten Pringsewu
9. Melakukan program peningkatan kualitas SDM ASN dalam kesiapan untuk menghasilkan inovasi yang dapat memajukan Kabupaten Pringsewu

BAB IX

INDIKATOR KETERCAPAIAN KINERJA SIDa

Penetapan indikator ketercapaian kinerja SIDa Kabupaten Pringsewu bertujuan untuk memberi arahan mengenai pengukuran keberhasilan pencapaian SIDa Kabupaten Pringsewu sampai akhir periode perencanaan. Penetapan indikator SIDa Kabupaten Pringsewu diakumulasi dari pencapaian indikator keluaran program SIDa Kabupaten Pringsewu setiap tahun, sehingga kondisi yang diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun perencanaan dapat dicapai. Indikator ketercapaian SIDa Kabupaten Pringsewu dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja capaian SIDa Kabupaten Pringsewu.

Adapun indikator ketercapaian kinerja Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pringsewu terbagi menjadi indikator ketercapaian mengenai potensi ekonomi dan sektor unggulan, kelembagaan SIDa, jaringan SIDa dan sumber daya SIDa Kabupaten Pringsewu. Berikut adalah indikator ketercapaian kinerja SIDa Kabupaten Pringsewu.

Tabel 9. 1 Indikator Ketercapaian Kinerja SIDa Kabupaten Pringsewu

No	Komponen	Variabel	Indikator
1	Potensi Ekonomi dan Sektor Unggulan	<ul style="list-style-type: none"> Lembaga pendamping dan pembina kelompok pertanian dan perkebunan serta pelaku usaha Pembuatan program/kegiatan inovasi yang mendukung ekonomi bagi kelompok pertanian dan perkebunan, pelaku usaha, melibatkan dinas koperasi dan umkm, perguruan tinggi dan lembaga pengabdian masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Lembaga integrasi kegiatan inovasi bidang ekonomi Penjaminan mutu kegiatan inovasi Jumlah program pendukung kegiatan ekonomi berbasis inovasi Jumlah perusahaan/usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah Program pembinaan dan pelatihan kelompok pertanian dan perkebunan, serta pelaku usaha
2	Kelembagaan SIDa	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan lembaga yang meningkatkan penyelenggaraan inovasi daerah Pembuatan program-program yang meningkatkan budaya inovasi daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Terbentuknya badan penelitian dan pengembangan Kab Pringsewu Jumlah inisiatif inovasi daerah meningkat dari OPD, perguruan tinggi

No	Komponen	Variabel	Indikator
			dan kelembagaan masyarakat
3	Jaringan SIDA	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi antar Lembaga dalam pengembangan Inovasi Daerah • Upaya mobilisasi Sumber Daya Manusia • Pemanfaatan sarana prasarana dan Hak Kekayaan Intelektual 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah partisipan yang mengikuti komunikasi pengembangan inovasi daerah • Jumlah Kerjasama dengan akademisi, LSM dan Swasta dalam pengembangan inovasi daerah • Jumlah program kegiatan antar OPD dalam pengembangan inovasi daerah • Jumlah program kegiatan antar OPD dalam pengembangan keterampilan / pengetahuan SDM • Jumlah paten yang didaftarkan • Jumlah sarana prasarana pendukung SIDA • Jumlah publikasi terkait inovasi daerah • Jumlah Program pendukung Inovasi Daerah • Jumlah Peserta yang mengikuti program Inovasi Daerah
4	Sumber Daya SIDA	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan penguatan pendidikan dan pelatihan inovasi untuk pengembangan inovasi • Pengembangan sosialisasi pentingnya berinovasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pelayanan sarana pendidikan • Jumlah guru kualifikasi lulusan S-1/D-IV • Persentase Angka Partisipasi Murni • Jumlah keikutsertaan pelatihan dan bimbingan teknis di bidang teknologi dan informasi

Sumber: Hasil Analisis, 2021

BAB X

RENCANA AKSI SIDA KABUPATEN PRINGSEWU

Rencana aksi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pringsewu merupakan implementasi strategi dari program Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pringsewu dalam jangka waktu perencanaan tertentu yang didalamnya juga mencakup berbagai arahan kebijakan, fokus program dan kegiatan prioritas yang dilengkapi indikator pencapaian dan OPD yang bertanggung jawab.

Adapun berikut adalah rencana aksi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pringsewu.

Tabel 10. 1 Rencana Aksi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pringsewu

No	Fokus Program/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Tahun 2021 (Kondisi awal)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025 (Target)	Penanggung Jawab
Potensi Ekonomi dan Sektor Unggulan								
1	Penentuan atau Pembentukan Lembaga Khusus Pemantauan, Pendampingan, Pembinaan, kegiatan Inovasi bidang Ekonomi	Lembaga Integrasi kegiatan Inovasi bidang Ekonomi	-	50 %	100 %	-	-	BAPPEDA
2	Penjaminan Keberlangsungan dan Keberlanjutan Kegiatan Inovasi bidang ekonomi	Program Penjaminan Mutu Kegiatan Inovasi	-	10 %	30 %	50 %	80%	Seluruh OPD
3		Aplikasi Monitoring Pendampingan	-	10 %	30 %	50 %	80%	Bagian Pengadaan Barang

No	Fokus Program/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Tahun 2021 (Kondisi awal)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025 (Target)	Penanggung Jawab
		dan Pembinaan Kelompok Petani dan Pelaku Usaha						dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu
4		Integrasi Kelembagaan bidang ekonomi	50%	60%	70%	80%	90%	Seluruh OPD
5	Program/Kegiatan inovasi pendukung ekonomi (pertanian, pariwisata, industri kreatif yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi)	Jumlah Program Industri Pariwisata	-	2	4	6	8	Diskoperindag dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu
6		Jumlah usaha Industri Ekonomi Kreatif	45	80	100	120	150	Diskoperindag Kabupaten Pringsewu
7		Bimbingan Teknis dan Pelatihan bidang Ekonomi	9	15	20	25	30	Seluruh OPD
Kelembagaan SIDA Kabupaten Pringsewu								
1	Pembentukan lembaga yang meningkatkan penyelenggaraan inovasi daerah	Terbentuknya Badan Penelitian dan Pengembangan Kab Pringsewu yang bertugas untuk mengkoordinasikan, memantau, mengawasi dan mengevaluasi	-	30%	50%	80%	100%	BAPPEDA

No	Fokus Program/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Tahun 2021 (Kondisi awal)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025 (Target)	Penanggung Jawab
		penyelenggaraan inovasi daerah						
2	Penugasan salah satu bagian di setiap OPD dan pembuatan program yang meningkatkan budaya inovasi daerah dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (digital) dalam peningkatan pelayanan publik	Penunjukkan salah satu badan di setiap OPD yang bertugas menggiatkan kegiatan inovasi daerah dan mengkoordinasikannya	-	4	8	15	20	Seluruh OPD
3		Terdapat program di setiap OPD yang menggiatkan kegiatan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan public menggunakan dukungan teknologi informasi dan komunikasi	-	4	8	15	20	Seluruh OPD
4		Jumlah kegiatan kerjasama inovasi daerah meningkat antara OPD, perguruan tinggi dan kelembagaan masyarakat	-	4	8	15	20	Seluruh OPD
5		Program pemberian insentif kepada lembaga atau perseorangan	-	2	4	7	10	Seluruh OPD
6		Jumlah inisiatif inovasi daerah meningkat, baik dari kelembagaan atau perseorangan	-	5	10	15	20	Seluruh OPD
Jaringan SIDA Kabupaten Pringsewu								
1	Peningkatan Komunikasi antar	Jumlah partisipan yang mengikuti forum	-	20%	40%	60%	80%	Seluruh OPD

161

Sumber Daya SIDA Kabupaten Pringsewu								
1	Pengembangan dan penguatan	Persentase pelayanan sarana pendidikan	60%	65%	70%	75%	80%	Dinas Pendidikan

162

No	Fokus Program/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Tahun 2021 (Kondisi awal)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025 (Target)	Penanggung Jawab
2	pendidikan dan pelatihan inovasi untuk pengembangan inovasi	Jumlah guru kualifikasi lulusan S-1/D-IV	70%	72%	75%	78%	80%	Dinas Pendidikan
3		Persentase Angka Partisipasi Murni	80%	82%	85%	88%	90%	Dinas Pendidikan
4	Pengembangan sosialisasi pentingnya berinovasi	Jumlah keikutsertaan pelatihan dan bimbingan teknis di bidang teknologi dan informasi	-	50%	60%	70%	80%	BKPSDM dan Seluruh OPD

Sumber: Hasil Analisis, 2021

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

ADI ERLANSYAH